DINAMIKA GERAKAN SOSIAL PEREMPUAN IRAN (PRA & PASCA REVOLUSI 1979)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh

Gelar Sarjana dalam Program Strata Satu (S-1)

Pada Jurusan Sejarah Peradaban Islam (SPI)

Oleh:

ANIS SHOFIYAH

NIM : A92215029

FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA

UINVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

SURABAYA

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Anis Shofiyah

NIM : A92215029

Jurusan : Sejarah Peradaban Islam (SPI)

Fakultas : Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa SKRIPSI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumber-sumbernya. Jika teryata dikemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri, saya bersedia mendapatkan sanksi berupa pembatalan gelar kesarjanaan yang saya peroleh.

Surabaya, 05 April 2019

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL 18F79AFF649717331 6000 ENAM RIBU RUPIAH

Anis Shofiyah

NIM. A92215029

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui

Tanggal, 05 April 2019

Oleh

Pembimbing

Prof. Dr. H. Abd. A'la, M.Ag

NIP. 195709051988031002

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi ini atas nama Anis Shofiyah (A92215029) telah diuji oleh tim penguji dan dinyatakan lulus pada 11 April 2019

Ketua/Penguji

Prof. Dr. H. Abd. A'la, M.Ag
NIP. 195709051988031002

Penguji II

Prof. Dr. H. Ahwan Mukarrom, M.A
NIP. 195212061981031002

Penguji III

H.M. Khodafi, M.Si
NIP. 197211292000031001

Sekretaris/Penguji IV

Dwi Susanto, MA.
NIP. 197712212005011003

Mengetahui,
Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sunan Ampel

Dr. H. Agus Aditoni, M.Ag
NIP. 196210021992031001

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Anis Shofiyah
NIM : A92215029
Fakultas/Jurusan : Adab dan Humaniora / Sejarah peradaban Islam
E-mail address : shofiyahanis39@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
"Dinamika Gerakan Sosial Perempuan Iran (pra & pasca Revolusi 1979)"

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 12 April 2019

Penulis

(Anis Shofiyah)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Dinamika Gerakan Sosial Perempuan Iran (Pra dan Pasca Revolusi 1979)". Dengan fokus permasalahan : (1) bagaimana kondisi dan gerakan perempuan Iran sebelum revolusi? (2) bagaimana kebijakan pemerintah Iran terhadap perempuan pasca revolusi? (3) bagaimana bentuk dan gerakan perempuan Iran sesudah revolusi?.

Dalam penulisannya, skripsi ini menggunakan metode penelitian sejarah yaitu: heuristik, verifikasi, interpretasi dan historiografi. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi dengan menggunakan teori gerakan sosial dan teori gender. Teori gerakan sosial menurut Piotr Sztompka adalah tindakan kolektif yang diorganisir secara longgar tanpa cara terlembaga untuk menghasilkan perubahan dalam masyarakat. Sedangkan teori gender secara umum menjelaskan adanya perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil dari kesepakatan antar manusia yang tidak bersifat kodrati.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa : (1) kondisi dan gerakan perempuan Iran sebelum revolusi mengalami berbagai perubahan. Gerakan perempuan Iran mulai terlihat setelah adanya wacana modernitas di Iran, yang di buat pada masa Dinasti Qajar dan diperluas pada masa Rezim Pahlevi. Pada masa Dinasti Qajar gerakan perempuan Iran secara umum masih terbatas pada ranah keluarga, namun saat Rezim Pahlevi berkuasa gerakan perempuan Iran mulai terlihat di wilayah publik. (2) Kebijakan pemerintah Iran terhadap perempuan pasca revolusi juga berubah-ubah. Pada masa Ayatullah Khomaeni menjabat sebagai Pemimpin Tertinggi, seluruh kebijakan yang dibuatnya disesuaikan dengan syariat Islam. Perempuan kembali mengalami pembatasan di wilayah publik, terutama mengenai hak-hak mereka. Setelah Khomaeni wafat, pembatasan terhadap perempuan sedikit berkurang, kemudian pada masa Khatami, pembatasan mengenai perempuan semakin berkurang. Namun pada masa Ahmadinejad gerakan perempuan mengalami berbagai pembatasan lagi seperti pada masa awal setelah revolusi. (3) Bentuk dan gerakan perempun Iran setelah revolusi semakin terlihat meskipun mendapatkan berbagai tekanan dan pembatasan dari ulama konservatif. Perempuan selalu berusaha untuk menuntut keadilan dan kesetaraan di berbagai bidang agar diberi hak yang sama dalam berbagai hal. Bentuk lain dari gerakan perempuan Iran adalah dengan terlibat dan masuknya perempuan dalam pemerintahan serta peran mereka di bidang sosial dan publik.

Kata Kunci: Perempuan Iran, Sosial, dan Perubahan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRACT

This thesis entitled "The Dynamics of Women's Social Movement of Iran (Pre and Post-Revolution of 1979)". With the focus of the problem: (1) how the condition and Iranian women's movement before the revolution? (2) how the government's policy towards women in post-revolution Iran? (3) how the shape and movement of Iranian women after the revolution?.

In writing, this thesis uses the method of historical research are: heuristic, verification, interpretation and historiography. This study uses a sociological approach to the use of social movement theory and gender theory. The theory of social movements by Piotr Sztompka is collective action loosely organized without an institutionalized way to bring about change in society. While the general theory explaining gender differences in roles between men and women is the result of an agreement between people who are not natural.

The results of this study concluded that: (1) the conditions and the Iranian women's movement before the revolution underwent several changes. Iranian women's movement began to look after their discourse of modernity in Iran, which in the period of the Qajar dynasty and expanded during the Pahlavi regime. During the Qajar dynasty Iranian women's movement in general is still confined to the realm of the family, but when the Pahlavi regime ruling Iran women's movement began to be seen in public areas. (2) The government's policy against women in post-revolution Iran also changing. At the time of Ayatollah Khomaeni served as Supreme Leader, all policies are made adapted to Islamic law. Women re-experiencing restrictions in public areas, especially regarding their rights. After Khomaeni died, restrictions on women slightly reduced, then at the time of Khatami, restrictions on women wane. However, during the women's movement Ahmadinejad suffered various restrictions again like in the early days after the revolution. (3) The shape and movement perempun Iran after the revolution more visible despite getting a wide range of pressures and restrictions of conservative clerics. Women are always trying to demand justice and equality in various fields in order to be given equal rights in various ways. Another form of the Iranian women's movement is involved and the inclusion of women in government and their role in the social and public.

Keywords: Iranian Women, Social, and Change.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

PERNYATAAN KEASLIAN.....ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN TIM PENGUJI. iv

TABEL TRANSLITERASI v

HALAMAN MOTTO vi

HALAMAN PERSEMBAHAN vii

ABSTRAK viii

KATA PENGANTAR.....x

DAFTAR ISI.....xii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan penelitian.....7
D. Kegunaan Penelitian 7
E. Pendekatan dan Kerangka Teoritik 8
F. Penelitian Terdahulu 14
G. Metode Penelitian 15
H. Sistematika Pembahasan 22

BAB II : KONDISI DAN GERAKAN PEREMPUAN IRAN SEBELUM REVOLUSI

A. Sejarah Iran 24
   1. Sekilas tentang Iran. 24
   2. Masuknya Wacana Modernitas di Iran. 28
   3. Pengaruh Wacana Modernitas Terhadap Gerakan Perempuan Iran.....34
B. Kondisi Perempuan Iran di Bawah Kebijakan Rezim pahlevi 25

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Sosial Budaya.....37
2. Pendidikan.....40
3. Undang-Undang Hukum Keluarga. 44
C. Gerakan Perempuan Iran Sebelum Revolusi 28
1. Terbentuknya Organisasi Perempuan Iran.....46
2. Masuknya Perempuan dalam Dunia Politik.....50
3. Perempuan Mendukung Revolusi Iran.....52

BAB III : KEBIJAKAN PEMERINTAH IRAN TERHADAP PEREMPUAN PASCA REVOLUSI
A. Kebijakan dan Pengaruh Ayatullah Khomaeni.....56
B. Kebijakan Pemerintah Iran Semasa Khomaeni.....68
C. Kebijakan Pemerintah Pasca Khomaeni. 74
1. Ali Akbar Hashemi Rafsanjani. 75
2. Mohammad Khatami.....77
3. Mahmoud Ahmadinejad.....83

BAB IV : BENTUK DAN GERAKAN PEREMPUAN IRAN SESUDAH REVOLUSI
A. Gerakan Perempuan Iran..... 91
B. Masuknya Perempuan dalam Pemerintahan 101
C. Peran Perempuan Iran di Bidang Sosial dan Publik 109
1. Perempuan di Bidang pendidikan. 109
2. Kegiatan Sosial Perempuan Iran. 115
3. Perempuan di bidang Ekonomi. 118

BAB V : PENUTUP
A. Kesimpulan 129
B. Saran.....132

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA 133

LAMPIRAN-LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kaum perempuan tidak selalu mendapat tempat yang nyaman dan menyenangkan di mana mereka berada. Sebelum masa emansipasi dan gerakan perempuan di berbagai belahan dunia mulai muncul, perempuan masih dianggap sebagai manusia kelas dua.[1] Perempuan yang dianggap sebagai manusia kelas dua juga mempunyai kesamaan semangat persamaan hak antar gender. Ketika Islam datang, derajat perempuan diangkat, dan derajat mereka disamakan antara perempuan dan laki-laki, karena yang membedakan hanyalah kadar ketakwaan mereka.[2]

Setelah perang Dunia I, fokus perjuangan kaum perempuan tidak lagi pada perbudakan dan persoalan gender, namun telah bergeser kepada isu-isu yang universal, misalnya perjuangan rasisme, ketimpangan kelas, ketidak berdayaan, ilmu pengetahuan pembangunan dan masih banyak hal lain. Dengan demikian, gerakan perempuan perlahan-lahan mengambil tempat dan memerangi diskriminasi yang menghambat gagasan dan kiprah kaum perempuan.[3]

Sebagaimana gerakan perempuan di Iran juga mengalami perkembangan yang begitu pesat, sebelum adanya revolusi Islam Iran,

---

[1] *100 Great Women Suara Perempuan yang Menginspirasi Dunia* (Yogyakarta: Jogja Bangkit Publisher, 2010), 11.
[2] Zulfahani Hasyim, "Perempuan dan Feminisme dalam Prespektif Islam" dalam *Jurnal Penelitian* MUWAZAH, Vol.4, No.1, Juli 2012, 38.
[3] Ariana Suryorini, "Menelaah Feminisme dalam Islam",dalam *Jurnal Penelitian* SAWWA, Volume 7, Nomor 2, April 2012 , 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perempuan di bawah pemerintahan Rezim Pahlevi memiliki kedudukan yang sama dengan lelaki dalam hal hak voting dengan memperluas hak hak voting kepada perempuan dan pemanfaatan perempuan dalam berbagai bidang. Rezim Shah secara sederhana juga mereformasi kedudukan perempuan. Sejak awal dekade 1920-an beberapa tokoh intelektual, laki-laki dan perempuan tengah berjuang untuk meningkatkan pendidikan, status sosial, dan hak-hak perempuan. Dalam jumlah kecil, kaum perempuan mulai memasuki pekerjaan pada sektor pendidikan, perawat, bahkan bekerja di pabrik.

Meskipun emansipasi perempuan dari norma-norma tradisional telah berlangsung dalam pemerintahan Pahlevi, namun dalam hal-hal krusial di dalam perundangan keluarga dan perundangan hak-hak politik nyaris tidak mengalami perubahan. Praktik perceraian (thalaq) tetap sebagai sesuatu yang enteng dan mudah bagi laki-laki. Pengasuhan anak tetap menjadi kewajiban utama pihak perempuan. Poligami dan perkawinan *mut'ah* tetap saja diizinkan. Hanya dengan undang-undang perlindungan keluarga tahun 1967 dan tahun 1975 hak prerogratif perempuan sebagian terlindungi oleh legislasi yang mensyaratkan perceraian harus disampaikan di pengadilan dan mensyaratkan izin istri untuk perkawinan poligami.[4]

Pada tahun 1936 pemakaian hijab dilarang dan perempuan perkotaan dari kalangan menegah ke atas mulai mengenakan pakaian

[4] Ira M. Lapidus, *Seajarah Sosial Umat Islam bagin Tiga* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

modern. Sejak saat itulah, perempuan Iran yang merasa tidak suka dengan kebijakan Pahlevi atas larangan memakai kerudung mulai membuat penekanan terhadap pemerintah.[5] Ketika Muhammad Reza Pahlavi menggantikan posisi ayahnya sebagai Shah, dia mengikuti jalan yang sama dengan menggunakan metode yang lebih modern. Dia melakukan kampanye propaganda yang ekstensif, dan perempuan menghadapi rintangan yang cukup besar dalam memasuki institut tinggi atau lingkaran sosial tertentu saat mengenakan jilbab.

Kekuasaan Shah yang semakin hari semakin semena-mena menjadikan masyarakat Iran murka, begitu juga dengan perempuan. Sehingga tanda-tanda pertama Revolusi mulai muncul pada tahun 1963, hingga berakhir pada kemenangan Revolusi pada bulan Februari 1979. Pada saat revolusi berlangsung, muncul tanda-tanda perempuan kembali ke diri sendiri dan kebangkitan kembali identitas yang disembunyikan selama periode kekerasan dan kontrol Amerika atas Iran. Fenomena perempuan mengenakan jilbab di publik menyebar dan merupakan contoh perlawanan yang bersinar.[6]

Tidak diragukan lagi bahwa perempuan memiliki peran yang sangat penting dalam kemenangan Revolusi Islam dan mereka memberikan dukungan tanpa batas kepada para pemimpinnya, sebagaimana dinyatakan oleh Pemimpin Revolusi. Ayatollah Khamenei juga takjub akan peran perintis dan pemimpin perempuan dalam Revolusi:

[5] Sidik Jatmika & Vonny Nuansari, *Dinamika Partisipasi Politik Perempuan Iran* (Yogyakarta: LPPI, 2002), 51.
[6] Ansia Khaz Ali, *Iranian Women After The Islamic Revolution*, 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam pemberontakan kami berhutang budi kepada perempuan. Laki-laki memberi contoh perempuan yang berada di jalan. Perempuan mendorong para pria untuk melakukan sebuah pemberontakan, dan bahkan terkadang yang memimpin jalan. Perempuan adalah makhluk yang luar biasa. Dia memiliki kemampuan yang luar biasa dan kuat (Imam Khomeini, 6/5/1980).[7]

Setelah revolusi Iran berlangsung, Ayatullah Khomeini memberlakukan peraturan yang berbeda kepada para perempuan Iran, yakni dengan mengembalikan fitrah perempuan dijalan yang sesuai dengan ajaran Islam dengan memerintahkan perempuan Iran agar kembali menggunakan Hijab atau penutup kepala untuk perempuan di Iran.[8] Sebuah revolusi populis di 1978-1979 mengakhiri tradisi lama monarki Iran, menggantikannya dengan republik Islam yang unik, dimana para ulama agama memegang kendali politik di bawah pemimpin tertinggi, yakni Ayatollah Ruhollah Khomeini.

Meskipun partisipasi yang dilakukan besar-besaran oleh perempuan Iran dalam revolusi dan peningkatan berikutnya yakni dalam tingkat dan bentuk kehadiran sosial perempuan dan prestasi pendidikan, namun, Republik Islam membawa banyak perubahan negatif untuk hak-hak perempuan dan kebebasan pribadi. Perempuan mengalami diskriminasi dalam sektor publik, dan kemunduran dalam status pribadi

[7] Krysta Wise, *Islamic Revolution of 1979: The Downfall of American-Iranian Relations,* Legacy: Vol. 11 : Iss. 1, Article 2, 4.
[8] Ali, *Iranian Women After The Islamic Revolution,* 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan hukum keluarga serta hubungan gender patriarkal terus berlanjut dan dilembagakan.

Namun sejak tahun 1979-2005 menjadi salah satu jalan yang sulit bagi perempuan Iran. Pertama, mereka kalah besar dari Revolusi, karena melihat posisi status dan sosial hukum mereka secara dramatis menurun dalam nama kebangkitan agama. Diantaranya larangan penyanyi perempuan, pengucilan dari kekuasaan politik, marginalisasi ekonomi, dan menambahkan luka kembalinya perceraian sepihak, poligami, dan pernikahan sementara beberapa dari hasil gender mengerikan yang ditandai sepuluh tahun pertama Revolusi Islam. Dekade kedua dalam Republik Islam juga terlihat dengan munculnya pergeseran kebijakan, kepemimpinan baru, dan meningkatnya harapan masyarakat. Janji-janji reformasi, dan bagaimanapun pemerintah tidak menyadari akan janji-janji tersebut, sehingga terjadi gerakan protes dari akhir 1990-an yang terlarut dari keretakan internal maupun represi eksternal. Namun demikian, banyak perubahan sosial telah terjadi-dalam dinamika keluarga, diantaranya adalah pencapaian pendidikan, politik budaya, dan peran sosial perempuan.[9]

Dengan adanya latar belakang diatas, maka peneliti tergerak untuk mendiskripsikan lebih lanjut dan mendalami tentang gerakan perempuan Iran karena gerakan perempuan di Iran ini lebih mengedepakan perubahan sistem sosial dimana sejak perempuan diperbolehkan ikut serta

[9] Valintine M. Moghadam, *Women in The Islamic Republic of Iran : Legal Status, Social Politions, and Collective Action*, 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memilih dalam pemilu, perempuan di Iran mulai mengalami perkembangan dalam berbagai segi kehidupan, namun disamping perkembangan itu, perempuan juga masih mengalami berbagai diskriminasi seperti yang telah dijelaskan diatas, sehingga dalam pembahasan yang akan ditulis oleh peneliti adalah mengenai berbagai tantangan dan kondisi yang dialami perempuan Iran baik sebelum revolusi maupun sesudah revolusi, sehingga muncul gerakan-gerakan yang dilakukan oleh perempuan Iran. Maka dalam penelitian yang dilakukan secara individu ini, peneliti mengambil judul **"Dinamika Gerakan Sosial Perempuan Iran (Pra & Pasca Revolusi 1979)".**

B. Rumusan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti membatasi penulisan agar pembahasan tidak melebar, maka penulis hanya membatasi pada gerakan sosial perempuan Iran baik sebelum maupun sesudah revolusi, dan perjalanan kiprah perempuan di Negara Iran. Dengan demikian, permasalahan yang dapat penulis jelaskan dapat dibagi ke dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi dan gerakan perempuan Iran sebelum revolusi?
2. Bagaimana kebijakan pemerintah Iran terhadap perempuan pasca revolusi?
3. Bagaimana bentuk dan gerakan perempuan Iran sesudah revolusi?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui kondisi dan gerakan perempuan Iran sebelum revolusi.
2. Untuk mengetahui kebijkan pemerintah Iran terhadap perempuan pasca revolusi.
3. Untuk menjelaskan bentuk dan gerakan perempuan Iran sesudah revolusi.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian yang penulis lakukan, terdapat beberapa manfaat atau kegunaan, baik secara teoritis maupun praktis :

1. Penelitian ini bermanfaat untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan kita tentang bagaimana sejarah pemerintahan Iran dibawah penguasa yang berbeda-beda, mulai dari pemerintahan Rezim Shah Pahlevi, hingga pemerintahan setelah terjadinya revolusi Iran, dan kondisi serta gerakan-gerakan perempuan Iran di dalam pemerintahan yang berbeda tersebut.
2. Untuk menjadi bahan teoritis guna kepentingan penulisan karya tulis ilmiah. Serta bermanfaat bagi pengembangan dunia keilmuan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sunan Ampel Surabaya khususnya jurusan Sejarah Perdaban Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Bagi Masyarakat, penelitian ini bermanfaat sebagai gambaran atau informasi tentang kondisi dan pergolakan serta perjuangan perempuan Iran dalam memajukan kondisi sosial perempuan mereka di Iran.

E. Pendekatan dan Kerangka Teori

Penulisan suatu karya sejarah tentunya juga diperlukan suatu pendekatan-pendekatan dengan ilmu-ilmu sosial yang lain, karena pada hakikatnya, sebuah ilmu tidak dapat berdiri sendiri dan berkaitan dengan ilmu lain atau sering disebut interdisipliner. Untuk menganalisis lebih sebuah karya, maka diperlukan metodologi dan teori yang dilihat dari sudut pandang atau pendekatan sesuatu. Pendekatan dari berbagai aspek diharapkan dapat menghasilkan karya tulis sejarah yang dikaitkan dengan masalah-masalah dalam ilmu-ilmu sosial.

Sejarah sebagai sebuah disiplin ilmu yang menunjukkan fungsinya yang setara dengan disiplin ilmu-ilmu lain, yang bermanfaat bagi kehidupan manusia yang sesuai dengan perkembangan dan kemajuan mengenai ilmu pengetahuan. Kecenderungan seperti itu maka akan semakin nyata apabila penulisan sejarah tidak hanya tentang kisah, dogeng-dongeng kedaerahan yang mengandung unsur-unsur mitos didalamnya, melainkan penulisan sejarah yang didalamnya terkandung eksplanasi kritis dan ilmu pengetahuan.[10]

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis, dimana menurut Sartono Kartodirjo pendekatan sosiologis

[10] Dudung Abdurrahman. *Metode Penelitian Sejarah*(Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk meneropong segi-segi sosial berkaitan dengan peristiwa yang dikaji, umpannya golongan sosial mana yang berperan, serta nilai-nilainya, hubungan dengan golongan lain, konflik berdasarkan kepentingan, ideologi, dansebagainnya.[11] Pendekatan ini dipakai untuk mengungkapkan bagaimana kondisi sosial perempuan Iran selama era revolusi, baik itu sebelum maupun sesudah revolusi.

Deskripsi dalam sejarah sosial sebagai "peta sosial" gejala sejarah akan mencakup golongan sosial, jenis hubungan sosial, pelapisan sosial, peranan dan status sosial, dan lain sebagainya. Jadi, suatu gejala sosial sangatlah wajar dan relevan untuk dipelajari dengan pendekatan sosiologi.[12] Menurut Sartono Kartodirjo Prespektif sosial (sosiologi) meningkatkan kemampuan untuk mengekstrapolasikan berjenis-jenis aspek sosial masyarakat atau gejala sejarah yang dikaji, seperti adanya pelbagai golongan sosial, jenis-jenis kepemimpinan, macam-macam ikatan sosial, dan lain sebagainnya. Ilmu sosiologi juga digunakan untuk mengetahui sejauh mana peran dan pengaruh dari suatu institusi terhadap perkembangan komunitas yang mengitarinya.

Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori gerakan sosial, banyak pakar yang menyimak peran khas gerakan sosial. Mereka melihat gerakan sosial sebagai salah satu cara utama untuk menata ulang masyarakat modern (Blummer, 1951); sebagai pencipta perubahan sosial (Killian, 1964); sebagai aktor historis (Touraine, 1977); sebagai

[11] Sartono Kartodirjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah* (Jakarta : UI Press, 1985), 4.
[12] Ibid., 144.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

agen perubahan kehidupan politik atau pembawa proyek historis (Eyerman & Jamison, 1991); adapula yang menyatakan : “Gerakan massa dan konflik yang ditimbulkannya adalah agen utama perubahan sosial” (Adamson & Borgos, 1984).[13]

Menurut Piotr, gerakan sosial adalah tindakan kolektif yang diorganisir secara longgar, tanpa cara terlembaga untuk menghasilkan perubahan dalam masyarakat mereka. Adapun ciri gerakan sosial yakni wujud kesukuan untuk berubah di kalangan anggota masyarakat atau upaya kolektif khusus untuk menyatakan keluhan dan ketidakpuasan dan atau mendorong atau menghambat perubahan. Hal ini senada dengan penelitian yang ditulis peneliti, bahwa perempuan-perempuan di Iran bersatu untuk mendorong pemerintah serta menyatakan keluhan-keluhan lewat media massa atau tulisan-tulisan yang mereka tulis, sehingga pada akhirnya mereka membentuk sebuah organisasi atau perkumpulan untuk wanita-wanita di Iran dalam rangkah memajukan potensi perempuan di Iran.

Menurut Burns, 1985 dalam bukunya Piotr, bahwa gerakan sosial mengemban struktur sosial dalam bentuk sistem hukum yang diperoleh dan pada waktu bersamaan gerakan ini menciptakan, mencipta ulang dan merombak sistem hukum melalui tindakannya. Pendapat serupa dikemukakan oleh Dieter Rucht bahwa gerakan sosial pada waktu bersamaan adalah ciptaan sekaligus pencipta pola masyarakat. Meski

[13] Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial* (Jakarta: Prenada, 2014),323.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gerakan sosial bertindak dalam suasana historis yang diciptakan dan dalam suasana yang relatif stabil, namun gerakan ini juga secara aktif berpasrtisipasi mengubah percaturan politik, konstelasi kekuasaan, dan simbol kultural.

Secara historis gerakan sosial adalah fenomena universal. Rakyat diseluruh masyarakat manusia tentu mempunyai alasan untuk bergabung dan berjuang untuk mencapai tujuan kolektif mereka dan menentang orang yang menghalangi mereka mencapai tujuan itu. Ada gerakan yang menekankan pada inovasi, berjuang untuk memperkenalkan institusi baru, hukum baru, bentuk kehidupan baru, dan keyakinan baru. Singkatnya, gerakan ini ingin membentuk masyarakat ke dalam satu pola yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Orientasi gerakan ini adalah ke masa depan. Perubahan diarahkan ke masa depan dan menekankan pada sesuatu yang baru.[14] Dalam hal ini perempuan Iran berperan akrif dalam gerakan-gerakan yang dibentuk oleh perempuan Iran, guna menunjukkan bahwa perempuan bisa terlibat dalam hal-hal yang biasa dilakukan oleh lelaki. Perempuan juga mampu menunjukkan eksistensinya dalam kehidupan sosial maupun dalam hal lainnya seperti pendidikan, ekonomi, maupun politik.

Teori lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori gender. Menurut Harien dalam konsep teori dan analisis gender, mendefinisikan gender sebagai perbedaan peran, fungsi, status dan tanggung jawab pada

[14] Ibid., 333.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

laki-laki dan perempuan sebagai hasil dari bentukan (konstruksi) sosial budaya yang tertanam lewat proses sosialisasi dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dengan demikian gender adalah hasil kesepakatan antar manusia yang tidak bersifat kodrati. Oleh karenanya gender bervariasi dari satu tempat ke tempat lain dan dari satu waktu ke waktu berikutnya. Gender tidak bersifat kodrati, dapat berubah dan dapat di pertukarkan pada manusia satu ke manusia lainnya tergantung waktu dan budaya setempat.[15]

Menurut Ihromi, gender adalah interpretasi mental dan cultural terhadap perbedaan kelamin dan hubungan laki-laki perempuan. Kadang-kadang, interpretasi mental ini lebih merupakan keadaan ideal daripada apa yang sesungguhnya di lakukan dan di lihat. Gender biasanya dipergunakan untuk menunjukkan pembagian kerja yang dianggap tepat bagi pria dan wanita. Seringkali kegiatan didefinisikan sebagai milik laki-laki atau perempuan yang diorganisasikan dalam hubungan saling ketergantungan.[16] Gender sebagai suatu konsepsi, mengacu pada pengertian bahwa di lahirkan sebagai laki-laki atau perempuan keberadaannya berbeda-beda dalam waktu, tempat, kultur, bangsa maupun peradaban. Keadaan itu berubah-ubah dari masa ke masa.

Gender adalah pembagian yang didasarkan pada perbedaan seksual (biologis) tetapi termasuk di dalamnya karakteristik yang dianggap khas perempuan dan lelaki. Sedangkan kesetaraan gender merupakan suatu

[15] Herien Puspitawati, *Konsep, Teori dan Analisis Gender* (Bogor: PT IPB Press, 2013), 1.
[16] T.O Ihromi, *Kajian Wanita dalam Pembangunan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995), 171.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keadaan dimana laki-laki dan perempuan disejajarkan sama. Sejajar disini memiliki arti sama-sama memperoleh hak sebagai manusia dan sama-sama menjalankan perannya dalam keikutsertaan kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasioanal (hankamnas), serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut.[17]

Alasan untuk memasukkan konsep gender adalah ketidakpuasan dengan gagasan statis tentang jenis kelamin.Gender sebagai alat analitik telah berhasil dimanfaatkan dalam studi tentang wanita masyarakat jajahan, dan dari negara asal mereka membawa gagasan mereka sendiri-sendiri tentang apa artinya jadi pria atau wanita, dan apa yang dianggap patut bagi masing-masing diantara mereka. Hukum untuk wanita-wanita pribumi serta perlakuan diri mereka dan diri orang laki-laki didasarkan pada konsepsi para pendatang tadi tentang gender. Hal ini sering mengakibatkan efek yang merusak bagi posisi dan kedudukan kaum wanita pribumi bersangkutan, yang sering kehilangan hak-hak mereka, jarang mendapatkan hak, kesempatan kerja dan kesempatan kedudukan, dalam proses-proses pengambilan keputusan di lingkungan negara maupun keluarga.[18]

F. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan perempuan Iran yang sudah dilakukan oleh sejumlah peneliti, antara lain: *Pertama*,

[17]Angela E.V. King, *Gender Mainstreaming an Overview*(New York: United Nations, 2002), 3-7.
[18]Ibid., 181.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

“Peran Perempuan dalam Revolusi Iran” yang ditulis oleh Imam Nawawi (2015), dari Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga. Dalam penulisan ini dijelaskan bahwa yang menjadi andil dalam revolusi Iran tidak hanya kaum lelaki, tetapi perempuan juga berperan besar dalam perjalanan revolusi Iran. Dikarenakan adanya keinginan yang kuat dari wanita di Iran untuk ikut dan bergerak dalam menumbangkan Rezim Pahlevi, disebabkan kontrol pemerintahan yang tidak sesuai dengan keinginan rakyat Iran, sehingga terjadilah revolusi Iran.

Kedua, “Gerakan Perempuan di Republik Islam Iran Pasca Revolusi 1979” yang ditulis oleh M. Kamaluddin (2011), dari Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah. Dalam penulisan ini dijelaskan bagaimana peran perempuan setelah revolusi Iran, dan bagaimana posisi perempuan setelah adanya revolusi Iran, namun dalam penulisan ini posisi dan peran perempuan yang dijelaskan hanya dalam lingkup pendidikan dan politik, itupun hanya sedikit dibahas pertumbuhan dan perkembangan perempuan Iran setelah revolusi Iran.

Ketiga, Jurnal “POLITIK DAN PEREMPUAN : perjuangan politik perempuan di Iran pasca revolusi Islam 1979” yang ditulis oleh Kiki Ismail (2015), dari UIN Raden Fattah Palembang. Dalam penulisan ini dijelaskan tentang perjuangan gerakan politik yang dibangun oleh perempuan Iran setelah revolusi 1979. Womens politik dibangun atas dasar kebijakan pemerintah yang tidak memuaskan perempuan Iran, karena selama ini politik hanya menjadi bagian atau ranah bagi kaum laki-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

laki, dan perempuan sulit untuk berkembang dalam bidang politik. Sehingga terbentuklah gerakan-gerakan politik perempuan Iran yang berkembang di Iran khususnya setelah revolusi Iran 1979.

G. Metode Penelitian

1. Heuristik

Heuristik adalah sebuah kegiatan pencarian sumber-sumber untuk mendapatkan data-data, atau materi sejarah, atau evidensi sejarah. Seorang peneliti dapat mengumpulkan sebagian data, ia juga dapat mencatat sumber-sumber terkait yang dipergunakan dalam karya terdahulu itu. Dengan demikian, peneliti mulai dapat menjaring sebanyak mungkin jejak-jejak sejarah yang di temukannya. Lalu peneliti memperhatikan setiap jejak itu dan bagian bagiannya, dengan selalu sertanya apakah itu merupakan sumber yang tepat dan apakah itu merupakan data sejarah.[19]

Pada tahap ini, penulis mengumpulkan sumber-sumber yang terkait dengan gerakan perempuan di Iran, namun dalam hal ini, peneliti masih minim informasi dalam mencari sumber-sumber yang sudah dicetak menjadi buku, dikarenakan minimnya literatur yang ada di berbagai perpustakaan, baik itu di perpustakaan Uin Sunan Ampel Surabaya maupun diperpustakaan-perpustakaan lain di daerah maupun dikota. Maka peneliti mencari berbagai sumber data yang berasal dari

[19]Helius syamsudin, *MetodologiSejarah*(Yogyakarta: Ombak (Anggota IKAPI), 2007), 55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Internet, utamanya berasal dari Library Genesis yang memuat berbagai buku yang berkaitan dengan perempuan Iran. Tidak hanya buku, tetapi juga ada berbagai jurnal yang terkait dengan perempuan Iran dalam bentuk pdf. Setelah data-data tersebut terhimpun, maka peneliti harus menerjemahkannya kedalam bahasa Indonesia, guna memastikan apakah data yang terhimpun sesuai dengan data yang diinginkan oleh peneliti atau tidak, karena sumber-sumber yang peneliti temukan rata-rata berbahasa Inggris.

Adapun sumber-sumber tersebut diantaranya:

1) Buku dengan judul "Revolusi Iran" yang ditulis oleh wartawan Indonesia Nasir Tamara yang bekerja di Paris, dan yang mengikuti Khomeini saat kembali ke Iran pada saat Revolusi Iran berlangsung.
2) Buku dengan judul "Women and the political process in twentietht-century Iran", yang ditulis oleh Parvin Paidar.
3) Buku yang berjudul "Women and Politics in Iran: Veiling, Unveiling, and Reveiling" ditulis oleh Hamidah Sedghi, dan telah dipublikasikan oleh United States Of America by Cambridge University Press, New York.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Buku dengan judul “Becoming visible in Iran : Women in contemporary Iranian Society”, yang ditulis oleh Mehri Honarbin.
5) Jurnal pdf yang ditulis oleh Ali Akbar Mahdi, yang berjudul “The Iranian Women’s Movement : A Century Long Struggle”, yang ditulis dalam bahasa Inggris.

Dan masih banyak lagi buku-buku dan berbagai jurnal yang berkaitan dengan perempuan di Iran. Serta berbagai sumber lain seperti berita, artikel, dan lain-lain.

2. Kritik

Setelah berhasil mengumpulkan sumber-sumber dalam penelitian, kita tidak akan menerima begitu saja apa yang tercantum dan tertulis pada sumber-sumber itu. Langkah selanjutnya adalah kita harus menyaring secara kritis, terutama terhadap sumber-sumber pertama, agar terjaring fakta yang menjadi pilihan. Langkah-langkah inilah disebut kritik sumber.[20]

Tujuan utama kritik sumber adalah untuk menyeleksi data, sehingga diperoleh fakta. Setiap data akan dicatat dalam lembaran lepas, agar memudahkan pengklasifikasiannya berdasarkan kerangka tulisan. Kritik terhadap otentisitas sumber-sumber sejarah yang ada. Beberapa langkah yang dilakukan peneliti dalam kritik ekstern antara lain mengidentifikasi sumber dan melakukan

[20]Helius Sjamsuddin, *Metodologi Sejarah,* 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbandingan antar sumber. Sedangkan kritik intern merupakan penilaian atas kreadibilitas sumber sejarah itu sendiri. Dalam hal ini peneliti melakukan kolasi, yaitu membandingkan antara isi satu dengan sumber yang lain.

Pada proses ini, setelah peneliti mengumpulkan berbagai sumber dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia, kemudian peneliti mencoba untuk melihat lagi, apakah data tersebut relevan dengan penelitian yang akan ditulis peneliti. Dilihat dari segi pengarangnya terlebih dahulu, apakah pengarang artikel atau jurnal tersebut merupakan subjek atau pelaku sejarah dari salah satu gerakan perempuan di Iran, ataukah penulis jurnal tersebut memang hidup di Iran tapi tidak ikut andil dalam gerakan-gerakan perempuan Iran.

Namun sebagai contoh, peneliti hanya mengkritik pengarang dari beberapa buku atau jurnal seperti yang tertera diatas, karena bahasan atau isi yang ditulis menurut peneliti sudah seperti yang peneliti inginkan, dan yang dibahas antara peneliti yang satu dengan yang lain itu berbeda-beda. Dalam artikel yang ditulis oleh Dr Ansia Khaz Ali, dengan judul “Iranian Women After The Islamic Revolution” bahwasanya Dr Ansia Khaz Ali adalah seorang profesor yang meraih gelar PhD dalam bahasa dan sastra Arab dari Universitas Teheran. Saat tahun 2010 lalu, dia bekerja sebagai Profesor di empat universitas di Iran dan dia adalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seorang Dekan Institut Human Ilmu Pengetahuan dan Bahasa Asing di A-Zahra University di Teheran. Dia juga mengajar tentang masalah yang terkait dengan wanita di berbagai negara Arab. Dia juga seorang aktivis di berbagai aspek hak-hak wanita dan telah menerbitkan banyak artikel dan makalah di bidang ini. Peneliti mampu mengatakan bahwa tulisan Ansia Ali bisa menjadi sumber karena beliau sendiri penulis yang berasal dari Iran dan ikut serta dalam gerakan-gerakan perempuan yang ada di Iran, dan artikel ini juga menjadi rujukan banyak dalam tulisan-tulisan yang berkaitan dengan perempuan Iran.

Yang kedua adalah buku yang ditulis oleh Hamideh Sedghi, dengan judul "Women and Politics in Iran : Veiling, Unveling, and Reveiling". Dalam hal ini, buku tersebut juga banyak menjadi rujukan bagi peneliti-peneliti lain, karena dia adalah perempuan Iran pertama yang sekarang tinggal di Amerika, dan orang pertama di Amerika yang menulis tentang perempuan Iran dari prespektif ilmu sosial. Disamping menjadi seorang profesor di berbagai universtitas, dia juga menjadi seorang penulis yang tulisannya sudah banyak dipublikasikan, sehingga dia mendapatkan banyak penghargaan dan kehormatan.

Ketiga adalah yang ditulis oleh Nayereh Tohidi, dengan judul " Iran" dalam jurnal Womens rights in the middle east and north Africa. Tohidi merupakan profesor kelahiran Iran di gender

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan perempuan dalam studi departemen di California State University, dimana dia telah mengkordinasikan lecture series Bilingual di Iran sejak 2003. Tohidi diterima MA dan Ph.D. dari University of Illinois di Urbana-Champaign dan mendapatkan gelar Honorer dari Universitas Teheran di Psikologi dan Sosiologi. Daerah pengajaran dan penelitiannya meliputi sosiologi gender, agama (Islam), etnisitas dan demokrasi di Timur Tengah dan pasca-Soviet Central Eurasia, terutama Iran dan Azerbaijan Republic. Dia mewakili LSM perempuan di kedua ketiga dan keempat Konferensi Dunia tentang Perempuan di Nairobi (NGO Forum 1985) dan Beijing (Forum LSM 1995) tentang isu-isu gender dalam Iran dan pasca-Soviet Kaukasus dan Asia Tengah. Pada tahun 2001, ia menjadi penyiar dalam program radio mingguan pada "Perempuan dan Masyarakat di Iran" dan disiarkan ke Iran, Asia Tengah, hingga Eropa melalui Radio Free Europe / Radio Liberty. Berbagai tulisannya pun banyak diterjemhakan kedalam bahasa lain seperti Inggris, Rusia, Perancis dan lain sebagainya.

3. Interpretasi

Interpretasi atau penafsiran sejarah seringkali disebut juga dengan analisis sejarah. Analisis sendiri berarti menguraikan, dan secara terminologis berbeda dengan sitensis yang berarti menyatukan. Namun keduanya, analisis dan sintensis, dipandang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai metode-metode utama dalam interpretasi. Analisis sejarah itu sendiri bertujuan melakukan sintesis atau sejumlah fakta yang diperoleh dari sumber-sumber sejarah dan bersama-sama dengan teori-teori disusunlah fakta itu ke dalam suatu interpretasi yang menyeluruh.[21]

Dalam penelitan ini kita menggunakan teori gerakan sosial untuk menganalisis sebuah masalah. Dengan menggunakan teori ini kita dapat menggabungkan sebuah data yang kita peroleh dan sudah melalui proses kritik dengan teori yang kita gunakan, dari proses penggabungan inilah akan terciptanya sebuah fakta. Seperti halnya sumber-sumber yang kita peroleh tentang perjuangan perempuan Iran dalam banyak segi kehidupan, terutama dari segi sosialnya yang sudah selesai kita kumpulkan dan dipilah, kemudian kita kritik dan analisis. Data-data ini kita gabungkan dengan sebuah teori yang kita pakai yaitu teori gerakan sosial. Dan dari proses penggabungan antara teori dan data inilah yang kemudian akan menciptakan sebuah fakta.

4. Historiografi

Sebagai fase terakhir dalam metode sejarah, historiografi di sisni merupakan cara penulisan, pemaparan, atau pelaporan hasil penelitian sejarah yang telah dilakukan. Layaknya laporan penelitian sejarah ilmiah, penulisan hasil penelitian sejarah itu

[21] Dudung Abdurrahman, *Metode Penelian Sejarah*, 64.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hendaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai proses penelitian, sejak dari awal (fase perencanaan) sampai dengan akhirnya (penarik kesimpulan). Berdasarkan penulisan sejarah itu pula akan dapat dinilai apakah penelitiannya berlangsung sesuai dengan prosedur yang dipergunakannya tepat atau tidak, apakah sumber atau data yang mendukung penerikan kesimpulannhya memiliki validitas dan relialiabilitas yang memadai atau tidak, dan sebagainya.[22]

H. Sistematika Penelitian

Pembahasan dalam penelitian ini, penulis membagi atas beberapa bab, untuk sistematika pembahasan lebih lanjut, penulis akan membagi sebagai berikut:

Bab I, merupakan pendahuluan yang berisi tentang garis besar penelitian, termasuk di dalamnya mencakup latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, pendekatan dan kerangaka teoritik, metode penelitian dan sistematika bahasan. Melalui bab ini akan di ungkapkan gambaran umum tentang seluruh rangakaian penulisan penelitian, sebagai dasar pijakan bagi pembahasan berikutnya.

Bab II, membahas mengenai kondisi dan gerakan perempuan Iran sebelum revolusi. Yang didalamnya menjelaskan sejarah Iran terlebih dahulu dengan berfokus pada masuknya wacana modernitas di Iran hingga

[22] Ibid., 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengaruh modernitas terhadap gerakan perempuan Iran. Fokus selanjutnya pada kondisi perempuan Iran di bawah kebijakan Rezim Pahlevi hingga adanya gerakan-gerakan perempuan Iran sebelum Revolusi.

Bab III, membahas tentang kebijakan pemerintah Iran terhadap perempuan pasca revolusi. Menjelaskan gambaran perempuan Iran dibawah pemerintahan Iran yang berbeda-beda. Dimulai dari perjalanan Ayatullah Khomaini (1979-1981) dalam membangun Iran setelah revolusi dan kebijakannya terhadap perempuan Iran. Gambaran seperti ini berlangsung hingga pemerintahan Mahmoud Ahmadinejad.

Bab IV, membahas tentang bentuk dan gerakan perempuan Iran sesudah Revolusi. Bentuk-bentuk tersebut diantaranya bagaimana gerakan perempuan Iran setelah revolusi, masuknya perempuan dalam pemerintahan, hingga peran perempuan Iran dibidang sosial dan publik.

Bab V, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KONDISI DAN GERAKAN PEREMPUAN IRAN SEBELUM REVOLUSI

A. Sejarah Iran

1. Sekilas tentang Iran

Iran atau yang dulu disebut Persia adalah sebuah negara di Asia Barat dengan penduduknya lebih dari 81 juta penduduk. Iran termasuk dalam 18 negara terpadat di dunia dengan panjang lintasan darat 4.440 km². Iran termasuk negara terbesar kedua di Timur Tengah, serta 17 terbesar di dunia.[23] Negara Iran memiliki area seluas 628.000 mil persegi (1.648.000 km²). Luasnya lebih dari enam kali ukuran Inggris dan sekitar tiga kali ukuran Prancis, yang merupakan negara terbesar di Eropa Barat. Iran memiliki perbatasan yang diperkirakan memiliki panjang total 2.750 mil, dimana lebih dari setengahnya adalah pantai laut, dengan 400 mil berbaring sepanjang laut Kaspia selatan, dan sisanya (1.100 mil) yang terdiri dari bagian utara Teluk Oman dan Teluk Persia.[24]

Dataran Iran menghubungkan tiga wilayah Asia, yaitu Asia Barat, Tengah dan Selatan. Iran terletak di Timur Tengah, antara Turki dan Irak di sebelah barat dan Afghanistan dan Pakistan di sebelah timur; berbatasan dengan Teluk Persia dan Teluk Oman di selatan dan Armenia, Azerbaijan, Laut Kaspia, dan Turkmenistan di utara. Iran

[23]https://en.wikipedia.org/wiki/Iran (23 Dsember 2018)
[24]W.B. Fisher, "Physical Geography", dalam *The Cambridge History of Iran* (Cambridge: The Press Syndicate of The University of cambridge, 1968), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memiliki rantai pegunungan terjal yang mengelilingi beberapa cekungan yang dikenal sebagai Central Plateau, yang memiliki ketinggian rata-rata sekitar 900 meter. Timur dari Central Plateau adalah dua daerah gurun pasir yang luas, gurun garam di utara dan gurun batu dan pasir di selatan.[25]

Di sebelah selatan Iran di kelilingi oleh Teluk Persia dan Teluk Oman yang memisahkan Iran dengan enam negara Teluk. Kedua teluk ini dihubungkan oleh Selat Hormuz yang merupakan jalur perdagangan internasional dari lautan Hindia menuju dunia Arab.[26] Ibu kota negara Iran adalah Teheran. Iran merupakan negara pegunungan yang terletak di daerah Timur Tengah di belahan utara bumi, antara 25 dan 40 garis lintang, serta 44 dan 63 garis bujur. Provinsi terbesar negara Iran adalah Khurasan dengan luas 315.687 km, sedangkan provinsi terkecil adalah Gilan yang luasnya 14.820 km.

Fitur Fisik Iran terdiri dari beberapa pegunungan disekitarnya yang memiliki interior cekungan yang tinggi. Rantai gunung utama adalah Pegunungan Zagros, beberapa puncak di pegunungan Zagros melebihi 3.000 meter di atas permukaan laut, dan di wilayah selatan-tengah negara setidaknya ada lima puncak yang lebih dari 4.000 meter. Ketinggian rata-rata dataran tinggi ini sekitar 900 meter, namun ada juga beberapa pegunungan menara di atas dataran tinggi melebihi

[25] Louis R. Mortimer, "Country profile: Iran," dalam *Library of Congress: Federal Research Division*,(Washington DC: Kessinger Publishing, 2008), 3.
[26] Muhammad Syafi'i Antonio, *Ensiklopedia Perdaban Islam Persia* (Jakarta: Tazkia Publishing, 2012), 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3.000 meter. Bagian timur dataran tinggi ditutupi oleh dua gurun garam, yakni Dasht-e Kavir dan Dasht-e Lut. Iran hanya memiliki dua hamparan dataran rendah; dataran Khuzestan di barat daya dan dataran pantai Laut Kaspia di utara.[27]

Iran memiliki iklim variabel. Di barat laut, terdapat musim dingin dengan hujan salju yang berat selama bulan Desember dan Januari. Beserta Musim Semi, musim gugur, dan musim panas. Di selatan, musim dingin lebih ringan dan musim panas sangat panas, suhu rata-rata pada bulan Juli melebihi 38° C. Secara umum, Negara Iran kebanyakan beriklim kering atau semi kering, di mana sebagian besar curah hujan tahunan relatif sedikit yang jatuh dari Oktober sampai April.[28]

Iran adalah negara yang beragam, terdiri dari berbagai kelompok etnis dan bahasa yang bersatu melalui kebangsaan Iran. Syiah Islam menjadi agama resmi Iran. Setidaknya 90% dari penduduk Muslim Iran adalah Muslim Syiah, dan sekitar 8 persen adalah Muslim Sunni. Agama lain yang hadir di Iran adalah Kristen (terutama Armenia dan Assyria, lebih dari 300.000 pengikut), iman Baha'i, Zoroastrianisme, dan Yudaisme. Konstitusi mengakui Kristen, Yahudi, dan Zoroastrianisme sebagai agama minoritas yang sah. Dan sejak tahun

[27] Eric Hooglund, "Iran; A Country Study,"dalam *Federal Research Division*,ed.Glenn E. Curtis and Eric Hooglund(Washington DC: Library of Congress, 2008), 87.
[28] Ibid., 88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1979 Iman Baha'i tidak diakui sebagai agama minoritas yang sah di Iran.[29]

Menurut catatan sejarah, dataran tinggi Iran, tanah air bangsa Persia, pertama kali dihuni oleh bangsa proto-Iran. Mereka membangun perdadaban dan dikenal sebagai peradaban pertama banga Persia. Setelah itu, diwilayah Iran berkembang perdaban Elam sampai datangnya bangsa Arya pada millennium kedua dan ketiga SM. Kemudian bangsa Arya mendirikan kekaisaran pertama Persia, yaitu kekaisaran Media sejak tahun 728-550 SM. Persia kemudian dikuasai oleh Kekaisaran Akhmeniyah yang didirikan oleh Cyrus Agung dari tahun 648-330 SM.[30] Kekaisaran ketiga Persia yakni Kekaisaran Parthia, yang berkuasa dari 248 SM hingga 224 M. Pada tahun 226-651 M, Iran dikuasai oleh kekaisaran Sasanid. Kekasaran ini kemudian berakhir setelah kedatangan Islam.[31]

Orang-orang Arab membawa dan memperkenalkan Islam, yang akhirnya Islam menjadi agama dominan. Dalam abad-abad berikutnya, Iran diperintah oleh suksesi dinasti Arab, Iran, dan Turki. Pada abad ketiga belas, pemimpin Mongol Genghis Khan menyerbu wilayah Iran, kemudian dinasti Mongol memerintah Iran selama hampir dua abad. Pada tahun 1501 Iran dipegang oleh Dinasti Safawi dan menjadikan aliran Syiah sebagai madzhab resmi negara.[32] Pada tahun 1786 Dinasti

[29]Louis R. Mortimer, “Country profile: Iran,”, 6.
[30]Antonio, *Ensiklopedia Perdaban Islam Persia*, 9.
[31] Ibid,.13.
[32]Mortimer, “Country profile: Iran,”, 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Qajar berdiri hingga 1925, dan digantikan oleh Dinasti Pahlevi hingga 1979. Kemudian berdirilah Republik Islam Iran setelah Revolusi 1979.

2. Masuknya wacana modernitas di Iran

Di tahun 1786, Aga Mohammad mendirikan dinasti Qajar yang berakhir di tahun 1925. Teheran dijadikannya Ibu kota Iran yang saat itu masih bernama Persia.[33] Antara tahun 1800-1828, beberapa kali Rusia menyerang perbatasan Iran di wilayah utara sehingga beberapa provinsi utara direbut oleh Rusia. Ekonomi Iran sejak tahun 1870 dapat dikatakan dipegang orang-orang asing. Rusia memperoleh konsesi pengolahan minyak di Iran Utara, perikanan di Laut Kaspia, pembuatan jalan kereta api dan jalan raya, pembuatan bank, dan pendirian korps militer Iran di bawah pengawasan perwira-perwiranya. Sedangkan Inggris mendapat konsesi untuk membuat telegraf, pembuatan Imperial Bank of Persia, pengangkuran laut, pengolahan kayu dan hasil tambang, pekerjaan irigasi dan lainnya.[34]

Intervensi politik dan ekonomi Eropa membangkitkan Qajar untuk memodernisir dan memperkokoh perangkat kenegaraan. Pengaruh Eropa membentuk minat kelas atas pemerintahan terhadap reformasi kemiliteran Iran dan institusi pemerintahan sejalan dengan pola model Barat. Reformasi tersebut juga menimbulkan terbentuknya strata baru pemikir modernis Islam dan intelektual didikan Barat yang cenderung

[33] Parvin Paidar, *Women and The Political Process in Twentieth-Century Iran* (Cambridge: Syndicate of the University of Cambridge, 1995), 37.
[34] Nasir Tamara, *Revolusi Iran* (Jakarta: Sinar Harapan, 1980), 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap modernisasi Iran sebagai cara yang efektif untuk melawan kekuasaan asing dan memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat.

Sejalan dengan itu, hubungan antara Rezim Qajar dengan ulama banyak terjadi ketegangan karena kebijakan Rezim Qajar banyak bertentangan dengan kalangan ulama. Muhammad Shah (1834-1848) membuat kebijakan keagamaan yang anti ulama' dengan mengambil metode pemerintahan ala Barat. Ketegangan semakin meningkat pada saat pemerintahan Nasir al-Din (1848-1896), ia membuat kebijakan yang membatasi hak keagamaan ulama' dengan terbatas pada tempat masjid dan tempat (makam) suci, serta mengurangi sumbangan dana, dan memprakarsai pendirian sekolah-sekolah sekuler sebagai tandingan sekolah-sekolah ulama'.[35]

Pada tahun 1891 dan 1892, sebuah koalisi dari beberapa kalangan seperti ulama', pedagang, intelektual liberal, pegawai, bahkan perempuan melakukan demonstrasi umum terhadap monopoli tembakau yang diberikan pemerintah kepada Inggris.[36] Keberlangsungan konsesi ini membuat Inggris melalui *Imperial Tobacco Corporation* akan menjadi satu satunya negara yang berhak membeli, menjual dan mengolah tembakau di Iran.

Ketengangan semakin menguat akibat Shah sudah tidak berdaya di bawah kolonialisme. Serangkaian penaklukkan Eropa, pengaruh kultural, dan terlebih penetrasi ekonomi Eropa mempertentangkan

[35] Ira M. Lapidus, *Sejarah Sosial Ummat Islam bagian 3* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2000), 37-38.
[36] Poupak Tafreshi, "The Struggle for Freedom, Justice, and Equality : The History of The Journey of Iranian Women in The Last Century", (tesis, Washington University, st.Louis, 2010), 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

antara negara dan masyarakat. Dan inilah yang mengantarkan pada revolusi konstitusional tahun 1905. Konsep konstitusionalisme mulai diterima di kalangan yang lebih luas termasuk kalangan ulama, yang sebelumnya ulama' sangat menentang konsep konstitusionalis. Kalangan konstitusionalis terdiri dari intelegensia, Ulama, pedagang dan reformis modern (pemikir modern Islam dididakan barat) yang disatukan oleh didikan agitator pan-Islam. Para pemikir pan-Islam menyatakan gagasan tentang modernisasi Iran.[37]

Beberapa aksi protes yang dilakukan oleh masyarakat kepada Shah Qajar, mengantarkan dewan konstitusional pada pembentukan Majlis di Teheran tahun 1906. Pembentukan komite (majlis) ulama' bertujuan untuk mengevaluasi perundangan baru dengan syariah (hukum Islam). Kemudian orang-orang dipihak konstitusi berhasil menduduki pemerintahan tahun 1909-1911, sehingga terbentuklah kekuasaan baru di Iran. Tahun 1925, Reza Khan berhasil menjadi Shah Iran dan sebagai pendiri kerajaan konstitusional sekaligus sebagai pendiri Dinasti Pahlevi. Tahun 1935, nama Persia oleh Shah Reza di ganti dengan Iran.[38]

Tahap kedua dari wacana modernitas datang selama tahun 1920 hingga tahun 1940-an, yang ditandai sebagai era pembangunan bangsa. Negara nasionalis yang didirikan oleh Reza Shah Pahlavi (1925-1941) setelah pembubaran dinasti Qajar, tampaknya untuk memenuhi

[37] Lapidus, *Sejarah Sosial Ummat Islam,* 41.
[38] Tamara, *Revolusi Iran,* 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

permintaan negara yang kuat agar mampu mengatasi kelemahan ekonomi, teknologi dan militer Iran. Namun, kenyataannya banyak ketimpangan yang terjadi akibat pembangunan besar-besaran di masa Pahlevi. Fitur utama dari model pembangunan Reza Khan adalah pemerintah pusat, bangsa bersatu, satu bahasa dan agama, sekularisasi masyarakat dan kedaulatan nasional, kemajuan teknologi, serta pembangunan ekonomi.[39]

Begitu juga dengan pemerintahan Raja Dinasti Pahlevi yang kedua, yakni Shah Reza Pahlevi yang lahir pada tanggal 26 Oktober 1919 atau yang biasa disebut sebagai Reza Pahlevi naik ke tahta pada tanggal 17 Desember 1941 menggantikan ayahnya yang diasingkan. Reza Pahlevi memulai pemerintahannya sama dengan ayahnya bahkan ia melanjutkan kebijakan ayahnya dengan semakin otoriter. Iran mengakhiri era sistem monarki konstitusionalis dan menjelma menjadi monarki diktator.[40]

Setelah Reza Pahlevi berkuasa, pengaruh Barat semakin meningkat terutama setelah kedatangan Amerika ke wilayah ini pada tahun 1947. Dibawah kekuasaan Rezim Shah Pahlevi, pada kurun antara 1956-1978, terjadi perubahan-perubahan sosial-ekonomi. Perubahan yang mencolok dapat dilihat pada menipisnya spirit agrarian dan menebalnya ambisi kerja buruh. Banyak orang lebih suka berbondong-

[39] Parvin Paidar, *Women and The Political Process in Twentieth-Century Iran*, 82.
[40]Tamara, 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bondong melamar menjadi pekerja buruh suatu pabrik, daripada menjadi petani.[41]

Kebijakan-kebijakan yang di buat oleh Reza Pahlevi semakin membuat pertentangan dengan seluruh perdana mentri yang telah diangkatnya. Banyak kebijakan dari Reza Pahlevi ditentang oleh berbagai kalangan yang tergabung dalam Front Nasional di bawah pimpinan Mossadeq, yang kemudian menjadi Perdana Mentri pada tahun 1951. Pada tahun 1953 terjadi konflik politik antara Shah Iran dan Mossadeq yang mengakibatkan digesernya Mossadeq dari kedudukannya.

Mundurnya Mossadeq membuat Amerika masuk ke Iran menggantikan Inggris disegala bidang. Reza Pahlavi kembali memegang kekuasaan seorang diri dengan lindungan Amerika Serikat. Ia melakukan tindakan keras terhadap pendukung-pendukung Mossadeq. Setelah mundurnya Mossadeq, terjadi pembersihan pembangkangan dikalangan tentara sekitar 600 perwira ditangkap dan 41 orang ditembak mati. Polisi politik (SAVAK) dibentuk tahun 1957, dan hanya satu partai politik yang pro pemerintahan yang dibolehkan, dan para Ulama' ditekan habis habisan. Dan sejak saat itu penangkapan, penyiksaan, dan pembunuhan sewenang wenang menjadi bagian sehari-hari dari tindakan Reza Pahlevi dalam

[41]Sidik Jatmika & Vonny Nuansari, *Dinamika Partisipasi Politik Perempuan Iran* (Yogyakarta: LPPI, 2002), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempertahankan kekuasaan mutlaknya.[42] Dan inilah yang mengakibatkan terjadinya Revolusi Iran pada tahun 1979.

Jauh sebelum revolusi Iran 1979, Ayatullah Khomeini merupakan salah seorang Mullah yang karismati. Ia mulai menonjolkan dirinya ke publik, yang saat itu berada di pengasingan dan ia mengecam Shah yang dianggap sudah merusak Islam dengan segala reformasi kebijakannya. Pada tanggal 5 Juni 1963, Khomeini ditangkap. penangkapan Khomaini membuat rakyat melakukan protes demonstrasi besar-besaran di Teheran, Qom dan kota-kota lainnya. Khomeini dibebaskan pada April tahun 1964, namun kembali ditangkap pada bulan Oktober, hingga pindah tempat pengasingan di Najaf sampai 1978.[43]

Demonstrasi melawan rezim Pahlevi dimulai pada bulan Oktober 1977 yang kemudian berkembang menjadi kampanye perlawanan masyarakat terutama kaum ulama terhadap rezim Shah Pahlevi, karena ulama merasa bahwa ulama sudah tidak dihargai. Antara Agustus dan Desember 1978, pemogokan dan demonstrasi besar-besaran semakin melumpuhkan ekonomi dan politik Iran. Akhirnya, Mohammad Reza Pahlevi meninggalkan Iran dan menjalani pengasingan pada Januari 1979. Tanggal 1 Pebruari 1979, pemimpin kharismatik Iran, Ayatullah Khomeini, kembali ke Tehran dan secara resmi mendirikan negara

[42] Tamara, 46-51.
[43] Ziba Mir Hosseini & Richard Tapper, *Islam and Democracy in Iran* (London, New York: I.B. Tauris & Co Ltd, 2006), 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Republik Islam pada tanggal 1 April 1979 ketika sebagian besar bangsa Iran menyetujuinya melalui referendum Nasional.

3. Pengaruh wacana modernitas terhadap gerakan perempuan Iran

Setelah Imperialisme Barat datang ke Iran, perubahan demi perubahan dalam masyarakat Iran terus berlangsung hingga adanya tahap awal wacana modernitas yang terwujud dalam gerakan konstitusionalisme. Kaum perempuan pun ikut terlibat dalam gerakan tersebut. Pada saat perempuan Iran ikut andil dalam revolusi konstitusi, hal tersebut membawa perubahan besar dalam kontribusi perempuan terhadap politik massa, serta memberikan ruang bagi artikulasi ide-ide baru tentang perempuan dan penilaian kembali yang lama, menciptakan kesempatan bagi perempuan untuk mengalami partisipasi politik, dan memfasilitasi pembentukan gerakan wanita di Iran.

Perempuan bergabung dalam upaya untuk konstitusi. Mereka berbalik pertemuan dari pertemuan tradisional sosial dan keagamaan ke pertemuan-pertemuan politik. Perempuan belajar tentang peristiwa politik terbaru di masjid-masjid dan *rowzeh*, dan dibahas dalam kelompok rahasia mereka. Kegiatan politik perempuan dalam periode ini berkisar dari informasi yang beredar, menyebarkan berita, bertindak sebagai informan dan utusan, berpartisipasi dalam demonstrasi, dan mengangkat senjata protes.[44]

[44] Paidar, 53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wacana modernitas yang dibangun sebelum pemerintahan Pahlevi dan setelahnya telah memberikan pengaruh yang besar bagi perempuan. Mereka yang awalnya masih buta huruf mulai mengenal huruf, perempuan yang awalnya hanya belajar tentang wilayah domestik mulai berani unjuk rasa dan menuntut keadilan dan kesetaran dalam berbagai bidang. Perempuan yang awalnya hanya berada di bawah bayang-bayang laki-laki sudah berani keluar dari tekanan dan menunjukkan bahwa mereka layak untuk mendapatkan kesempatan yang sama dengan laki-laki. Utamanya dalam hal pendidikan, sosial budaya, dan politik.

Perubahan pada perempuan Iran mulai terjadi pada Pemerintahan Qajar (1794-1925), khususnya, pada akhir abad ke-19 dan akhir dari pemerintahan Nasser al-Din Shah. Gerakan perempuan Mengalami berbagai perubahan nyata dan mulai memainkan peran yang lebih besar dalam masyarakat dan menjadi lebih terlihat.[45] Banyak dari mereka yang ikut andil dalam berbagai demonstrasi dan turun ke jalan. Salah satu contohnya perempuan sudah pernah ikut dalam gerakan mendukung dihapusnya konsesi tembakau kepada Inggris tahun 1890. Dan terdapat demonstran-demonstran lain yang dilakukan oleh perempuan Iran sebelum revolusi konstitusi.

Sebelumnya perempun Iran mengalami begitu banyak aturan yang dibuat oleh pemerintah, sehingga mereka tidak bisa keluar dari aturan-

[45] Poupak Tafreshi, The Struggle for Freedom, 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

aturan tersebut. Perempuan yang terlahir dari keluarga kerjaan menjalani kehidupan dalam pengasingan di Istana Kerajaan. Perempuan dari strata ini hanya diizinkan untuk pergi keluar dengan alasan sosial.[46]

Melihat perempuan Eropa banyak yang sudah terampil pada waktu itu, sedangkan Perempuan Iran masih terkukung dalam kebodohan dan buta huruf, sehingga wajar jika perempuan-perempuan ini tetap gigih melancarkan serangkaian demonstran terhadap pemerintah agar mereka diberi hak yang sama dalam berbagai hal. Terutama penekanan terhadap pendidikan, meskipun pendidikan sudah ada yang berlangsung, tetapi penekanan paling penting dalam pendidikan perempuan bepusat pada menjalankan rumah tangga dan membesarkan anak-anak. Perempuan dilatih untuk mengatur dan mengelola serta menjalankan kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga.

B. Kondisi Perempuan Iran Di bawah Kebijakan Rezim Pahlevi

Pada saat Rezim Shah Pahlevi berkuasa, ia sangat membatasi dan melarang gerakan-gerakan dikalangan masyarakat, kritik hampir tidak diperbolehkan dan Shah Reza sangat alergi dengan segala aktivtas yang mengkritisi pemerintahannya. Represi yang terjadi saat pemerintahan Rezim Pahlevi, membuat gerakan perempuan Iran juga sangat terbatas. Perempuan semakin terlibat dalam semua aspek masyarakat, dan memperoleh lebih banyak otonomi dari pemerintah, meskipun semua itu

[46] Paidar, 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dijalankan melalui jalan yang sulit dan berliku-liku. Adapun beberapa kebijakan pemerintahan Pahlevi yang terkait dengan perempuan Iran dan kebijakan tersebut berbeda dari kebijakan sebelumnya diantaranya adalah sosial budaya, pendidikan dan undang-undang keluarga:

1. Sosial Budaya

   Sebelumnya masyarakat Iran termasuk perempuan Iran dalam pemerintahan Dinasti Qajar, dibagi ke dalam beberapa kategori sosial; kategori perempuan kelas atas, dan kelas bawah. Masing-masing kategori menjadikan kehidupan perempuan sesuai dengan aturan dan peraturan yang telah diatur dalam konteks kondisi sosial dan ekonomi yang ada sesuai dengan katagori tersebut.

   Aktifitas perempuan pada saat itu sangat dibatasi, misalnya salah satu aturan perempuan pada masa Qajar harus menggunakan jilbab bahkan kebanyakan perempuan menggunakan cadar. Fenomena pengaharusan memakai jilbab tidak hanya untuk perempuan Muslim, tetapi juga untuk perempuan non Muslim. Kondisi sosial perempuan pada masa ini benar-benar berada di bawah kendali aturan yang dibuat oleh pemerintah, bahkan untuk berjalan pun harus menggunakan jalanan trotoar yang terpisah dari laki-laki. Dengan demikian, kebanyakan perempuan Muslim enggan keluar rumah.[47]

   Pada saat pemerintahan Reza Khan terjadi ledakan westernisasi, tetapi westernisasi ini tidak diikuti oleh demokratisasi. Reza Shah

[47]Ibid,. 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkuasa dengan monarki absolut, sehingga meskipun modernisasi terjadi di Iran tetapi masyarakat tetap terkekang. Dalam hal ini yang paling merasakan tekanan dan ketidak bebasan adalah kaum perempuan. Wanita menjadi perhatian khusus bagi program pemerintaha Reza Khan dalam pembatasan kegiatan terutama dalam hal berbusana.

Pada tahun 1928, Majelis Permusyawaratan Nasional mengesahkan Undang-undang yang meminta pakaian seragam untuk dikenakan oleh orang-orang Iran. Berdasarkan Undang undang tersebut, kaum laki-laki di Iran harus menggunakan pakaian ala Eropa. Bahkan dikantor-kantor pemerintahan, pejabat harus menggunakan pakaian ala Barat jika ingin tetap menjabat.

Perempuan Iran juga mulai dikenalkan dengan pakain perempuan Eropa, sehingga pada tanggal 1 Februari 1936, Reza Khan membuat produk hukum yang melarang perempuan Iran menggunakan cadar.[48] Dengan demikian banyak perempuan Iran yang melepas kerudung dan mengganti cara busana mereka seperti orang Barat. Bahkan anak-anak yang pergi ke sekolah juga harus menggunakan seragam, tanpa memakai kerudung, seperti sekolah-sekolah Barat.

Hal ini bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya tentang perempuan Iran. Dalam hal berbusana, sebagian besar kaum perempuan menengah keatas, memberikan respon yang baik dan

[48] Suad Josep and Afsana Na Mabadi, *Ensyclopedia of Women and Islamic Cultures: Family, Law and Politics* (Leiden: Koninklijke Brill NV, 2005), 589.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendukung kebijakan rezim Shah Pahlevi yang berupaya membaratkan perempuan Iran dengan meniru pakaian orang Barat. Sedangkan perempuan menengah ke bawah dan perempuan-perempuan tradisional lebih memilih untuk tetap menggunakan kerudung, sehingga perempuan-perempuan ini lebih banyak menutup diri didalam rumah dengan perekonomian yang bergantung pada suami mereka.[49]

Larangan memakai cadar juga ditentang oleh kalangan kelas menengah ke bawah, dan perempuan-perempuan yang berpendidikan rendah. Pasalnya cadar bagi mereka merupakan simbol penjagaan diri dan kehormatan.Bagi generasi tua tidak memakai cadar dan berpakaian ala Eropa merupakan hal yang tidak wajar dan tidak masuk akal, karena mereka merasakan dampak buruk yang negatif dari undang-undang tersebut. Sedangkan pemerintah mengklaim bahwa hijab merupakan bentuk dari keterbelakangan dan kemunduran.[50]

Undang-undang adanya larangan memakai cadar menimbulkan efek psikologis yang tidak baik. Kaum perempuan sebagian besar merasa takut, ditekan, dan mendapat teror psikologis. Sejumlah besar kaum perempuan tidak mau keluar tanpa menggunakan jilbab, dan tetap berada di dalam rumah mereka sampai tahun 1941 dimana sejak saat itu aturan memakai dan tidak memakai jilbab sudah agak longgar.

---

[49] Mehri Honarbin, *Becoming Visible in Iran: Women in Contemporary Iranian Society* (London: Tauris Academyc Studies, 2008), 23.
[50] Ansia Khaz Ali, *Iranian Women After The Islamic Revolution* (Beirut, London: Conflict Forum,2010), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila ingin pergi keluar publik, seperti berbelanja dan membeli keperluan tertentu, maka mereka terpaksa menyuruh pesuruh untuk berbelanja dan memberi upah kepada pesuruh tersebut.

Para ulama juga sangat menentang pelepasan hijab yang terjadi pada perempuan Iran. Dan semua ulama yang menentang kebijakan Shah tentang larangan memakai cadar dan kerudung mendapat tekanan dan tindakan yang kejam dari Shah. Ia memberikan hukuman yang berat kepada ulama, mereka dihina didepan publik. Dan disuruh untuk melepas sorban, serta mencukur kepala dan jenggotnya.[51]

Sejalan dengan itu, perempuan diawasi dengan ketat oleh polisi yang berada di jalan-jalan Teheran. mereka akan menambil dan merobek jilbab dari kepala perempuan apabila diketahui perempuan menggunakan cadar dan jilbab. Setelah Reza Khan turun tahta pada tahun 1941, para ulama yang telah kehilangan banyak kekuasaan, ingin menegaskan kembali kontrol mereka atas masyarakat. Salah satu penegasan kembali adalah pemulihan perempuan menggunakan jilbab. Sehingga banyak perempuan di pusat-pusat perkotaan, termasuk Teheran, yang ingin memakai jilbab sudah bisa menggunakannya. Dan jilbab yang muncul kembali modelnya lebih ringan. Tetapi perempuan yang lepas hijab juga masih banyak.[52]

[51]Tafreshi, 36.
[52]Ibid,. 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pendidikan

Pada tanggal 30 Desember tahun 1906, ketika Mozzafar al-Din Shah (1896-1907) menandatangani konstitusi baru, perempuan menyuarakan dan meminta kepentingan mereka di berbagai surat kabar dan parlemen pemerintah untuk mendirikan pendidikan perempuan dan mendirikan sekolah anak perempuan. Karena perempuan tidak mendapat tempat dalam urusan politk dan pemerintahan, maka mereka mengambil inisiatif untuk menciptakan jaringan asosiasi yang berbeda.[53]

Sebenarnya Rezim Shah secara sederhana melakukan reformasi terhadap kedudukan perempuan. Sejak awal dekade 1920-an beberapa tokoh intelektual, laki-laki dan perempuan memperjuangkan untuk meningkatkan pendidikan.[54] Sebelum pemerintahan Pahlevi, perempuan memang sudah banyak yang masuk dalam dunia pendidikan. Namun, pendidikan tersebut masih belum menyeluruh dan meluas seperti yang terjadi pada Pemerintahan Pahlevi.

Pada tahun 1907, pertemuan pertama yang tergabung dalam suatu kelompok organisasi perempuan Iran mengadakan konferensi di Teheran. Mereka mengajukan 10 resolusi terkait diskriminasi terhadap perempuan dan menyerukan negara untuk memberikan pendidikan yang layak bagi anak perempuan.[55] Di Bushehr, sekolah anak

[53] Fabrian Sabahi, "Gender and The Army of Knowledge in Pahlavi Iran," dalam *Women, Religion and Culture in Iran*, ed. Sarah Ansari & Vanessa Martin (New York: Routledge, 2002),101.
[54] Guity Nashat, *Women and Revolution in Iran* (Boulder, CO: Westview Press, 1983), 69.
[55]Tafhresi, 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perempuan Muslim pertama dibuka pada tahun 1899. Sekolah ini, yang diberi nama Saadat (Kemakmuran), dan terus berfungsi sampai tahun 1960. Pada tahun 1906, gadis Muslim diperbolehkan untuk mendaftar di Sekolah misionaris Amerika di Orumiyeh. Di tahun yang sama, Yousof Khan, seorang mualaf dari Prancis yang masuk Islam, membuka sekolah *Ecole Franco Per san* untuk anak perempuan Muslim di Teheran. Hal ini diikuti oleh sekolah Perancis lain, seperti *Jandark* yang dibuka oleh dua orang bersaudara dari Perancis.[56]

Demikian juga, Sekolah di Bagh Ferdows dibuka, tidak jauh dari Tajrish Square Shemiran. Ini adalah sekolah negeri campuran pertama bagi anak laki-laki dan perempuan, yang didirikan oleh Mr Ali Asghar Hekmat. Sekolah campuran ini tidak bertahan lama, karena tekanan dari ulama yang menentang kerasa adanya sekolah campuran antara laki-laki dan perempuan. Kemudian di tahun 1960-an beberapa sekolah campuran dibuka lagi dan dilanjutkan sampai Revolusi Islam tahun 1979.[57]

Tahun 1940-an, pendidikan agama dan ilmu umum harus dipisahkan. Rata-rata yang masuk ke sekolah pada waktu itu adalah perempuan dari kalangan menengah ke atas. Mereka bahkan setelah lulus bisa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Para dokter dan perawat perempuan juga mulai bermunculan di Iran.

[56] Parvin, 70.
[57] Honarbin, 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Salah satu perempuan yang memperjuangkan hak untuk pendidikan wanita adalah Safiyah Yazdi. Ia bekerja tanpa lelah untuk mempromosikan hak perempuan dalam pendidikan. Safiyah merupakan istri dari ulama' terkemuka, Muhammad Husain Yazdi. Suaminya berbeda pemikiran dengan para ulama konservatif lainnya, Yazdi mendukung gagasan pendidikan perempuan dan mendorong istrinya untuk membuka sekolah. Sehingga Safiyah mendirikan *Iffatiyah Girls School* pada tahun 1910.[58]

Setelah banyaknya sekolah yang dibangun, maka terjadilah peningkatan jumlah pelajar wanita dua kali lipat. Kegiatan sosial utama pria dan wanita liberal disalurkan ke bidang pendidikan. Antusiasme perempuan tentang pendidikan sangat besar, sehingga mereka sering disediakan staf dan anggaran untuk kegiatan sekolah.[59] Sehingga peningkatan sekolah bagi anak-anak perempuan semakin meningkat.

Dari keterangan di atas, dapat dipastikan bahwa sudah banyak sekolah-sekolah perempuan yang berdiri, dan dengan adanya pendidikan tersebut, perempuan Iran semakin semangat dalam menuntut ilmu hingga akhirnya bisa terjun ke ruang publik sesuai dengan keinginan mereka. Meskipun pengekangan yang terjadi tetaplah ada, tetapi setidaknya perempuan sudah bisa merasakan dan mengenyam dunia pendidikan yang lebih luas lagi.

[58]Tafhresi, 19.
[59]Paidar, 71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun, sistem pendikan yang ditawarkan oleh pemerintahan Pahlevi lebih mengarah ke sekuler. yakni pendidikan diarahkan untuk pelatihan menjadi warga yang modern dan penyebaran nasioanalisme statis. Di sekolah-sekolah dan promosi nasionalisme Iran dengan menurunkan pengaruh budaya lokal. Pengadilan agama dan hakim didominasi oleh orang-orang sekuler. Dan tempat-tempat pengadilan tersebut yang sebelumnya dipengaruhi oleh ulama digantikan oleh orang-orang sekuler.

3. Undang-undang Hukum Keluarga

Sejak tahun 1928 Reza Khan sudah memperkenalkan modernism, kitab undang-undang, dan mengganti para ulama beserta hakim dengan tenaga-tenaga ahli yang professional dan terdidik. Sehingga peranan para ulama dalam hal politik semakin terdesak. Sedikit demi sedikit hukum Islam tergantikan oleh aturan negara yang sekuler. Sekalipun dalam hal pernikahan, perceraian, hak mengurus anak, peran, dan pengaruh ulama masih kental dan kuat. Ditambah lagi peraturan perundang-undangan yang diratifikasi 1928 masih banyak mengadopsi dari aturan-aturan syariah Islam.[60]

Mohammad Reza Pahlevi membuat kebijakan tentang perundang-undangan yang menyangkut kehidupan keluarga. Hukum tersebut dikenal dengan sebutan *Family Protection Acts* yang disahkan pada tahun 1967 dan direvisi pada tahun 1975. Undang-undang Landmark

[60] Imam Nawawi, "Peran Perempuan dalam Revolusi Iran", (skripsi,UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015), 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disebut UU Perlindungan Keluarga disahkan oleh Shah dan disetujui oleh DPR pada tahun 1967. UU Perlindungan Pengadilan Keluarga dikelola oleh pemerintah di mana hakim perempuan sudah bisa duduk dan memiliki yurisdiksi atas perkawinan dan hukum keluarga.[61] Hak untuk perceraian juga diserahkan kepada pengadilan, jadi tidak seenaknya sendiri suami bisa menceraikan istri. Dan dalam kondisi yang sama, baik pria maupun wanita yang ingin melakukan perceraian harus melalui pihak keadilan.

Perempuan diberikan kemampuan untuk menceraikan dengan alasan ketidakcocokan. Perempuan yang sudah berkeluarga, disaat sudah tidak cocok dengan pasangannya, mereka berani mengambil keputusan untuk menceraikan suaminya.[62] Karena perempuan pada masa ini sudah banyak yang bekerja dan dibilang bisa mandiri secara finansial, sehingga sudah bisa mencukupi kebutuhan keluarga dan tidak lagi bergantung pada pendapatan suami.

Perlindungan Hukum Keluarga 1967 dan 1975 tentang pernikahan juga membatasi anak-anak yang ingin menikah pada usia dini. Perempuan diperbolehkan menikah pada usia 18 tahun, sedangkan laki-laki pada usia 20 tahun. Dan hak asuh anak ditentukan berdasarkan kasus per kasus. Sebelum ratifikasi UU Perlindungan Keluarga 1975 tentang poligami, seorang pria bisa menikahi empat istri, tanpa melibatkan izin dari istri pertama untuk menikah lagi.

[61] Ziba Mir Hosseini, *Sharia and National Law in Iran*,327
[62] Louise Halper, "Law and Women's Agency in Post Revolutionary Iran", dalam *Harvard Journal of Law and Gender*, Vol.28, 95.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun, setelah adanya UU Perlindungan Keluarga 1975, seorang pria bisa menikahi istri kedua hanya dengan izin dari pengadilan dan setelah mendapatkan izin dari istri pertamanya.[63]

C. Gerakan Perempuan Iran Sebelum Revolusi

1. Terbentuknya organisasi Perempuan Iran

Sebelum terbentuknya organisasi-organisasi perempuan di Iran, mereka sudah banyak terlibat dalam berbagai gerakan akibat dari kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan harapan mereka. Diantaranya gerakan mendukung penghapusan konsesi tembakau terhadap Inggris pada tahun 1890. Banyak perempuan yang ikut dalam aksi memprotes kebijakan tersebut dan tidak sedikit dari mereka yang turun kejalan, dan banyak dari mereka yang terbunuh.[64]

Pada saat masyarakat memberontak dalam gerakan revolusi konstitusi, perempuan yang ikut andil dalam gerakan tersebut membuat beberapa kelompok rahasia, yang dari sanalah akar dari gerakan-gerakan perempuan Iran muncul. Selama gerakan konstitusional, perempuan telah banyak mendirikan gerakan, dan terlibat dalam dunia pers dan media masa. Dari tahun 1905 sampai 1915, sekitar 30 wartawan perempuan bergabung dengan agensi koran. Secara bertahap, surat kabar perempuan mulai terbit independen sehingga memainkan peran penting dalam diversifikasi opini publik.[65]

---

[63]Tafhresi, 58.
[64] Tamara, *Revolusi Iran*, 38.
[65] Ali Akbar Mahdi, "The Iranian Women's Movement : A Century Long Struggle" dalam *JurnalThe Muslim World*, Vol.94, 2004, 429.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada saat revolusi konstitusi, banyak perempuan yang membuat gerakan *anjuman,*[66] diantaranya: *The Anjuman for the Freedom of Women*; gerakan kebebasan untuk Perempuan yang pertama kali dibentuk pada awal 1907. Selain itu, *The secret Union Women* (Uni rahasia perempuan) pada 1907, *Anjuman of Ladies of Iran* (Anjuman perempuan Iran) tahun 1910, dan lain-lain. Berbagai *anjuman* memiliki tugas yang berbeda-beda. Salah satu tugas dari *anjuman of Ladies of Iran* adalah menaikkan dana untuk sekolah, rumah sakit, dan panti asuhan. Berbagai *anjuman* yang aktif tidak hanya di Teheran tapi juga di kota-kota lain seperti Qazvin, Azerbaijan, Isfahan dan banyak lagi.[67]

Awal abad ke-20, serangkaian artikel yang diterbitkan oleh organisasi perempuan mulai bermunculan. Dimulai dengan pembuatan majalah yang bernama *Danesh* (Pengetahuan) pada tahun 1910, dan koran pertama yang bernama *Shokufeh* di tahun 1913. Kemudian publikasi lain seperti *Women's Letter, Women's World,* dan lain-lain bermunculan, namun hanya berlangsung beberapa bulan. *Shokufeh* hanya berlangsung enam tahun hingga kematian Mozayan ol-Sultaneh pada 1919, ia adalah editor pendiri surat kabar *Shokufeh*. Penerbitan-penerbitan tersebut membahas artikel tentang isu-isu perempuan

[66] Masyarakat yang tergabung dalam gerakan rahasia perempuan Iran yang mendukung revolusi kostitusi dan sebuah bulletin malam hari, yang melancarkan kritik dan mendorong gerakan anti pemerintah.
[67] Tafreshi, 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berupa sastra, pendidikan, pernikahan anak, rumah tangga, dan moral perempuan.[68]

Jamiat-e Nesvaan-e Vatankhaah-e Iran (liga Patriotik Wanita) dibentuk pada tahun 1922 oleh sekelompok wanita sosialis yang aktif dalam Revolusi Konstitusional. Liga ini dibentuk oleh Muntaram Sakandari, istri dari Sulaiman Sakandari pemimpin Partai Sosialis, yang bertujuan untuk menghormati hukum dan ritual Islam, mempromosikan pendidikan dan moral yang membesarkan anak perempuan, serta memberikan perawatan untuk anak yatim piatu, khususnya perempuan. Kemudian organsasi ini ditutup pada tahun 1932.[69] Selain organisasi Liga Patriotik Perempuan, ada beberapa organisasi lain yang berdiri, seperti Asosiasi Kebebasan Perempuan, Rahasia Liga Perempuan, Komite Perempuan, Organisasi Perempuan Isfahan, Majelis Revolusi Perempuan dan lain-lain.

Pada tahun 1935, Reza Khan membubarkan semua organisasi wanita, dan ia mendirikan satu majlis untuk perempuan yang bernama *Kanoon-e Banavan* (Pusat Wanita). Organisasi ini diketuai oleh anak perempuannya yaitu Sharos. *Kanoon-e Banavan* adalah salah satu organisasi pertama yang mempunyai hubungan dekat dengan Pemerintah, karena Organisasi ini berada dibawah nanungan Reza

[68] Honarbin, 39.
[69] Ali Akbar Mahdi, “The Iranian Women’s Movement: A Century Long Strunggle”, 431.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pahlevi. Perempuan tidak diperbolehkan mendirikan organisasi lain selain yang telah didirikan oleh Reza Khan.[70]

Setelah Reza Khan turun tahta, dan diganti oleh anaknya Reza Pahlevi, *Kanoon-e Banavan* masih aktif dalam kegiatannya, dan menekankan kembali berdirinya hak-hak perempuan. Organisasi ini menerbitkan buletin *Zaban Zanan* (Suara Perempuan), untuk mengekspresikan pandangan mereka, namun pada tahun 1942 anggotanya tinggal 60 orang. Sehingga *Kanoon-e Banavan* dibubarkan dan digantikan oleh dua organisasi baru, yakni Partai Perempuan yang didirikan oleh dan *Jamiet Zanan* (Liga Perempuan). Tujuan dari organisasi ini adalah untuk memperbaiki kondisi hukum perempuan, dan menerbitkan koran sendiri dengan nama *Zan Emrus*. Antara tahun 1944-1945, mereka banyak mencetak artikel berita atas nama hak-hak hukum perempuan.

Organisasi perempuan sedikit lebih mandiri antara tahun 1941-1952. Ada sekitar 20 organisasi perempuan yang aktif tersebar di seluruh Iran. Di antaranya adalah Dewan Perempuan Iran, Organisasi Perempuan Yahudi, Organisasi Perempuan Armenia, Asosiasi Perempuan Dokter, dan Persatuan Guru. Semua organisasi ini sama-sama menuntut diberikannya kaum perempuan hak pilih karena kaum perempuan masih belum mempunyai hak pilih.[71]

[70] Tafhresi, 40.
[71] Ibid,. 46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Reza Pahlevi mengontrol negara melalui semua organisasi perempuan. Pada tahun 1959 Shah membentuk Dewan Tinggi dari Asosiasi Perempuan Iran, yang menggabungkan 17 kelompok perempuan lainnya. Ashraf Pahlevi diangkat menjadi presiden kehormatan organisasi. Pada tahun 1966 organisasi ini berganti nama menjadi *Sazeman-e Zanan-e Iran* (WOI). Sampai revolusi tahun 1979 WOI adalah kelompok perempuan satu-satunya yang berkampanye untuk reformasi hukum.[72]

2. Masuknya Perempuan dalam dunia politik

Reza Shah menjadi kekuatan politik yang paling dominan dalam pemerintahannya, sehingga partisipasi perempuan dalam politik juga terhambat. Shah mengadakan pengawasan yang sangat ketat bagi parlemen dan mayoritas pemilihan anggota parlemen adalah pendukung Shah. Selain ideologi sosial di masyarakat, perubahan politik dalam negri Iran dan keberadaan seorang pemimpin atau penguasa juga menjadi penentu.[73]

Setelah beberapa kelompok organisasi perempuan dibubarkan, kaum perempuan tidak lagi memiliki sebuah forum untuk ikut serta dalam berbagai aktivitas politik. Akibatnya banyak kaum perempuan yang bergabung dengan Mujahidin dalam menentang Shah. Dalam gerakan ini, banyak perempuan yang berhasil dalam aktivitas politiknya, seperti Fatimah Amini. Dia menjadi aktivis politik

[72] Mahdi, 433.
[73] Jatmika, 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perempuan yang paling gigih berani, dan akhirnya dia ditangkap oleh SAVAK, kemudian disiksa, dicambuk, hingga dia sekarat dan meninggal.

Tetapi wanita yang berani melawan Shah dan aktif dalam gerakan-gerakan perempuan bukan hanya Fatimah. Dalam konfrontasi dengan SAVAK, seorang aktivis perempuan terbunuh dan beberapa diantaranya di hukum oleh polisi rahasia Shah. SAVAK bertindak dengan sangat kejam, tetapi lebih kejam terhadap perempuan, dengan menerapkan sejumlah peraturan yang ketat dan larangan bagi kaum perempuan yang dikeluarkan oleh Shah. Ia menganggap perempuan hanyalah makhluk yang akan menjadi penghambat kemajuan modernisasi yang direncanakan oleh negaranya.[74]

Banyak perempuan Iran pada tahun 1940-an yang ikut berpartisipasi dan tergabung dalam partai Tudeh, dimana partai tersebut terus menggencarkan aksi dan pandangannya tentang perlunya mempromosikan hak-hak dan kesejahteraan rakyat. Partai ini juga banyak dimasuki oleh mahasiswi kedokteran Iran.[75] tidak hanya bergabung dalam partai Tudeh, namun juga bergabung dalam partai-partai lain seperti partai demokrat. Namun, karena pemerintah melarang perempuan masuk dalam partai, maka mereka bergerak di bawah tanah.

[74] Ibid,. 53-54.
[75] Mehri Honarbin,34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada saat Dr. mossadeq, seorang tokoh nasionalis yang diangkat menjadi perdana menti tanggal 28 April 1951, ia merupakan simbol bagi penentang rezim Shah. Walau pemerintahannya sangat singkat, tetapi perempuan Iran cukup punya kesempatan emas untuk aktif dalam perpolitikan Iran. Perempuan banyak mendapat keuntungan dalam peraturan yang dibuatnya. Hingga pada tahun 1952, perempuan mendapat kemenangan mutlak hak suara dalam MUNICIPAL COUNCIL. Sebuah kode jaminan sosial diratifikasi pada tahun 1953, yang memberikan persamaan hak bagi laki-laki dan perempuan juga persamaan dalam pemberian upah bagi perempuan sekalipun telah menikah.

Pada tahun 1962, di bawah perdana menteri dari Assadollah Alam, sebuah dekrit dikeluarkan yang memberikan hak bagi perempuan untuk memilih dan berjalan dalam pemilihan provinsi dan kota. pada 27 Februari 1963 perempuan sekali lagi diberi hak untuk memilih dan menjalankan urusan kantor pemerintahan. Pada tanggal 17 September 1963, pemilu berlangsung dan enam perempuan terpilih ke dalam Majlis sebagai deputi. Majlis yang terdiri dari 160 anggota, terdapat dua wakil perempuan yang ditunjuk Shah. Pada tahun 1965, seorang perempuan ditunjuk sebagai menteri untuk pertama kalinya. Upaya khusus yang dibuat oleh pemerintah untuk menunjukkan bahwa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perempuan tidak hanya bisa memilih, tetapi mereka juga bisa menjadi pejabat terpilih.[76]

3. Perempuan mendukung Revolusi Iran

Peristiwa awal 1960-an menandai dimulainya gerakan Revolusi. Oposisi yang menyerang Shah datang dari berbagai pihak. Kalangan oposisi agama, seperti Ayatullah Mahmud Taleqani, Morteza Muthahhari dan Allameh Thabathaba'i memberikan kontribusi besar terhadap penciptaan wacana Islam yang baru. Mereka bersama dengan tokoh-tokoh politik dan ideolog seperti Mehdi Bazargan dan Ali Shariati merupakan tokoh yang paling berpengaruh dan populer dari revolusi.[77]

Revolusi Islam pada tahun 1979, didukung oleh berbagai kalangan dan masyarakat. Banyak ulama menganggap bahwa program-program modernisasi dan sekularisasi Rezim Pahlevi banyak merusak tatanan Islam.[78] Di Akhir pemerintahan Pahlevi banyak terjadi kerusuhan, mereka umumnya menuntut hak-hak perempuan bisa kembali seperti semula, dan laki-laki kembali memiliki hak sepihak dalam perceraian dan poligami. Banyak golongan dan aktivis perempuan yang awalnya mendukung kebijakan Pahlevi berbalik arah untuk menyerangnya. Dan mereka mendukung kembalinya Ayatullah Khomeini dari pengasingan.

---

[76] Tafhresi, 45.
[77] Ziba Mir Hosseini, *Democracy in Iran*, 14.
[78] Hammed Shahidian, *Women in Iran: Gender Politics in The Islamic Republic* (Westport, London: Greenwood Press, 2002),23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketika tanda-tanda revolusi mulai muncul, perempuan juga menunjukkan tanda-tanda kembali ke jati diri sendiri dan identitas yang disembunyikan selama periode Pahlevi dan kontrol Amerika atas Iran bangkit kembali. Fenomena perempuan yang mengenakan jilbab di ruang publik menyebar dan sebagai contoh perlawanan yang bersinar.[79]

Ketika revolusi terjadi kaum perempuan selama revolusi memilih untuk memakai berbagai jilbab, walaupun ada ada juga beberapa yang tidak menggunakan jilbab. Pentingnya memakai jilbab bukan menjadi suatu hal yang religius, akan tetapi penggunaan jilbab menandakan sebagai simbol dalam menentang Shah.[80]

Para ulama yang tergabung dalam gerakan revolusi menyadarkan kaum perempuan, bahwa modernisasi yang dibangun oleh Rezim Pahlevi telah meruntuhkan nilai-nilai tradisional. Dengan demikian mereka juga menggunakan tema agama, bahwasanya nilai-nilai tradisional harus dipegang dengan kuat, dan jangan sampai nilai-nilai tradisional diganti dengan tradisi Barat. Apalagi, didalam Islam perempuan diajurkan untuk menutup aurat, namun Rezim Pahlevi mengubah tatanan tersebut dengan melarang penggunaan cadar. Maka dari itulah, perempuan memutuskan untuk ikut dalam penentangan melawan Rezim Pahlevi.

---

[79] Ansia Khaz Ali, *Iranian Women After The Islamic Revolution*, 4.
[80] Caroline M. Brooks, "Moment of Strenght: Iranian Women's Rights and The 1979 Revolution", (Tesis, Colby College, Lux Mentis Scientia, 2008), 66.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berbagai kalangan perempuan baik dari kalangan menengah ke atas, maupun menengah ke bawah, ikut andil dalam proses demonstrasi anti Shah dengan turun ke jalan-jalan kota. Bahkan ada pula beberapa perempuan yang terlibat konfrontasi bersenjata dengan polisi dan pasukan militer.[81] Ada pula yang ditembak oleh polisi SAVAK. Perempuan pertama yang ditembak mati langsung adalah Manije Asraf Zade Kermani.[82] Di manapun perempuan berada, dan berasal dari kelompok manapun, mereka bersama-sama mendukung dan satu visi dalam menggulingkan Rezim Pahlevi.

[81] Ali Akbar Mahdi, 433.
[82] Tamara, 58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

KEBIJAKAN PEMERINTAH IRAN TERHADAP PEREMPUAN PASCA REVOLUSI

A. Kebijakan dan Pengaruh Ayatullah Khomeini

Pada tahun 1979, dunia terguncang oleh sebuah revolusi yang digerakkan oleh seorang ulama. Dialah disebut Ayatullah al-'Uzma Ruhullah al-Musawi al-Khomeini, atau yang lebih dekenal sebagai Imam Khomeini. Ia merupakan tokoh sentral dalam Revolusi Islam Iran pada 1979, yang mengubah secara fundamental tatanan politik, ekonomi, dan budaya di Iran, dan juga di tingkat regional dan internasional. Dia merupakan seorang sufi, teolog, *faqih*, filsuf, dan politik yang sangat disegani di Iran.[83]

Imam Khomeini lahir di Khomein pada tanggal 24 Oktober 1902.[84] Khomeini merupakan seorang ulama yang sangat berani menentang kebijakan Rezim Pahlevi. Akibat dari berbagai penentangan yang dilakukannya membuat ia ditangkap, bahkan beberapa kali diasingkan ke luar negri, diantaranya Turki, Irak, dan Paris. Selama dalam pengasingan, ia terus mengirimkan tulisan-tulisan dan kaset-kaset yang berisi pidatonya melalui orang-orang Iran yang pergi ke tempat pengasingannya untuk diberikan kepada para pengikutnya di kota suci Qom. Tulisan-tulisan dan pidato-pidatonya sangat dihormati, dan dipatuhi. Bahkan kaset-kasetnya

[83] Muhammad Syafi'i Antonio, *Ensiklopedia Perdaban Islam Persia* (Jakarta: Tazkia Publishing, 2012), 106.
[84] Imam Khomeini, *Sistem Pemerintahan Islam* (Jakarta: Pustaka Zahra, 2002), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak hanya dikirim ke Iran, tetapi juga ke Libya, Lebanon, dan beberapa negara Arab lainnya.

Khomeini kembali ke Iran pada tanggal 01 Februari 1979. Ia kembali setelah Shah Reza dan keluarganya keluar dari Iran dan mengasingkan diri ke Amerika. Kedatangan Khomeini disambut dengan baik oleh rakyat Iran.[85] Khomeini sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat Iran. Ia mampu menggerakkan massa yang terbilang sangat banyak, untuk menumbangkan Pahlevi. Bahkan kebijakan-kebijakan yang dibuatnya bisa menundukkan masyarakat Iran dibawah pemerintahannya.

Khomaeni bersikeras akan menegakkan hukum Islam diatas segalanya dan menjadikan negara Iran sebagai Republik Islam yang berdasar pada al-Qur'an dan Hadist. Dia akan membersihkan seluruh unsur-unsur Barat dan mengembalikan masyarakat Iran kepada nilai-nilai Islam. Sehingga Khomeini memutuskan untuk tidak berhubungan dengan dunia Barat dan Iran tidak bisa melakukan kerjasama dengan Barat.

Maka setelah kekuasaan rezim Pahlevi berakhir, Iran memasuki era baru dibawah kepemimpinan para ulama. Melalui referendum pada akhir bulan Maret 1979, mayoritas rakyat Iran (98,7%) menyetujui gagasan Republik Islam Iran (*Jumhuri ye Islame ye Iran*) di bawah pemimpin Dewan Revolusi Iran yang diproklamasikan oleh Imam Khomeini pada tanggal 1 April 1979.[86] Setelah kubu Khomaeni menang dalam perdebatan

---

[85] Ervand Abrahamiand, *A History of Modern Iran* (Cambridge: Cambridge University Press, 2008), 161.

[86] Abd Kadir, "Syiah dan Politik: Studi Republik Islam Iran," *dalam Jurnal Politik Preofetik*, Volume 5, No.1, 2015, 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan kubu lain yang tidak setuju dengan pembentukan Republik Islam Iran, maka pendapat dari kubu Khomaeni diwujudkan melalui Undang-undang Dasar yang disahkan lewat referendum pada bulan Desember 1979.

Setelah diterimanya konstitusi Iran melalui referendum tanggal 2 dan 3 Desember 1979, Iran melangkah ke arah normalisasi kehidupan politik. Konstitusi yang terdiri dari beberapa artikel dibuat berdasarkan hukum Islam yang ditafsirkan oleh sebuah Dewan Ahli dan telah disetujui oleh Imam Khomeini. Ada lima lembaga penting di dalamnya: *Faqih*, Presiden, Perdana Mentri, Parlemen, dan Dewan Pelindung Konstitusi. Khomeini juga melancarkan berbagai kebijakan yang sangat berbeda dengan kebijakan masa Pahlevi, dimana Khomaeni mewujudkannya dalam konsep *Wilayat al-Faqih* sebagai bentuk pemerintahan Iran yang menjadi cita-citanya selama ini.[87]

Semua undang-undang dan produk hukum lainnya harus sesuai dengan asas-asas Islam. Kekuasaan terbesar dipegang oleh *Faqih* (pada saat itu masih dijabat oleh Khomeini), yang dipilih oleh Dewan Ahli dengan syarat-syarat tertentu. Pemimpin tertinggi *(Vali-Yi Faqih)* mampu memberikan amnesti dan menurunkan presiden dan para kandidat presiden. Ia merupakan Pemimpin tertinggi dari angkatan bersenjata, ia berkuasa mendeklarasikan keadaan perang atau damai, memobilisasi

[87] Ajat Sudrajat, "Imam al-Khumaini dan Negara Republik Islam Iran," *dalam Jurnal Cakrawala Pendidikan*, Nomor 1, Tahun XV, 1996, 42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

angkatan bersenjata, menunjuk pimpinan angkatan bersenjata dan mengadakan pertemuan dengan dewan keamanan nasional.[88]

Pemegang kekuasaan terbesar kedua adalah presiden yang dipilih setiap empat tahun. Tugas-tugas pokoknya antara lain menjalankan konstitusi negara, menjadi kepala pemerintahan, serta mengkordinasikan ketiga lembaga negara: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Presiden merupakan pejabat tertinggi pemerintah Iran dalam hubungan dengan dunia internasional. Ia menandatangani seluruh perjanjian dan berhak mengangkat perdana mentri setelah parlemen memberikan persetujuannya. Presiden dapat meminta kabinet untuk bersidang kapan saja, langsung dibawah pimpinannya.[89]

Setelah Revolusi tahun 1979, ada perubahan yang cukup mendasar terkait dengan status perempuan Iran. Undang-undang yang berlaku seolah membatasi peran perempuan dalam dunia publik. Hukum-hukum yang berlaku juga membawa perubahan yang berbeda.[90] Adanya keputusan yang jelas mengenai kewajiban memakai jilbab Islam bagi perempuan ketika keluar rumah, dan menyembunyikan semua bagian tubuh kecuali wajah dan telapak tangan.[91]

Kewajiban memakai jilbab juga berlaku bagi masyarakat perempuan non-Muslim dan para tamu negara. Republik Islam Iran

---

[88] Budi Pramono, "Perubahan Politik Oleh Faktor Agama", *dalam Jurnal Kajian Politik dan Masalah Pembangungan*, vol.13, No.1, 1983, 8.
[89] Imam Khomeini, *Sistem Pemerintahan Islam* (Jakarta: Pustaka Zahra, 2002), 12
[90] Poupak Tafreshi, "The Struggle for Freedom, Justice, and Equality : The History of The Journey of Iranian Women in The Last Century",929,58.
[91] Ansia Khaz Ali, *Iranian Women After The Islamic Revolution* (Beirut, London: Conflict Forum,2010), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mewajibkan kaum perempuan berbusana sesuai ajaran Islam versi mereka. Ancamannya ada yang menyebutkan dengan penjara maksimum satu tahun yang diundangkan pada 16 April 1983.[92] Ada pula yang menyebutkan dengan ditetapkan 74 cambukan bagi yang melanggar pemakaian jilbab.[93] Selain itu, warna pakaian dianjurkan berwarna gelap.

Walaupun jilbab diwajibkan, tapi menurut Khomeini cadar lebih baik dan dipercaya lebih pantas. Menurutnya cadar adalah simbol revolusi. Karena Khomeini juga selalu menegur putri-putrinya jika tangan putri-putrinya terlihat lebih dari yang diperbolehkan. Khomeini senantiasa mengingatkan anak-anak perempuannya, walaupun memperlihatkan wajah dan telapak tangan itu boleh, tapi lebih baik bagi mereka untuk menutupnya.[94]

Kemudian disamping itu, komite-komite revolusi juga sering memeriksa dan menghukum perempuan yang menggenakan make-up secara berlebihan atau tidak berpakain sopan (secara Islami). Mereka juga akan ditolak untuk masuk ke kantor-kantor. Khomeini juga menekankan bahwa perempuan yang bepergian tidak boleh mengenakan berbagai jenis parfum.

Perempuan menjadi terbatas dalam hal berinteraksi dengan lawan jenis, mereka hanya diperbolehkan berinteraksi dengan laki-laki yang

---

[92] Muhammad Hasyim Assagaf, *Lintasan Sejarah Iran dari Achaemenia ke Republik Revolusi Islam* (Jakarta: The Culture Section of Embassy of The Islamic Republic of Iran, 2009), 648.
[93] Reza Arjmand, *Public Urban Space, Gender and Segregation : Women Only Urban Parks in Iran* (New York: Routledge, 2017), 26.
[94] Hamid Alghar, *Rays of The Sun: 83 Stories from The Life of The Imam Khomeini and Tranquil Heart 43 Recollection of Imam Khomeini Relating to Prayers*, terj. Leionovar bahseyn (Bandung: Pustaka IIMAN, 2006), 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempunyai hubungan darah seperti saudara laki-laki, ayah atau suami mereka. Perempuan diawasi dengan ketat, ketika mereka pergi keluar rumah dengan seorang laki-laki, maka mereka harus membawa bukti kalau laki-laki yang bersamanya merupakan saudara laki-laki atau masih mempunyai hubungan darah dengan mereka. Jika tertangkap para penjaga revolusioner dan bukti tersebut tidak sesuai maka mereka akan diberi hukuman yang berkisar pada denda untuk dakwaan pengadilan.[95]

Khomeini juga membuat kebijakan tentang pemisahan antara laki-laki dan perempuan. Anak-anak di sekolah dipisahkan berdasarkan jenis kelamin, dan tidak diizinkan untuk berinteraksi dengan lawan jenis. Pemerintah juga memberlakukan pemisahan jenis kelamin di dalam transportasi umum di mana perempuan dipaksa untuk duduk di belakang bus. Bagian depan disediakan untuk laki-laki, sedangkan perempuan dibelakang laki-laki. Namun, pemisahan tersebut tidak bisa mencakup setiap aspek kehidupan perempuan, sehingga ketika perempuan dan laki-laki yang tidak mematuhi aturan tersebut, maka mereka bisa naik taksi yang sama.[96]

Perempuan yang hidup di bawah rezim Khomeini dilarang untuk mengejar lebih tinggi pendidikan khususnya selama awal rezim baru. Perempuan awalnya dilarang dari 69 bidang studi yang berbeda, dan dilarang mengejar karir apapun yang tidak dianggap cocok bagi seorang

[95] Andrea De La Camara, "Women's Rights in Iran: During The Years of The Shah, Ayatullah Khomeini, and Khamenei", (Tesis, Orlando Florida: Major Program in International and Global Studies in the College of Sciences, 2012),22.
[96] Ibid,. 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perempuan untuk berpartisipasi dalam, seperti daerah di bidang pertanian, hukum, dan masyarakat hiburan. Sehingga pengambilan jurusan untuk masuk ke Universitas juga dibatasi.

Dibentuk Dewan Penyeru Kebajikan dan Pencegah Dosa untuk memantau kerusakan moral yang terjadi dalam masyarakat. Dibentuk pengadilan kemaksiatan dengan hukuman-hukuman berat bahkan hukuman mati. Dibentuk perhimpunan Islam di sekolah dengan pemisahan laki-laki dan perempuan. Serta memantau perilaku guru dan murid yang tidak taat aturan. Revolusi kebudayaan ini dimaksudkan oleh Khomeini guna melenyapkan sisa peradaban Barat dan menempatkan para ulama di bidang pendidikan.[97]

Selama paruh pertama tahun 1980-an, Republik Islam (IRI) melarang perempuan bertindak sebagai hakim dan pengacara. UU perlindungan keluarga Shah tahun 1967 dan 1973 dicabut, yang telah membatasi poligami. Serta mengangkat usia pernikahan anak perempuan kembali menjadi 9 tahun, dan memungkinkan hak perempuan untuk bercerai. Padahal sebelumnya perempuan Iran sudah bisa menggugat cerai suami mereka apabila sudah tidak cocok. Serta pelarangan kontarsepsi adanya keluarga berencana.[98]

Sementara itu, perempuan diperbolehkan terjun dalam peran publik. Mereka tidak secara resmi dilarang dari ruang publik dan memberi

---

[97] Sidik Jatmika & Vonny Nuansari, *Dinamika Partisipasi Politik Perempuan Iran* (Yogyakarta: LPPI, 2002), 62.

[98] Valintine M. Moghadam, *Women in The Islamic Republic of Iran : Legal Status, Social Politions, and Collective Action,* (Woodrow Wilson International Center for Scholars on November 16-17, 2004), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perempuan pekerjaan sebagai pegawai negeri. Namun, realitas yang terjadi banyak perempuan Iran yang hampir 24.000 perempuan telah kehilangan pekerjaan mereka karena perempuan diperbolehkan bekerja asalkan itu sesuai dengan pekerjaan yang seharusnya di lakukan oleh perempuan.[99] Oleh karena itu, banyak terjadi pemecatan terhadap karyawan perempuan setelah revolusi.

Namun, pandangan Ayatollah Khomeini pada perempuan yang ingin duduk di parlemen, ia mengatakan "Dapatkah Anda mencapai kemajuan dengan mengirimkan beberapa perempuan untuk parlemen? Kami mengatakan bahwa mengirim perempuan untuk tempat-tempat ini akan mengakibatkan apa-apa kecuali korupsi". Sehingga pada masa ini tidak ada perempuan yang terjun dalam dunia politik apalagi masuk dalam jajaran parlemen. Dan hanya ada satu wakil perempuan di Dewan Ahli yang menyusun konstitusi baru Iran.

Salah satu perempuan yang berhasil di wawancarai oleh Nasir Tamara setelah kembalinya Khomaeni ke Iran, dijelaskan, bahwa berkat Khomaeni perempuan tersebut bisa mengutarakan pendapatnya terhadap seluruh persoalan, baik politik, sosial, ekonomi yang menyangkut Iran. Karena di zaman Shah tak ada kesempatan semacam itu. Siapa yang berani mengemukakan hal-hal yang tak sama dengan pendapat rezim langsung di tangkap Savak tanpa pengadilan dan bisa saja langsung dibunuh.[100]

---

[99] Camara, 26.
[100] Nasir Tamara, *Revolusi Iran* (Jakarta: Sinar Harapan, 1980), 228.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nasir Tamara juga mewawancarai seorang perempuan bernama Simin Daneshvar, yang merupakan pengarang dan guru besar kesenian Universitas Teheran. Menurutnya kaum perempuan telah berjuang mati-matian selama revolusi dan kini mereka harus berjuang terus mencegah usaha-usaha membatasi peranan mereka. “Kita harus bertempur untuk mendapatkan hak-hak kita dan bila orang-orang (Islam) fanatik mencoba membatasi hak-hak perempuan, maka kaum perempuan Iran akan bertahan menghadapinya. Apalagi di Iran terdapat banyak perempuan terdidik. Di setiap revolusi selalu ada orang-orang oportunis yang coba cari keuntungan bagi mereka sendiri”.

Dalam hal ini, terdapat perbedaan pendapat antara Daneshvar dengan Monireh Gorji, yakni satu-satunya perempuan yang terpilih sebagai anggota Dewan Ahli yang menyusun konstitusi baru Iran. Ia lebih mendukung keputusan-keputusan yang dibuat oleh Khoemini, Gorji mengenal baik hukum-hukum Islam, ia mengingini juga persamaan hak-hak perempuan di Iran. Tetapi hal itu harus berjalan dalam garis-garis Islam. Gorji ingin agar perempuan berjuang tetapi tanpa melupakan keluarga mereka. “karena perempuan memainkan peranan yang penting sekali di Masyarakat, sebab nasib generasi yang akan datang tergantung di tangan mereka. Maka perempuan harus menganggap peranan mereka lebih penting di keluarga daripada di masyarakat. Hanya perempuan yang dapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengatur keluarga mereka yang dapat berperanan penting di masyarakat."[101]

Hal tersebut senada dengan pendapat Khomeini bahwa peran seorang ibu sangat menentukan dan sangat penting bagi anak yang sedang berkembang. Pernah suatu hari saat sedang bergurau salah satu putrinya mengatakan bahwa perempuan harus selalu diam dirumah, maka Khomeini berkata "jangan meremehkan pekerjaan rumah, membesarkan anak bukan persoalan kecil. Jika seseorang bisa membesarkan anak dengan baik, ia telah mempersembahkan pengabdian yang teramat besar bagi masyarakat."[102]

Diceritakan pula dari kisah anak-anak Khomeini tentang kehidupan pribadinya di dalam rumah yang begitu sangat menghormati istri beserta anak-anaknya. Jika ada anaknya memasuki ruangan, Khomeini selalu menawarkan tempat yang lebih baik dibandingkan tempatnya. Bahkan ia tidak akan makan sebelum istrinya. Dan sikap tersebut tidak hanya terhadap istrinya, tetapi juga terhadap putra putrinya. Secara keseluruhan, Khomeini tak menganggap menyapu, mencuci piring, dan mencuci pakaian sebagai tanggung jawab sang istri. Jika istrinya mengerjakan pekerjaan itu ia akan merasa tidak adil bagi istrinya.[103]

Khomeini juga memikirkan nasib kaum perempuan tuna susila. Pada 21 Maret Khomeini memerintahkan Kementrian Perburuhan

---

[101] Ibid,. 414.
[102] Hamid Alghar, *Rays of The Sun: 83 Stories from The Life of The Imam Khomeini and Tranquil Heart 43 Recollection of Imam Khomeini Relating to Prayers, terj. Leionovar bahseyn* (Bandung: Pustaka IIMAN, 2006), 23.
[103] Ibid,. H.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mencarikan pekerjaan baru bagi perempuan tuna susila itu. Perintah tersebut bertalian dengan kebijaksanaan Khomeini menghapuskan pelacuran sebagai bagian gelombang pembaharuan Islam di Iran. Ia mengatakan perempuan yang tersesat di masa lalu perlu dibimbing ke lingkungan yang lebih baik sehingga dengan perubahan total dalam masyarakat Iran, semua keburukan sosial hilang.

Sebagai seorang ulama Islam, Khomeini dianggap oleh pengikutnya bukan seorang diktator. Karena setiap keputusan yang dikeluarkannya senantiasa merupakan hasil musyawarah dengan tokoh-tokoh yang berada di sekitarnya. Dia dikelilingi oleh para ulama, para sarjana pendidikan Barat, para politikus dan kelompok-kelompok teknokrat. Dengan demikian tidak benar pendapat yang mengatakan bahwa *Khomeini* "memutuskan segala sesuatu secara sendirian". Sekurang-kurangnya 25 orang tokoh berada di sekitar Khomeini.[104]

Dalam hal ini, bisa dikatakan bahwa berbagai aturan yang dibuat oleh Khomeini terhadap perempuan sesungguhnya hanya untuk melindungi perempuan. Namun karena kebiasaan yang sudah melekat dalam diri kaum perempuan utamanya yang lebih berorintasi ke Barat membuat mereka merasa bahwa kebijakan-kebijakan tersebut justru menjadi penghalang akan hak-hak perempuan yang diinginkan. Dan dikarenakan keadaan sudah berubah, jadi sulit bagi perempuan untuk

[104] Yusuf Abdullah Puar, *Perjuangan Ayatullah Khomeini* (jakarta: Pustaka Antara, 1979), 57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menerima hal tersebut, apalagi waktu itu modernitas ala Barat sudah masuk dalam wilayah Iran.

Akibat dari kebijakan Khomeini maka banyak menuai berbagai protes yang dilakukan oleh sebagian kaum Perempuan. Khusunya, perempuan kelas menengah ke atas yang notabennya sudah terbiasa menggunakan pakaian ala Barat. Mereka merasa dirugikan akan kebijakan yang dibuat oleh Khomeini. Perempuan kelas menengah ke atas merasa bahwa kebijakan seperti itu menjadi penghalang bagi mereka dalam beraktifitas sesuai dengan yang mereka inginkan, dan hal tersebut dianggap membatasi HAM di Iran.[105] Akibatnya kaum perempuan berdemonstrasi pada 8 Maret 1979 untuk menunjukkan ketidak puasan mereka pada pemaksaan memakai jilbab.[106]

Demikian pula, adanya kebijakan-kebijakan tersebut juga menuai terjadinya demonstrasi-demonstrasi terutama dari golongan kelompok politik perempuan sayap kiri yang lebih sekuler dan yang berorientasi untuk menentang pembatasan-pembatasan tersebut. Begitu juga dengan perempuan anggota parlemen dan perempuan pegawai negri sipil yang membuat tuntutan pada pemerintah untuk kesetaraan dan kesempatan yang lebih besar. Di kalangan kelas menengah, kaum perempuan juga mengecam konstitusi baru terutama soal besarnya kekuasaan yang

[105] Camara, 23.
[106] Tamara, 246.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diberikan pada *Faqih* dalam kekuasaan negara, serta tidak progresifnya pasal tentang status perempuan Iran.[107]

Jadi dengan demikian, ada hal-hal yang membuat perempuan merasa bahwa disatu sisi kebijakan Khomeini telah memberikan ruang yang baik bagi perempuan dengan cara menghormati perempuan dan mengubah kebiasaan perempuan seperti hiburan malam, menutup aurat, dan lain-lain. Namun disisi lain, perempuan merasa bahwa ruang di depan publik semakin terbatasi. Meskipun perempuan diperbolehkan untuk berkiprah di ruang publik sesuai dengan Islam, namun pada saat yang sama, masih ada yang kurang mencerminkan nilai-nilai Islam, seperti belum adanya perempuan yang duduk di parlemen, dan lain-lain.

B. Kebijakan Pemerintah Iran semasa Khomaeni

Setelah hampir satu tahun revolusi Islam berjalan, lembaga kepresidenan baru terbentuk. Secara teoritis, para kandidat-kandidat presiden hasrulah terlebih dahulu disaring oleh Khomeini sebelum nama mereka disiarkan oleh Dewan Pelindung Konstitusi.[108] Pemilihan presiden pertama dilakukan pada 25 Januari 1980 di seluruh daerah. Bani Sadr mendapat lebih dari 76% suara, sehingga terpilih sebagai presiden pertama Iran. Imam Khomeini mengambil sumpahnya dalam suatu upacara pada 4 Februari 1980. Dalam upacara itu Imam Khomeini mengingatkan Bani Sadr supaya tetap menghormati Islam dan Konstitusi.[109] Bani Sadr juga

[107] Ibid,. 408.
[108] Ibid,. 290.
[109] Muhammad Hasyim Assagaf, *Lintasan Sejarah Iran dari Achaemenia ke Republik Revolusi Islam* (Jakarta: The Culture Section of Embassy of The Islamic Republic of Iran, 2009), 627.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

termasuk anggota Dewan Revolusi, sekaligus menjabat sebagai Mentri Ekonomi dan Keuangan Iran. Ia merupakan seorang yang pandai bicara, berpikir panjang sebelum mengemukakan pendapatnya, dan bicara seperlunya.

Masalah yang sedang dihadapi oleh pemimpin-pemimpin Iran saat itu adalah bagaimana membangun sebuah sistem ekonomi Iran baru yang dapat membebaskan Iran dari ketergantungan ekonomi, politik dan sosial dari AS dan dari negara manapun juga. Beberapa langkah besar telah dilakukan Bani Sadr, antara lain dengan nasionalisasi seluruh bank dan industri berat yang memegang peranan penting bagi masyarakat Iran. Bunga dari penyimpanan uang di bank juga diturunkan. Para pemilik mendapat balasan jasa atas partisipasi mereka dalam menghimpun modal yang dapat digunakan untuk pembangunan Iran. Ini satu langkah ke arah hukum Islam.[110]

Namun, langkah yang ditempuh oleh Bani Sadr tidaklah mudah. Bani Sadr mulai menciptakan basis kekuatannya dalam angkatan bersenjata, dan berusaha merangkul gerakan-gerakan liberal penganut politik moderat, tidak radikal dan tidak konservatif agar menerima kepimpinannya.Masalah yang dihadapi pemerintahan Bani Sadr masih berada dalam lingkup politik pemerintahan Iran sendiri. Sehinga kebijakannya belum sampai meluas ke semua permukaan, terutama

[110] Tamara, 251.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengenai perempuan. Ia mendapat berbagai kritikan dari beberapa partai, seperti Partai Republik Islam dan beberapa ulama konservatif.

Apalagi ia Sering sekali mengambil posisi yang berbeda dengan Khomeini. Misalnya mengenai *Velayat Faqih* yang dianggapnya memberikan kekuasaan terlalu besar pada pemimpin agama. Ia menentang keinginan beberapa tokoh agama yang menurutnya terlalu kolot dan ingin menguasai negara Iran.[111] Bani Sadr juga anti kekerasan, dan anti sensor pers, ia berusaha agar seluruh pers Iran bebas menulis apa yang ingin dikatakan mereka.

Ketika Bani Sadr di wawancarai oleh Nasir Tamara tentang hak-hak manusia dan perempuan dalam Islam Iran, Sadr menjelaskan bahwa masalah perempuan bercadar adalah soal sepele. Perempuan dan laki-laki mempunyai hak-hak yang sama. Perempuan bukanlah objek, makin tua ia maka harus semakin dihormati.[112]

Sebelumnya, Khomaeini sering menjadi penengah antara Bani Sadr dan ulama konservatif ketika ada beberapa permasaahn yang terjadi. Namun, hal tersebut tidak berlangsung lama, karena Khomeini sangat mengkritik sekutu Bani Sadr, kaum liberal dan Mujahidin Khalq yang dianggapnya membawa bencana pada revolusi. Pada 15 Juni Khomeini mengatakan bahwa Bani Sadr tidak bertindak menurut kehendak pemilihannya dan karena itu ia harus memohon maaf pada bangsa Iran. Pada 21 Juni Majelis memaklumkan bahwa presiden Bani Sadr tidak

[111] Ibid,. 274.
[112] Ibid,. 301.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kompeten secara politik. Keesokannya Imam Khomeini mengukuhkan keputusan itu. Sehingga, Jaksa Agung pun mengeluarkan surat perintah penangkapan Bani Sadr. Namun, ia melarikan diri ke Prancis bersama pemimpin Mujahidin Khalq pada 23 Juni 1981.[113]

Bani Sadr tidak selalu mengindahkan perkataan para ulama konservatif. Dan kebijakan yang dibuat antara Bani Sadr dan Khomeini tidak terlalu sesuai. Dengan demikian, selalu kebijakan Khomeini yang menang, sehingga hak-hak perempuan Iran pada masa Bani Sadr tidak sempat terakomodasi.

Kemudian diadakan pemilihan presiden ke II pada 24 Juni 1981, mantan Perdana Mentri Raja'i beroleh suara yang melimpah sebagai calon presiden. Bersama itu diadakan pula pemilihan sejumlah anggota Majlis, 72 anggotannya tewas dalam pemboman 28 Juni 1980, termasuk anggota-anggota Majlis. Pemerintahan presiden yang ke II ini sangat singkat, karena setelah Imam Khomeini mengukuhkan Raja'i sebagai presiden 2 Agustus 1981, terjadi ledakan bom, yang nampaknya dipasang Mujahidin Khalq, dekat kantor presdien. Dalam kejadian ini presiden Raja'i tewas.

Setelah gugurnya Presiden Raja'i, pada 2 Oktober 1981 diadakan pemilihan baru yang ketiga. Kampanye dilakukan dalam suasana yang terancam oleh terorisme. Pemimpin Partai Republik Iran Ali Khamenei terpilih dengan 95% suara, dan diambil sumpahnya pada 13 Oktober 1981. Khamenei adalah salah seorang pendiri Partai Republik Islam dan ketua

[113] Muhammad Hasyim Assagaf, *Lintasan Sejarah Iran dari Achaemenia ke Republik Revolusi Islam*, 635.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

partai Republik Islam. Ia murid Imam Khomeini yang bergelar Hujjatul Islam, setingkat di bawah Ayatullah.[114]

Dalam program pemerintahan presiden Khamenei yang diutamakan ialah penyiaran Islam, propaganda revolusi, pelembagaan badan-badan revolusioner demi konsolidasi Republik Islam Iran. Kegairahan rakyat dibangkitkan antara lain melalui kesetaraan rakyat dalam upacara-upacara, seperti Pekan Persatuan Islam, Hari al-Quds, hari Mustadh'afin, Pekan Peperangan, Hari perempuan, dan sebagainya. Untuk mengisi Republik Islam Iran dengan persepsi Islam sejati, dilakukan Islamisasi versi mereka. Di tahun 1982 proses Islamisasi yang diutamakan adalah perundang-undangan dan kehakiman, dan sistem pendidikan.[115]

Pemilihan presiden yang keempat dilakukan pada 16 Agustus 1985. Dari antara tiga calon, Presiden Khamenei terpilih kembali oleh mayoritas amat besar. Setalah terpilih lagi, presiden Khamenei memaklumkan akan lebih mengaktifkan kebijakan luar negri yang bertujuan mendapatkan sekutu bagi Republik Islam Iran. Ia juga mendukung ekonomi campuran di Iran dan mengurangi campur tangan pemerintah dalam industri swasta. pada 2 Juni 1987, Partai Republik Islam Iran dibubarkan, karena pada waktu itu partai Islam ini sangat dominan sehingga sering di tuduh sebagai partai monopoli.

Menurut Khamenei, walaupun kewajiban memakai jilbab masih diperdebatkan, tetapi kewajiban memakai jilbab merupakan konsep

[114] Ibid,. 639.
[115] Ahmad Khomeini, *Mir'atu Syamsi,terj. Muhdor Assegaf* (Bogor: Cahaya, 2004), 640.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keagamaan yang tidak tunggal, tapi tetap diberlakukan. Sehingga demostrasi tetap terjadi, dimana masih terjadi pemberontakan antara perempuan umum dengan polisi moralitas. Menurutnya kita harus yakin bahwa segala sesuatu yang diputuskan Imam Khomeini tak ada yang sia-sia.[116]

Pada masa Khamenei ini, beberapa perempuan menjadi kontestan dalam pemilihan Majlis yang ketiga pada 8 April dan 13 Mei 1988. Kontestannya terdiri dari 1.600 orang, dan termasuk 30 perempuan untuk 270 kursi majlis. Pada pemilihan majlis yang ketiga ini terjadi kemunduruan hasil pemilihan bagi kalangan ulama konservatif di daerah-daerah dan hanya seperempat kursi diperoleh kaum Mullah. Kalangan menengah kapitalis pun merosot.[117]

Perempuan perlahan mendapatkan hak mereka untuk belajar lagi di universitas, dan belajar di bidang yang mereka pilih. Karena sebelumnya, perempuan hanya diperbolehkan mengambil jurusan yang sesuai dengan ketetapan negara. Selain itu, pemerintah Iran membuat langkah untuk mempersempit kesenjangan dan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dengan mendanai program-program untuk mengajarkan kaum perempuan, terutama di daerah pedesaan. Perempuan dilatih untuk menggunakan komputer agar menjadi mahir dengan program komputer

[116] Ibid,. 476.
[117] Assagaf, 642.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dasar. Serta pemberian dana yang membantu mendidik mereka menangani aspek keuangan dari kehidupan mereka, dan menciptakan usaha kecil.[118]

Pemerintahan Republik Islam Iran di bawah Khomeini ditandai tidak ada lagi pemisahan antara agama dan negara. Penggabungan agama dan pemerintah berarti menjadi seorang Muslim yang saleh dan warga negara yang baik mempunyai arti yang sama. Kebijakan Khamenei hampir sama dengan kebijakan Khomeini yang menganggap bahwa mendidik dan membesarkan anak-anak suapay sholeh merupakan tugas utama seorang perempuan. Meskipun pandangan seperti itu, perempuan yang boleh bekerja diluar rumah semakin meningkat, seperti bekerja di industri, politik, budaya, dan sektor hiburan.[119]

Ketika Imam Khomeini yang menderita kanker hati meninggal pada 3 Juni 1989, 83 anggota Dewan Ahli mengangkat presiden Sayyid Ali Khamenei sebagai "Pemimpin Revolusi" (Rahbar) dan gelarnya dinaikkan menjadi Ayatullah. Pada 28 Juli 1989 Ali Akbar Hashemi Rafsanjani dipilih sebagai Presiden menggantikan Khamenei. Pada saat yang sama suatu perubahan konstitusi, disetujui oleh pemilih. Dalam perubahan Konstitusi memberi kekuasaan lebih tinggi pada presiden.[120]

C. Kebijakan Pemerintah Pasca Khomaeni

Ketika *Faqih* dipegang oleh Ali Khamenei menggantikan Ayatullah Khomaeni, pemerintahan Iran, mengalami berbagai kebijakan yang berbeda dari masa Iran di bawah Khomaeini. Pada masa Khamenei

[118] Camara, 7.
[119] Ibid,. 37.
[120] Hasyim, 644.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini ada beberapa presiden yang memerintah di Iran. Diantaranya Ali Akbar Hashemi Rafsanjani, Mohammad Khatami, Mahmoud Ahmadinejad dan beberapa presiden lain hingga sekarang. Namun penelitian ini difokuskan pada masa ketiga presiden diatas.

1. Ali Akbar Hashemi Rafsanjani (1989-1997)

   Pada masa Rafsanjani, Pemerintah Iran cenderung lebih terbuka terhadap perkembangan yang terjadi baik didalam negri ataupun di luar negri. Iran kini memasuki zaman baru lagi yang ditandai dengan adanya pergeseran orientasi dari revolusi ke pembangunan. Pergeseran itu dimotori sendiri oleh presiden Rafsanjani.[121]

   Salah satunya adalah persoalan ekonomi. Bagi Rafsanjani, kemerdekaan hanya akan mempunyai arti yang nyata apabila Iran kuat secara ekonomi. Ia merasa perlu untuk lebih memusatkan perhatian pada penataan kembali infrastruktur sosial-ekonomi dalam negeri, yang mengalami kerusakan berat akibat revolusi dan perang. Pada masa ini Rafsanjani tidak lagi mempermasalahkan hubungan antara pemerintah Iran dengan pemerintah Amerika Serikat. Sikap keterbukaan ini tentu berkaitan erat dengan lebih membaiknya kehidupan masyarakat Iran dibidang ekonomi dan tingkat pendidikan.

   Pada masa ini, kaum perempuan Iran merasa lebih leluasa dan lebih bebas dalam menikmati kehidupan. Bahkan presiden Rafsanjani mendirikan Dewan Sosial-Budaya Perempuan untuk mempromosikan

[121] Jatmika, 64.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

status ekonomi dan sosial perempuan. Ia berpendapat bahwa pelaksanaan “Kebijakan Rekonstruksi” memberikan kesempatan untuk generasi baru perempuan Islam yang sadar akan gender untuk menjalin kerjasama dengan kalangan perempuan sekuler, dan untuk megembangkan Islam yang modern.[122]

Menurut presiden Rafsanjani, suksesnya perempuan-perempuan sangat tergantung kepada keaktifan mereka dalam bidang sosial, akademik dan kebudayaan. Menurut Rafsanjani perempuan Iran telah membuat suatu prestasi yang terkenal dalam bidang seni. Untuk pertama kalinya dibuka pertunjukan-pertunjukan seni oleh para artis-artis perempuan Iran, dalam suatu wadah organisasi warisan budaya. Rafsanjani melihat peragaan atau pertunjukan inimenurut Rafsanjani sebagai sebuah penghormatan bagi perempuan mulim, bakat ilustrasi mereka dan potensi-potensinya juga ekspresi. Rafsanjani berharap media massa akan mampu meliput atau membuat berita sebagai suatu peristiwa penting. Selain itu Rafsanjani menetapkan dalam pemerintahannya memberikan dukungan bagi aktivis perempuan.[123]

Beberapa pemerintahan Rafsanjani terkait kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Misalnya pada tahun 1992 'Kantor Urusan Perempuan', didirikan baik ditingkat kantor presiden dan di setiap kementerian. Pembentukan kantor ini untuk mendeteksi masalah dan

[122] Heshmat Sadat, *Participation of Women in Iran’s Polity*, dalam jurnal GEMC, no.4, vol.2, 2013, 30.
[123] Jatmika, 69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kekurangan perempuan.[124] Seorang perempuan diangkat sebagai penasihat presiden dan untuk isu-isu perempuan, dan diresmikan Deplu Urusan Perempuan. Selain itu ada kegiatan yang lebih sistematis, seperti penyusunan laporan nasional tentang status perempuan dalam menanggapi Konferensi PBB yang disponsori Dunia tentang Perempuan di Nairobi (1985) dan Beijing (1995).[125]

2. Kebijakan Mohammad Khatami (1997-2005)

Khatami terpilih menjadi presiden Iran pada tanggal 23 Mei 1997. Khatami memenangkan pemilu sebagai presiden kelima Iran. Selama kampanye, Khatami mengangkat isu-isu kontroversial. Diantaranya, penegakan hak-hak asasi manusia, hak-hak perempuan, pluralisme budaya, toleransi dan demokratisasi. Semua itu belum pernah dibicarakan secara terbuka oleh pemerintahan Iran sebelumnya. Ia juga berjanji akan menjalankan *ditente* (peredaan ketegangan) dengan seluruh negara di dunia yang bersedia menghormati Iran.[126]

Khatami berhasil mendorong para intelektual, kaum perempuan kota, golongan liberal, golongan kiri, kaum muda dan artis, disamping ulama moderat, berbondong-bondong ke tempat pemungutan suara untuk memilihnya. Toleransi dan pluralisme diyakini Khatami sebagai strategi budaya untuk mendewasakan Iran. Ia menolak sikap untuk

---

[124] Hesmat Sadat, *Participation of Women in Iran's Polity*, 30.
[125] Nayereh Tohidi, "IRAN", dalam *Women's Rights in the Middle East and North Africa :Progress Amid Resistance*, ed. Sanja Kelly and Julia Breslin (New York: Freedom House, 2010), 2.
[126] Jatmika, 71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menutup diri dalam menghadapi infasi budaya Barat, sebagaimana yang dilakukan golongan konservatif.

Selama kampanye Khatami berjanji akan menyediakan kursi bagi perempuan di dalam kabinetnya, jika memenangkan pemilu. Setelah Khatami berhasil menjadi presiden, untuk pertama kalinya sejak revolusi Islam 1979, Iran mempunyai seorang wakil presiden perempuan, yakni Masumaeh Ebtekar yang berusia 30 tahun. Sebelumnya, Masumeh juga pernah sebagai ketua komite sentral sebuah organisasi perempuan non-pemerintah di Iran.[127]

Massunah Ebtekar seorang perempuan yang menerima pendidikannya di AS dan yang mewakili Iran dalam konferensi perempuan di Beijing. Ebtekar menjadi Wapres yang membidangi masalah perlindungan lingkungan. Khatami memilih wapres perempuan selain karena latar belakang pendidikannya, juga karena ia banyak berprestasi di bidangnya. Dalam suatu wawancara dengan majalah perempuan bergengsi di Iran *Zanan*, Khatami mengatakan bahwa ia memilih pembantu-pembantunya berdasarkan atas kemampuan mereka bukan jenis kelamin dan mereka harus diberi kesempatan menduduki jabatan tinggi.[128]

Terpilihnya Khatami, yang sebagian besar suaranya didapat dari dukungan kaum perempuan dan pemuda, menandakan bahwa kaum perempuan di Iran akan segera mendapatkan kembali kebebasannya.

[127] Ni'mah Nur Aini, "Kebijakan Mohammad Khatami Tentang Wanita di Iran", (skripsi, UIN Sunan Kalijaga, fakultas Adab dan Humaniora, 2016), 44.
[128] Ibid,. 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akan tetapi ide-ide yang dilontarkan oleh Khatami tersebut mendapat banyak tantangan dari ulama-ulama Iran, terutama dari golongan konservatif yang masih sangat memegang kuat tradisi lama dengan konservatisme hukum Islamnya. Mereka sangat tidak setuju dan menentang kebijakan Khatami. Dalam pandangan ulama konseratif, Khatami merupakan seorang yang sangat liberal dengan segala tindakannya yang begitu mengejutkan. Sebenarnya ia seorang yang beraliran moderat, yang dapat menerima perdaban Barat dan terbuka untuk dunia luar.[129]

Walaupun mendapat tantangan dari ulama konservatif, Khatami terus melanjutkan kebijakannya dan sampai derajat tertentu berhasil. Di dalam pemerintahan Khatami juga ada dua anggota kabinet perempuan; satu di peringkat wakil presiden dan kepala "Departemen Perlindungan Lingkungan" dan yang lainnya sebagai penasihat presiden dan kepala "Pusat Partisipasi Perempuan" (yang telah berubah ke "Pusat Urusan Perempuan dan Keluarga" setelah presiden Ahmadinejad terpilih pada tahun 2005).[130]

Selain itu, Khatami juga megangkat Ny. Aozom Nuri, sebagai wakil mentri kebudayaan untuk masalah perundangan-undangan dan parlementer. Sebelumnya, Khatami juga mengangkat Marziah Dashtaki sebagai diplomat perempuan Iran di China. Beberapa perempuan juga telah menjadi pertimbangan Presiden Khatami untuk

[129] Jatmika, 20.
[130] Hesmat Sadat Moinifar, *Participation of Women in Iran's Polity*, 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wakil-wakil mentri, salah satunya Zahra Rahmaward yang diduga akan menjadi wakil mentri urusan perempuan dan kebudayaan dalam kabinet Khatami.

Kantor kepresidenan juga membentuk biro khusus untuk urusan perempuan pada 1992, sementara kementrian luar negri membuka biro yang sama pada tahun sebelumnya, yang keduanya dipimpin oleh perempuan. Ada sekitar 600.000 perempuan yang bekerja sebagai pegawai negri dan 30% dari seluruh guru Iran adalah perempuan. meskipun pendirian liberal yang relatif masih baru ini, para perempuan Iran masih harus menghormati hijab dan pakaian muslim wanita Iran berupa pakaian panjang yang menutupi kepala, badan dan rambut. Bagi Khatami sendiri lebih menyukai sebuah hijab yang memadukan aturan-aturan religius dengan kehormatan seorang muslim perempuan.[131]

Pada masa ini perempuan berpartisipasi dalam aktifitas sosial politik telah meningkat dengan pesat, sementara pembatasan kebebasan pribadi dan berpakaian dikendurkan. Perempuan diuntungkan dalam masalah literasi dan pencapaian pendidikan, dan menikmati peningkatan akses keperawatan kesehatan primer dan pengendalian kelahiran. Namun, upaya oleh anggota reformasi berorientasi parlemen (Majlis) untuk membuat perubahan yang progresif, termasuk ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk

[131] Ibid,. 79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), diblokir oleh Dewan Garda konservatif.[132]

Pemerintah Iran juga telah mengambil langkah untuk menurunkan disparitas antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Menurut laporan dari Iran ke PBB, pemerintah anggaran untuk urusan perempuan di Iran meningkat 226% pada tahun 2003, dibandingkan dengan tahun 2002. Ayat 5 dari Konstitusi diamandemen pada tahun 1992 untuk memungkinkan pengangkatan hakim perempuan yang berkualitas. Setelah revolusi, jabatan hakim itu tak terjangkau untuk bahkan yang paling memenuhi syarat perempuan.[133]

Pada masa ini pula ada 13 perempuan reformis yang terpilih sebagai anggota Majelis yang keenam. Ini merupakan jumlah terbesar sejak revolusi Islam 1979. Perempuan-perempuan ini membentuk suatu blok yang kemudian dikenal sebagai Fraksi Perempuan. Seperti presiden Khatami, Fraksi perempuan menyatakan kesetiaan kepada revolusi Islam dan mereka mempertanyakan konsep negara Islam. Namun, Fraksi ini menyesalkan kesenjangan antara cita-cita Republik Islam dan realitas hak dan status perempuan. Fraksi Perempuan berangkat untuk memperbaiki kondisi perempuan Iran dengan mengubah peraturan yang ada. Pendekatan ini bertujuan untuk

[132] Nayereh Tohidi, "IRAN" dalam *Women's Rights in the Middle East and North Africa :Progress Amid Resistance*, 3.
[133] Camara, 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meredam keparahan dan dampak hukum patriarki pada kehidupan perempuan Iran.[134]

Tingkat perdebatan tentang perempuan semakin meningkat, melalui tulisan-tulisan dan advokasi yang dibuat oleh perempuan Iran. Setelah Maret 1998, terdapat pameran buku yang diterbitkan oleh perempuan dengan lebih dari 50 peserta. Pada tahun 1999 jumlah penerbit perempuan meningkat menjadi 236.61, dengan berbagai ketrampilan, kemauan dan ambisi kewirausahaan. Terdapat sebuah forum yang belum pernah terjadi sebelumnya, yakni forum untuk debat sosial-politik yang terbuka serta semakin kritisnya perempuan yang disampaikan melalui pers dan publikasi perempuan.[135]

Pada bulan April 2000, sekelompok intelektual, jurnalis, aktivis, dan reformis berkumpul di Berlin untuk membahas arah masa depan gerakan reformasi di Iran. Konferensi Berlin telah disetujui oleh otoritas Islam, namun kemudian dianggap tidak Islami sebagai akibat dari agitasi oleh unsur-unsur oposisi Iran di pengasingan. “Sepuluh reformis didakwa dengan bertindak melawan keamanan internal negara dan meremehkan perintah suci Republik Islam.” Dalam hal ini terdapat dua aktivis sekuler terkemuka Mehrangiz Kar dan Shahla Lahiji dijatuhi hukuman dengan menghabiskan dua bulan di penjara.

[134] Rebecca Berlow and Shahram Akbarzadeh, *Prospects for Feminism in The Islamic Republic of Iran*, dalam jurnal *Human Rights Quarterly*, vol.30, no.1, 2008, 27.
[135] Mehri Honarbin, *Becoming Visible in Iran: Women in Contemporary Iranian Society* (London: Tauris Academyc Studies, 2008), 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan lainnya mendapatkan banding hukum sehingga terbebas dari penjera. [136]

Selama tahun akademik 2002-2003, pendaftaran perempuan masuk universitas melebihi laki-laki untuk pertama kalinya sejak universitas didirikan di Iran pada 1930-an. Perempuan memegang 12 persen dari penerbitan direktur rumah dan 22 persen dari anggota Asosiasi Profesional Jurnalis.[137]

3. Kebijakan Mahmoud Ahmadinejad (2005-2013)

Mahmoud Ahmadinejad terpilih menjadi presiden pada 2005, dan dilantik pada 03 Agustus 2005, dengan dukungan penuh dari para pemimpin ulama konservatif. Pada masa Ahmadinejad, Republik Islam mempunyai menteri perempuan pertama.[138] Kampanye presiden Ahmadinejad fokus pada kemiskinan, keadilan sosial, dan redistribusi kekayaan di Iran.

Ahmadinejad mulai terjun di pemerintahan setelah ditunjuk sebagai Gubernur di kota Maku dan Khoy di provinsi Azerbaijan Barat tahun 1993. Kemudian menjadi wali kota Teheran pada 2003. Sejak menjabat Wali Kota, Ahmadinejad lebih dikenal sebagai orang yang sederhana, religius dan rendah hati. Hidupnya selalu berada di lingkungan kelas menengah ke bawah, di mana ia biasanya belanja di kalangan masyarakat umum dan mengendarai mobil tuanya sendirian.

[136] Rebecca, 31.
[137] Moghadam, 3.
[138]https://megapolitan.kompas.com//read/2009/08/07/07110331/ahmadinejad.pilih.mentri.perempuan, (15 Februari 2019)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh karena itu, pada umumnya Ahmadinejad mendapat dukungan dari konstituen yang beragam dan dari provinsi, pedesaan, serta masyarakat yang taat beragama. Dia juga mendapat dukungan dari kelompok yang lebih muda, generasi kedua elit revolusioner yang dikenal sebagai *Abadgaran* (Pengembang,) yangdominan di parlemen Iran.[139]

Selama menjabat sebagai wali kota, salah satu kebijakan kontroversial yang diambilnya yakni menutup restoran cepat saji ala Barat dan menutup papan reklame dengan referensi Barat. Sehingga setelah ia terpilih menjadi presiden, secara terang-terangan ia menentang peningkatan hubungan Iran dengan Amerika Serikat.[140] Ia juga terkenal sebagai salah satu presiden di dunia yang dengan lantang menentang kebijakan dan intervensi Amerika Serikat.[141] Namun, terpilihnya Barack Obama sebagai presiden, hubungan Iran di bawah kepresidenan Ahmadinejad dengan Amerika mengalami peningkatan.

Dibawah kepemimpinan Ahmadinejad 2005, saat ia terpilih sebagai presiden, aturan yang didasarkan pada agama semakin diperketat. Sesuai dengan kampanyenya, ia banyak mempromosikan budaya Islam. Sehingga budaya Barat yang dirasa bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut Iran dengan tegas ditolak dan dilarang. Ahmadinejad juga melarang film asing ditayangkan di Iran. Baginya,

---

[139] Sanam Vakil, *Women and Politics in The Islamic Republic of Iran* (New York: The Continuum International Publishing Group, 2011), 171.
[140]https://internasional.kompas.com/read/2018/11/02/16593491/biografi-tokoh-dunia-mahmoud-ahmadinejad-presiden-iran-yang-sederhana?page=all, 15 februari 2019
[141]https://tirto.id/ahmadinejad-yang-terjungkal-di-laga-pencalonan-presiden-iran-cnie, 15 Februari 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

film-film atau budaya Barat yang lebih liberal, sekuler harus dilarang agar tidak menganggu kebijakan internal Iran.[142]

Terpilihnya Mahmoud Ahmadinejad juga menandai berkuasanya kelompok garis keras. Ahmadinejad berusaha untuk menghidupkan kembali doktrin revolusioner Ayatollah Khomeini. Ahmadinejad menarik kekuatan dari dasar-dasar rezim ideologi dan menjanjikan bahwa kembali ke ideologi tradisional revolusi akan memberikan Iran penebusan dan harapan untuk masa depan yang baru.[143]

Hampir semua bidang kehidupan sosial perempuan terkena efek negatif. Kondisi perempuan di Iran mengalami pembatasan kembali terutama pada masalah sosial politik, berbusana, kebebasan berkumpul, advokasi sosial, kreativitas budaya, bahkan aktivitas akademik dan ekonomi.[144] Sebuah studi yang diterbitkan pada bulan Juni 2005 menemukan bahwa banyak dari upaya bunuh diri oleh perempuan muda Iran yang berpendidikan tinggi.[145]

Pada bulan Oktober 2006, Presiden Ahmadinejad menyerukan perempuan Iran untuk kembali ke rumah keluarga, dan mencurahkan energi mereka untuk bertanggung jawab membesarkan anak. Hal ini membuat *shock* kaum perempuan dan sebagian besar kaum perempuan marah. Mereka mengungkapkan adanya kesenjangan yang besar antara tren negara dan opini publik, serta ideologi gender negara yang tidak

---

[142]http://tirto.id/zumba-dan-deretan-larangan-di-iran-cuIV, 15 Februari 2019
[143]Sanam Vakil, *Women and Politics in The Islamic Republic of Iran,* 170.
[144] Nayereh Tohidi, "IRAN", 3.
[145] Rebecca Barlow & Shahram Akbarzadeh, Prospect for Feminism In The Islamic Republic of Iran, 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuai dengan realitas kehidupan perempuan Iran. Perempuan Iran telah menolak untuk tetap terbatas pada urusan rumah tangga.[146]

Gerakan perempuan Iran di muka publik kian terbatas. Pada tahun 2006, hasil riset dari pusat studi Iran mengungkapkan bahwa 34% warga Iran beranggapan pemerintah tidak berhak mengatur apa yang harus dipakai perempuan Iran.[147] Dengan demikian, pengacara HAM Nasrin Sotoudeh menggelar aksi mogok memperotes aturan berpakaian bagi perempuan yang mengharuskan memakai cadar dan kerudung untuk seluruh anggota tubuh bagi perempuan di dalam penjara.[148] Para perempuan pendukung kelompok garis keras mengggelar aksi unjuk rasa memprotes apa yang mereka lihat sebagai kegagalan pihak berwenang dalam menegakkan hukum wajib jilbab.[149]

Pada bulan Juni 2007, pemerintah memperpanjang operasi keamanan untuk sebuah tindakan keras dan luas pada perilaku yang tidak bermoral. Selama musim panas, tindakan keras tersebut menyebabkan penahanan yang diperkirakan 150.000 orang dari berbagai kejahatan social. Akibatnya, patroli keamanan ditingkatkan lagi. Perempuan disarankan untuk menyesuaikan pakaian, dan mereka harus sopan serta tidak terlalu banyak mengungkapkan rambut mereka saat keluar dan menutup lekuk tubuh perempuan. Laki-laki

[146] Ibid., 22.
[147]https://m.kumparan.com/@kumparanstyle/transformasi-gaya-busana-perempuan-iran-sebelum-and-sesduah-revolusi, 15 Februari 2019.
[148]https://m.dw.com/id/perempuan-iran-tuntut-perubahan-di-negaranya/a-47454923, 15 Februari 2019.
[149]https://www.bbc.com/majalah-47167017, 15 Februari 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperintahkan untuk tidak memakai kemeja lengan pendek, dan dianjurkan memelihara jenggot dan gaya rambut yang sopan.[150]

Pada masa ini pemerintah mengatur segala hal yang berkaitan dengan laki-laki dan perempuan harus dipisahkan. Menganjurkan pemisahan lift untuk laki-laki dan perempun, taksi untuk perempuan, taman terpisah untuk perempuan, rumah sakit terpisah untuk perempuan, bahkan pasien perempuan hanya bisa dihadiri oleh tenaga medis perempuan.[151]

Salah satu aktivis Iran yang paling terkenal dan dihormati hak-hak perempuan, yakni Shirin Ebadi yang bersekutu dengan feminis sekuler yang berorientasi pada Juni 2006. Pernah terdapat 70 orang perempuan ditangkap dan diinterogasi oleh negara, dan Shirin Ebadi lah yang selama ini terkenal sebagai pembela para pembangkang politik terhadap negara. Atas permintaan penyelenggara, Ebadi membuka kasus hukum atas nama mereka dan menuntut terhadap negara. Sejak awal 1990-an Ebadi telah mengeduksi banyak kasus pengadilan paling kontroversial di Iran.[152]

Pada April 2006, Ahmadinejad mengeluarkan kebijakan yang bertentangan dengan pemimpin tertinggi Ali Khamenei, ia mengizinkan perempuan melihat pertandingan sepak bola secara langsung di stadion. Sebelumnya perempuan tidak diperbolehkan melihat pertandingan sepak bola secara langsung. Kebijakan ini

[150] Sanam Vakil, 175.
[151] Ibid., 191.
[152] Rebecca Barlow, 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditentang keras oleh Ali Khamenei. Ia menyatakan bahwa haram hukumnya bagi perempuan untuk menyaksikan langsung pertandingan sepak bola. Dan sampai sekarang, perempuan tidak diizinkan untuk melihat pertandingan langsung olahraga sepak bola.[153]

Ahmadinejad terpilih lagi menjadi presiden pada Juni 2009, periode 2009-2013. Setelah pemilihan ini banyak yang menganggap bahwa terpilihnya kembali Ahmadinejad menjadi presiden adalah sebuah rekayasa sehingga banyak terjadi aksi protes di jalan-jalan. Namun pemimimpin tertinggi Iran Ali Khamenei tetap mendukung terpilihnya Ahmadinejad yang kedua kalinya.

Akibat penolakan itu, Iran dilanda pergolakan besar pasca pemilihan umum di tahun itu. Lebih dari 12 penerbitan dan situs pro-reformasi ditutup. Sejumlah reformis senior, aktivis, wartawan dan lainnya di tangkap setelah pemilu Juni, dan beberapa disidangkan atas tuduhan mengobarkan kerusuhan. Sejumlah pengacara hak asasi manusia serta pengecam pemerintahan di tangkap dan di penjarakan. Termasuk yang diadili adalah pegawai-pegawai kedutaan besar Inggris dan Prancis serta seorang perempuan Prancis yang menjadi asisten dosen Universitas. Hingga tahun 2010, sudah ada sejumlah orang yang dijatuhi hukuman mati, dan puluhan orang divonis 15 tahun hukuman

[153] Ibid., 168.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penjara.[154] Pada tahun 2009, Iran mengeksekusi 338 orang, yang keduatertinggi di dunia.

Perempuan juga tidak dikecualikan dari tindakan keras tersebut. Pemerintah ingin menargetkan aktivis perempuan dan orang-orang sekuler untuk lebih diorganisir. Perempuan yang menolak ditangkapi dan ditahan, sehingga terjadilah penangkapan kasar dan penahanan terhadap banyak perempuan, utamanya perempuan sekuler yang berorientasi LSM, jurnal, dan organisasi dihapus dari akses publik. Karena itu, banyak aktivis perempuan lebih berhati-hati dalam menanggapi pemerintah tentang kampanye moralitas. Aktivisme mereka pindah ke dunia maya yakni Internet.[155]

Kegiatan aktivis perempuan berkampanye, yang berlangsung di dunia maya, dipantau oleh organisasi keamanan dan intelijen Negara. Para aktivis ditangkap, ditahan, dipenjarakan, dan dilarang bepergian ke luar negri. Pada masa ini kegiatan kampanye dibatasi, demonstrasi yang sudah berlangsung akan dibatalkan atau diganggu oleh polisi, dan anggotanyaditangkap, diintimidasi, dan dijatuhi hukuman penjara. Dan peserta unjuk rasa dituduh spionase. Menulis situs di dalam web yang isinya menyebarkan propaganda melawan negara juga dilarang.[156]

Hingga pada masa akhir jabatan Ahmadinejad terjadi konfrontasi antara Ahmadinejad dengan pemimpin tertinggi Ali Khamenei, yang

[154]https://internasional.kompas.com/read/2010/11/20/0112368/iran.bebaskan.2.perempuan.pengacara, 15 Februari 2019
[155] Vakil, 175.
[156] Ibid., 183.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diduga dipicu oleh pemecatan menteri intelejen yang merupakan sekutu Khamenei. Masa jabatan Ahmadinejad berakhir pada Agustus 2013.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

BENTUK DAN GERAKAN PEREMPUAN IRAN SESUDAH REVOLUSI

A. Gerakan Perempuan Iran

Revolusi Islam telah menarik perempuan Iran yang berbeda kategori sosial, budaya, maupun aspirasi ideologis untuk berpartisipasi aktif terlibat dalam penggulingan Shah Pahlevi, serta menekankan pentingnya aktivis sosial dan politik perempuan Iran.[157] Pada umunya perempuan di Iran terdiri dari beberapa kategori. Diantaranya adalah *kelompok tradisional, Islamis dan sekuler*. Beberapa diantara kelompok tersebut juga memiliki pandangan dan ideologi yang berbeda beda.

Kelompok tradisional adalah pendukung pemerintahan Republik Islam. Kelompok ini kebanyakan merupakan ulama perempuan yang memilih hidup terpencil dalam ranah domestik.[158] Bagi perempuan tradisional tanggung jawab utama seorang perempuan adalah keluarga. Hanya dengan izin dan dukungan dari suami, mereka bisa pergi keluar rumah. Perempuan ini cenderung lebih tertutup, dan biasa memakai tampilan dengan jilbab dan menggunakan cadar hitam dan stoking hitam.[159]

---

[157]Azadeh Kian-Thiebaut, From Islamization to the Individualization of Women in Post-revolutionary Iran, *dalam Women, Religion and Culture in Iran,* ed. Sarah Ansari and Vanessa Martin, (New York: Routledge Tylor and Francis Group, 2002), 127.
[158] Hamideh Sedghi,*Women and Politics in Iran: Veiling, Unveiling, and Reveiling,*265.
[159]Azam Taurat, "The Politicization of Women's Religious Circles in Post-revolutionary Iran", *dalam Women, Religion and Culture in Iran,* ed. Sarah Ansari and Vanessa Martin, (New York: Routledge Tylor and Francis Group, 2002),144.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yang kedua adalah kelompok perempuan islamis yang memilih untuk aktif dalam dunia politik.[160] Secara umum, mereka juga percaya dan *Women and Politics in The Islamic Republic of Iran* taat tehadap ajaran Islam. Namun mereka mempertimbangkan persamaan hak dalam keluarga serta lingkungan sosial sesuai dengan Islam. Mereka percaya bahwa banyak posisi gender yang dikaitkan dengan Islam tidak sebenarnya Islam tetapi timbul dari kontrol patriarki laki-laki atas perempuan. Mereka bertujuan untuk membawa Islam sejalan dengan persyaratan modernitas.[161] Pada dasarnya, kelompok perempuan ini berusaha untuk mendifinisikan dan menafsirkan kembali isu-isu gender yang didasarkan pada kerangka Islam. Namun, tidak seperti rekan-rekan tradisional mereka, kelompok perempuan ini kecewa dengan kebijakan gender pemerintah.[162]

Yang ketiga adalah kelompok perempuan sekuler yang menyuarakan keberatan terhadap proses Islamisasi Pemerintah dan lembaga-lembaganya. Perempuan sekuler kecewa dengan kebangkitan hukum Islam dan penghapusan perlindungan hukum yang telah diperoleh selama rezim Pahlevi. Kelompok ini telah terpinggirkan dari sistem politik karena keberatan mereka terhadap pemberlakuan hukum Islam. Perempuan sekuler belum tentu religius atau non-Muslim, tetapi mereka mendukung pemisahan bidang politik dan agama. Banyak perempuan sekuler merupakan Muslim, tetapi mereka menolak dengan sungguh-

[160] Sanam vakil,*Women and Politics in The Islamic Republic of Iran*, 75.
[161]Ibid.,83.
[162]Haideh Moghissi, *Populism and Feminism in Iran* (London: Macmillan Press LTD, 1994), 57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sungguh sistem teokrasi pemerintah.[163] Hingga kelompok inilah yang merasa paling dikecewakan setelah terjadinya pembentukan hukum Islam di Iran.

Setelah revolusi Iran berhasil dimenangkan dengan terwujudnya negara Islam Iran, terjadi perubahan kebijakan di negara tersebut, terutama mengenai status perempuan. Adanya kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Dewan Revolusi yang utamanya menurut sebagian kaum perempuan sekuler merasa dirugikan, mereka kemudian membentuk koalisi tersendiri dalam menuntut hak-hak mereka yang telah dihapuskan.[164]

Pernyataan Khomeini sebelum Hari Perempuan Internasional pada 8 Maret 2019 tentang pengubahan UU Perlindungan Keluarga dan perempuan wajib hijab di tempat kerja, serta pemberhentian hakim perempuan oleh Departemen Kehakiman, telah membawa kemarahan tersendiri bagi kaum perempuan, khususnya kelompok perempuan sekuler. Kebijakan tersebut telah mengubah skala dan status Hari Perempuan Internasional dari acara pinggiran yang diselenggarakan oleh gerakan pinggiran, menjadi gerakan protes besar yang terdiri dari berbagai strata perempuan.[165]

Para pemrotes terdiri dari perempuan tua, muda, kaya dan miskin. Tetapi mayoritasnya adalah perempuan sekuler termasuk mahasiswa, profesional, pengangguran atau ibu rumah tangga, dari kelas menengah

[163]Vakil,9.
[164] Parvin Paidar, *Women and The Political Process in Twentieth-Century Iran*, 235
[165]Ibid., 236.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan kelas atas.[166] Pada Maret minggu ke-2 terjadi lagi unjuk rasa yang diperkirakan terdiri kurang lebih 20.000 ribu perempuan yang berbaris menuju *Azadi Square* (tempat kebebasan). Pengawal revolusi mulai menyerang para demonstran dan menghujani mereka dengan pelecehan verbal. Akibatnya perempuan terpaksa meninggalkan tempat unjuk rasa untuk menghindari cedera dan bentrokan lebih lanjut.[167]

Pada Juni 1980, keputusan menggunakan wajib hijab diresmikan. Menanggapi dekrit tersebut, perempuan melancarkan kampanye lagi yang penuh semangat dan menulis pamflet serta artikel untuk membela hak-hak perempuan. Mereka melakukan itu tanpa dukungan dari kelompok laki-laki kiri, progresif, maupun kelompok nasionalis sekuler. Ribuan perempuan meluncurkan aksi keluar ke jalan-jalan tanpa menunjukkan rasa takut. Mereka meneriakkan yel-yel: "Kebebasan Wanita, Kebebasan untuk Masyarakat, dan Kebebasan, Kemerdekaan, Matilah Diktator".[168]

Pada tanggal 5 Juli 1980, ribuan perempuan berkumpul di depan kantor presiden Bani Sadr untuk memprotes wajib hijab. Namun, keputusan penggunaan wajib hijab tetap menjadi keputusan yang tidak bisa dihapus. Demonstrasi perempuan dan aksi protes dan pembangkangan setelah revolusi tidak bisa membawa pembalikan peraturan yang tidak diinginkan perempuan. Namun, perjuangan perempuan terus berlanjut, meskipun dalam bentuk yang berbeda. Mereka mulai menantang dan

---

[166] Firozeh Kashani, *Conceiving Citizens: Women and The Politics of Motherhood in Iran*(New York: Oxford University Press, 2011), 211.
[167] Paidar,237.
[168] Hamideh Sedghi,*Women and Politics in Iran: Veiling, Unveiling, and Reveiling,* (New York: Cambridge University Press, 2007), h.250

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendefinisikan kembali mandat negara, bukan dengan cara protes jalanan, tapi melalui tindakan tenang tanpa pemberontakan.[169]

Disisi lain, tidak hanya perempuan yang menentang untuk wajib hijab, tapi ada juga kelompok perempuan yang menudukung kewajiban hijab. Salah satunya yang terlihat dalam sebuah seminar di Teheran tahun 1986. Seorang pembicara perempuan, Robabeh Fiaz-Bakhsh, dengan keras membela wajib hijab. Niat sebenarnya adalah untuk melindungi perempuan dari bahaya kekerasan seksual dan dosa. Selain itu, dia mengatakan bahwa pakaian perempuan harus sangat longgar untuk menutup tubuh mereka. Alasanya ia sangat menjunjung tinggi kesopanan perempuan yang harus dipertahankan, dan diwujudkan dalam hijab. Jika hijab dibongkar, maka tubuh perempuan juga terbongkar.[170]

Respon lain dari kelompok perempuan Islamis juga mengumpulkan kekuatan dan menciptakan gerakan feminis Islam vokal yang biasa disebut "Masyarakat Perempuan Revolusi Islam" yang didirikan oleh sekelompok perempuan setelah revolusi untuk melestarikan identitas budaya gender. Masyarakat Perempuan Revolusi Islam mendirikan cabang di kota-kota provinsi dan memulai program peningkatan kesadaran bagi perempuan. Para perempuan reformis Islam memiliki visi masyarakat Islam yang ideal dan peran perempuan ada di dalamnya. Kelompok Ini didirikan bertentangan dengan Muslim perempuan tradisional. Menurut mereka Islam yang benar adalah

[169]Ibid., 253.
[170] Firozeh Kashani, *Conceiving Citizens: Women and The Politics of Motherhood in Iran*, 212.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gabungan dari kesetaraan kesempatan bagi laki-laki dan perempuan untuk mengembangkan bakat dan kapasitas mereka serta untuk berpartisipasi dalam semua aspek kehidupan sosial. Namun mereka masih mengakui naluri keibuan perempuan dan peran penting mereka dalam keluarga.[171]

Di awal tahun 1980-an, terjadi perbedaan pandang antara kelompok perempuan sekuler dengan perempuan Islam. Menurut pandangan perempuan Sekuler, negara dieksploitasi oleh partisipasi perempuan Islam sebagai cara yang efektif untuk menghancurkan gerakan perempuan sekuler yang berjuang melawan dominasi tatanan patriarkal. Sedangkan di mata perempuan Islam, negara telah menyediakan langkah-langkah untuk pemberdayaan perempuan, dengan mengirim mereka keluar dari rumah untuk terlibat dalam aktivisme politik.[172]

Perempuan Islam tradisional sangat menentang aktivis perempuan sekuler yang menginginkan hak-hak perempuan dan penentangan terhadap kebijakan pemerintah. Gerakan-gerakan tersebut hanya dianggap oleh perempuan Islam sebagai pengikut budaya Barat yang tidak seharusnya di lakukan. Sedangkan menurut perempuan sekuler, kebijakan yang dibuat setelah revolusi sangat merugikan bagi perempuan Iran. Sehingga mereka menolak kebijakan tersebut dan membuat berbagai aksi demonstrasi di jalan-jalan.[173]

---

[171] Parvin Paidar, *Women and The Political Process in Twentieth-Century Iran*,242
[172] Elaheh Rostami-Povey, The Women's Movement in Historical Context, *dalam Women, Power and Politics in* 21st Century Iran, (ed. Tara Povey) (New York: Routledge Tylor and Francis Group, 2012), 25
[173] Ibid., 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sejak tahun 1990-an, terjadi bentuk kesatuan antara kalangan perempuan sekuler dengan perempuan Islamis yang mempertanyakan keterbatasan ideologi gender negara. Meskipun pandangan dan sikap sosial ekonomi, budaya dan politik mereka beragam, terutama di kalangan generasi baru perempuan yang dipolitisir di bawah negara Islam, kesatuan dicapai untuk memperjuangkan isu-isu hak-hak perempuan.[174]

Sejak perkembangannya di tahun 1990-an, gerakan perempuan kontemporer Iran telah menjadi salah satu gerakan yang paling penting untuk perubahan dalam masyarakat Islam dan salah satu gerakan perempuan berskala besar dan populer di dunia. Perempuan Iran telah berjuang untuk reformasi legislatif, politik dan demokrasi di negara mereka dan telah berhasil mencapai reformasi penting, terutama dibidang hukum keluarga.

Selain itu, ada pula gerakan yang dilancarkan oleh aktivisme perempuan organisasi non-pemerintah (LSM) yang berjuang untuk hak-hak perempuan melalui aktivisme masyarakat sipil yang dimulai sejak pertengah tahun 1990-an. Mereka memiliki peran penting dalam menentang negara, mempertahankan demokrasi dan mengangkat isu kompatibilitas dan modernitas Islam, serta hak perempuan dalam Islam.[175] Beragam gerakan perempuan lainnya yang tumbuh pada tahun 1990-an

[174] Elaheh Rostami-Povey, The Women's Movement in Historical Context, 28.
[175] Ibid., 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah melalui jurnal perempuan, penerbit, seniman, pengacara, hakim dan aktivis politik.[176]

Sejak tahun 1990-an atsmosfer di Iran juga mulai berubah akibat dari penentangan yang aktif secara terus menerus untuk meminta pengembalian kebijakan. Mereka mendefinisikan kembali bentuk dan warna hijab, serta menginginkan perhatian inti dari pemerintah Islam dan pendirinya. Di pusat-pusat kota, perempuan muda mulai merubah model pakaian yang mereka kenakan di tempat publik atau secara pribadi, mereka mengikuti mode yang mereka inginkan. Perempuan muncul di tempat-tempat formal atau universitas di mana polisi gender dan revolusi mencegah masuknya perempuan jika tidak berpakaian dengan benar.

Di daerah Teheran utara umumnya, mereka tidak menggunakan kerudung dan celana panjang longgar tapi banyak yang mengenakan jaket pendek yang lebih ketat dan memakai pakaian yang berubah dari sebelumnya. Mereka mengenakan syal kecil atau penutup kepala dengan memperlihatkan poni mereka, demikian juga mereka menggunakan make up yang disembunyikan di bawah kacamata hitam, tapi ada juga yang tidak memperlihatkan. Selain itu, mereka tidak mematuhi aturan pemisahan transportasi umum dan jenis kelamin, perempuan duduk di sebelah orang laki-laki asing ketika kursi bus di bagian perempuan sudah penuh.[177]

---

[176] Tara Povey, "The Iranian Women's Movement in its Regional and International", dalam *Women, Power, and Politics in 21st Century Iran*, ed. Tara Povey (New York: Routledge Tylor and Francis Group, 2012), 174.
[177] Sedghi,254.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Periode Khatami ketika terpilih menjadi presiden (1997-2005), dikenal sebagai era reformasi. Dimana unsur-unsur yang diterapkan dalam kebijakannya lebih demokratis dalam menyuarakan perpanjangan besar demokrasi.[178] Dalam periode ini, perempuan memainkan peran penting dalam gerakan reformasi. Partisipasi perempuan terus ditunjukkan, bahwa gender telah menjadi kekuatan penting dalam pembentukan politik di Iran. Majalah-majalah perempuan dan jurnal memainkan peranan penting sebagai forum untuk dilihat dari kedua aktivis perempuan Islamis dan sekuler. Publikasi ini, meskipun dibentuk oleh perempuan Islamis namun mereka memutuskan untuk mencari khalayak yang lebih luas dengan mengundang perempuan sekuler untuk berkontribusi terhadap perdebatan tentang isu-isu perempuan.[179]

Melalui jurnal dan majalah mereka, perempuan mulai mengatur dan menerbitkan buku-buku dan majalah memprotes terhadap pelembagaan ketidaksetaraan gender. Ruang lingkup perdebatan perempuan diperluas, dan konferensi mulai diselenggarakan pada berbagai aspek perempuan dan masalah keluarga. Konferensi pertama berjudul 'Partisipasi Sosial Perempuan' pada tahun 1993 di Teheran oleh Komisi Perempuan dan kelompok studi di departemen ilmu-ilmu sosial dan humaniora di Universitas Shahid Beheshti.[180]

---

[178]Jamileh Kadivar, Women and Executive Power, 125.
[179]Elaheh Rostami-Povey, The Women's Movement in Historical Context,29
[180]Azadeh Kian-Thiebaut, From Islamization to the Individualization of Women in Post-revolutionary Iran, 131

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tumpang tindih gerakan dan kesatuan antara perempuan sekuler dan Islamis telah menghasilkan reformasi dalam hukum keluarga, pekerjaan, pendidikan dan peraturan perundang-undangan serta hukum konstitusi yang telah sesuai dengan kehendak mereka. Gerakan ini beragam, namun telah berhasil memberikan tekanan pada negara dan lembaga-lembaga Islam dengan menekankan bahwa ketidak setaraan gender tidak berasal dari Islam, melainkan dalam penafsiran hukum oleh otoritas keagamaan konservatif.

Namun, pada tahun 2004 terjadi kekecewaan oleh sebagian kaum perempuan terhadap pemerintah reformis Khatami, karena mereka telah melakukan pendekatan damai terhadap ulama konservatif, yang dibuktikan dengan penutupan surat kabar dan jurnal serta penangkapan aktivis hak-hak perempuan dan aktivis pekerja.[181]

Sejak tahun 2005, pada periode Ahmadinejad yakni salah satu bagian dari ulama konservatif yang terpilih menjadi presiden telah merubah tatatan hak-hak perempuan, seperti yang telah dijelaskan dalam bab III. Namun, perempuan di Iran, terus menolak dominasi global dan lokal serta terus berjuang untuk hak-hak mereka, hak asasi manusia dan independensi demokrasi dari intervansi tekanan Barat.[182]

Setelah pemilu Juni 2009 dunia menyaksikan kebangkitan dari gerakan menyerukan reformasi demokratis dan legislatif di jalan-jalan Iran. Gerakan ini melibatkan partisipasi ratusan ribu perempuan yang

[181] Elaheh Rostami, 30.
[182] Kadivar,131

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memimpin, dan mengorganisir demonstrasi massa. Sehingga terjadi kekerasan operasi keamanan terhadap para demonstran.[183]

B. Masuknya Perempuan dalam Pemerintahan

Setelah Revolusi, Khomeini pernah mengatakan bahwa perempuan berhak untuk mendapatkan kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam hal sosial, politik, dan ekonomi.[184] Serta adanya klaim bahwa perempuan dapat berpartisipasi besar dalam politik dan pengambilan keputusan, namun perempuan masih dihadapkan oleh hambatan hukum dan sikap gender yang mencegah partisipasi penuh perempuan di wilayah publik. Akibatnya, partisipasi politik perempuan dan kehadiran mereka dalam kekuasaan dan proses pengambilan keputusan adalah salah satu daerah yang paling penting menjadi perhatian.[185]

Partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan politik, bagaimanapun, adalah jauh lebih terbatas. Dalam pemilihan Majelis yang pertama, Majelis Ahli bertanggung jawab atas penyusunan Konstitusi, lebih dari empat puluh kandidat perempuan diajukan oleh berbagai partai politik sekuler dan Islam serta berbagai organisasi. Namun yang terpilih menjadi anggota Majelis hanyalah satu yakni Monireh Gorji yang menjadi satu-satunya wakil perempuan di Majelis pemerintahan setelah revolusi.[186]

---

[183] Nayereh Tohidi,*Women and the Presidential Elections: Iran's New Political Culture*, http://www.juancole.com/2009/tohidi-women-and-presidential-elections.html (diakses 13, Oktober 2018)
[184] Ansia Khaz Ali, *Iranian Women After Islamic Revolution*,14.
[185] Moinifar Hesmat Sadat Moinifar, Participation of Women in Iran's Polity, dalam *Journal GEMC*, Special Issue 2, No.1, 2013, 30.
[186] Sabet, 210.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam pemilihan majelis, manuver politik memastikan bahwa hanya kandidat yang pro-Republik Islam yang akan terpilih menjadi anggota Majelis dan bisa berpartisispasi nasional di republik Islam.[187] Dengan demikian semakin terlihat bahwa rata-rata perempuan yang terjun dalam dunia politik pada awal-awal revolusi adalah perempuan Islamis yang memiliki pengetahuan yang baik tentang Islam dan tidak menentang pemerintahan republik Islam Iran. Dengan demikian mereka, bisa di pastikan bahwa perempuan dari kelompok sekuler mengalami penurunan partisipasi dalam bidang politik. Namun, gerakan mereka tidak pernah berhenti meskipun ranah politik tidak berada dalam wilayah mereka. Perempuan yang membuat terobosan dapat dikatakan berasal dari latar belakang Islam yang ketat.

Pada Pemilu Majelis tahun 1980 ada 25 perempuan mencalonkan diri sebagai anggota Majelis, mulai dari usia 24 sampai 60 tahun yang diajukan oleh berbagai partai politik pro Islam dan partai politik oposisi. Yang terpilih menjadi anggota Majelis hanya 3 orang perempuan, yakni Monireh Gorji, Azam Taleghani dan Goharolsharieh Dastgheib.

Pada tahun 1981 oposisi Majelis banyak yang meninggal saat insiden terbunuhnya Ali Raja'i yang terpilih menjadi presiden. Sejak saat itu, pemilu majelis menghasilkan kandidat perempuan lebih sedikit. Hanya ada dua perempuan yang terpilih ke Majelis yakni Ategheh Rajai dan Maryam Behruzi. Dalam dua pemilu berikutnya tahun 1984 dan 1988, ada

[187] Paidar,309.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tiga dari perempuan yang ada di deputi Majles yang terpilih kembali. Kandidat perempuan hanya dipilih jika mereka diajukan atau didukung oleh faksi politik yang dominan. Tidak ada calon perempuan independen yang pernah terpilih.[188]

Di bawah pemerintahan Hashemi Rafsanjani (1989-1997), kedua putrinya, Fatemeh Hashemi dan Faezeh Hashemi, berjuang untuk hak-hak perempuan dan berpengaruh dalam mendorong ayah mereka untuk menyertakan perempuan dalam posisi pengambilan keputusan politik dan manajerial yang tinggi. Sebagai hasil dari upaya mereka, Kantor Penasihat Presiden untuk Urusan Perempuan didirikan untuk pertama kalinya. Shahla Habibi, aktivis hak-hak perempuan, diangkat sebagai penasihat presiden pada isu-isu perempuan dan kepala lembaga ini. Kantor Urusan Perempuan mencoba untuk meningkatkan dan memajukan potensi perempuan, sebagai bagian dari kebijakan negara, dan dipandang penting untuk kemajuan masyarakat Islam. Di bawah pemerintahan Khatami (1997-2005) nama lembaga ini diubah menjadi Pusat Partisipasi Perempuan, dan Zahra Shojaee diangkat sebagai kepala lembaga.[189]

Memasuki tahun 1990-an, politik dalam negri Iran diwarnai oleh nuansa gelora demokratisasi. Setelah terpilihnya Khatami sebagai presiden (1997-2005), ia menunjuk Massoumeh Ebtekar, sebagai wakil presiden dan kepala Departemen Lingkungan Hidup (DOE). Ini merupakan yang pertama bagi perempuan bisa menduduki posisi setinggi wakil presiden di

[188] Ibid.,309.
[189] Jamileh Kadivar, 126.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Republik Islam Iran setelah revolusi. Zahra Shojaee ditunjuk sebagai penasehat presiden dan kepala Pusat Partisipasi Perempuan. Zahra Rahnavard sebagai penasihat politik, Sohayla Jelodarzade sebagai penasihat urusan tenaga kerja, dan Jamileh Kadivar sebagai penasihat pada media pers dan massa.[190]

Secara khusus, perempuan pada pemerintahan Khatami dituntut untuk dimasukkan dalam posisi pembuatan kebijakan.[191] Perempuan bisa menjabat sebagai Gubernur Daerah dan Regional. Di bawah pemerintahan reformis Khatami (1999-2005) dua perempuan terpilih sebagai gubernur wali kota. Zahra Nejadbahram, terpilih sebagai wakil gubernur Teheran, dan Parvaneh Mafi sebagai wakil gubernur Shemiranat county di provinsi Teheran.[192]

Terpilihnya kembali Khatami pada tahun 2001, banyak yang berharap bahwa Khatami akan mencalonkan perempuan sebagai menteri kabinet. 163 anggota reformis dari Parlemen ke-6 menandatangani surat resmi yang mengungkapkan harapan ini. Namun, tidak ada perempuan dalam daftar calon kabinet Khatami yang disampaikan kepada parlemen. Hal ini dikarenakan keputusan tersebut telah di tentang oleh anggota ulama konservatif sehingga ia harus menarik diri dari membuat keputusan seperti itu. Khatami mengumumkan bahwa ia tidak mau mengambil risiko

---

[190] Khadijeh Aryan, "The Boom in Women's Education", *dalam Women, Power and Politics in* 21st Century Iran, ed. Tara Povey, (New York: Routledge Tylor and Francis Group, 2012), 43.
[191] Ali Akbar Mahdi, "Perceptions of Gender Roles Among Female Iranian Immigrants in the United States",*dalam Women, Religion and Culture in Iran,* ed. Sarah Ansari and Vanessa Martin, (New York: Routledge Tylor and Francis Group, 2002),217.
[192] Jamileh,132.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang akan membuat para ulama konservatif marah dan ditakutkan akan mengeluarkan fatwa yang menyebut pemerintahannya tidak Islami.[193] Sejak saat itu, sampai di akhir pemerintahannya benar-benar harus takluk dibawah ulama konservatif yang selama ini banyak yang menentang kebijakannya.

Setelah Khatami jatuh dan digantikan oleh Ahmadinejad sebagai persiden, Iran mengalami masa pembalikan kebijakan seperti yang terjadi pada awal-awal revolusi. Selama kampanye pertama dan kedua presiden Ahmadinejad (2005 dan 2009), tidak ada gerakan untuk memasukkan perempuan dalam posisi politik dan manajerial yang lebih tinggi. Demikian juga tidak ada program untuk keterlibatan perempuan dalam pengambilan posisi keputusan. Karena Penekanan utamanya adalah tentang peran perempuan dalam keluarga.[194]

Hal ini terlihat, dengan adanya perbedaan di dalam anggota parlemen perempuan. Utamanya anggota parlemen perempuan ke-6, 7, dan 8. Ada beberapa anggota parlemen perempuan di Parlemen ke-6 (2000-2004), dan kebanyakan anggota tersebut memilih untuk memperjuangkan hak-hak perempuan. Meskipun mereka menghadapi banyak tantangan tapi mereka berusaha keras untuk mempromosikan kesetaraan gender di seluruh lembaga negara. Mereka juga memutuskan bahwa dalam

[193] Ibid., 126.
[194] Ibid., 125.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemilihan parlemen harus memiliki sistem kuota di mana 30% dari calon anggota parlemen harus perempuan dan hal tersebut telah disepakati.[195]

Di parlemen ke-7 (2004-2008), kaum konservatif merupakan mayoritas dengan kursi 54%, sedangkan kaum reformis berada di minoritas dengan 13% kursi. Hal tersebut menjadi kekalahan bagi kaum reformis terutama karena fakta bahwa Dewan Wali mendiskualifikasi banyak kandidat reformis. Akibatnya,di parlemen ini semua anggota parlemen perempuan juga konservatif dan hanya ada satu anggota parlemen perempuan yang reformis yakni Mehrangiz Morovati. Karena merasa terisolasi, ia menjadi sulit untuk mendorong reformasi lebih lanjut dari undang-undang dan peraturan yang mendukung perempuan. Dengan demikian, gerakan reformasi melemah ketika mereka kehilangan parlemen reformis untuk kaum konservatif.

Perbedaan antara anggota parlemen perempuan yang ke-6 dan ke-7, mayoritas anggota parlemen perempuan di Fraksi Perempuan Parlemen ke-6 memiliki gelar universitas dan mereka berkomitmen untuk membahas isu-isu hak-hak perempuan. Sebaliknya, sebagian besar Anggota parlemen perempuan di Parlemen ke-7 adalah anggota Basij (Mobilisasi)[196], yakni kelompok sosial yang berasal dari pasukan main hakim sendiri pasca-revolusioner yang berkampanye untuk Ahmadinejad pada tahun 2005.

---

[195] Elaheh Koolaee,143.

[196] Basij (Mobilisasi) adalah milisi sukarelawan paramiliter didirikan setelahRevolusi tahun 1979 yang pada awalnya disebut 'Mobilisasi Kaum Tertindas'. Dalam tahun-tahun terakhir Basij berfungsi sebagai kekuatan tambahan dalam keamanan internal dan penegakan hukum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Parlemen ke-7 mengabaikan konsep kesetaraan dan anggota parlemen perempuan yang baru tidak menantang anggota parlemen konservatif laki-laki untuk mengabaikan isu-isu perempuan. Mereka berpendapat bahwa prioritas perempuan harus reproduksi, tugas perempuan adalah didalam rumah dan bahwa partisipasi perempuan di ruang publik bukanlah prioritas. Dengan demikian, mereka telah diusulkan untuk mengurangi jam kerja perempuan sehingga mereka bisa menghabiskan lebih banyak waktu di rumah.

Dalam kabinet kedua Ahmadinejad (2009) anggota parlemen perempuan telah berfokus untuk menegakkan kode pakaian Islam perempuan. Dan hal tersebut telah mensyaratkan konfrontasi konstan terhadap kaum perempuan, bahwa Jilbab Islam dalam definisi kelompok konservatif harus digunakan, apabila kaum perempuan melanggar, maka Polisi akan memaksa dan menghukum perempuan.[197]

Dengan demikian terdapat jumlah penurunan anggota parlemen perempuan di parlemen ke-8, dibandingkan dengan Parlemen ke-6 dan 7. Kurangnya komitmen terhadap isu-isu hak-hak perempuan di Parlemen ke-7 memiliki dampak negatif pada kehadiran perempuan di lembaga penting ini. Berdasarkan dominan konservatif yang berkuasa, anggota parlemen perempuan dalam periode ini difokuskan pada isu-isu budaya dan peran perempuan terbatas dalam lingkup publik.

[197] Elaheh Koolaee, 145.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Meskipun demikian, pada tahun 2005, 11% dari semua perwakilan dewan kota terpilih adalah perempuan. Di babak kedua pemilihan dewan lokal, jumlah kandidat perempuan meningkat, yang merupakan indikasi yang jelas dari manifestasi umum dari potensi perempuan di daerah ini.[198] Saat Ahmadinejad menjabat pada 2009, ia pernah menyatakan bahwa perempuan bisa berdiri untuk pemilihan lokal dan regional di beberapa provinsi perempuan akan ditunjuk sebagai gubernur. Namun hal tersebut dikritik oleh sejumlah ulama yang menyatakan tidak setuju terhadap kebijakan Ahmadinejad.[199]

Meskipun partisipasi perempuan dalam pemerintahan Ahmadinejad kembali terbatas, namun perempuan tidak pernah berhenti untuk berpartisipasi dan tetap bertekad untuk melanjutkan perjuangan mereka dan menantang persepsi yang keliru untuk mengamankan tempat yang selayaknya dalam perjuangan kekuasaan politik di Iran.

Kehadiran perempuan di bidang eksekutif bahkan lebih terbatas. Perempuan dilarang menjadi presiden, bahkan tempat untuk menjadi mentri oleh perempuan belum ada sama sekali setelah revolusi. Baru ada pada tahun 2009 ada satu wakil perempuan yang menjadi mentri kesehatan yakni Marzieh Vahid Dastjerdi memenangkan persetujuan sebagai menteri kesehatan.[200]

---

[198] Hesmat Sadat Moinifar, Participation of Women, 31.
[199] Jamileh Kadivar,132.
[200] Vakil, 18

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Peran Perempuan Iran di Bidang Sosial dan Publik

Terbentuknya Republik Islam Iran menjadikan partisipasi perempuan dalam ruang publik sangat dinamis sekali. Pembentukan negara teokratis tidak menghasilkan larangan mutlak bagi perempuan dari kegiatan sosial, sehingga banyak kebijakan mereka yang berhubungan dengan partisipasi perempuan, ini di satu pihak, di pihak lain ada berbagai tekanan datang dariulama konservatif yang mendukung perempuan untuk tugas rumah tangga dan membesarkan anak. Kendati demikian, perempuan masih terlibat dalam berbagai bentuk kegiatan seperti pendidikan, kegiatan sosial, dan ekonomi.

1. Perempuan di bidang pendidikan

Pendidikan adalah salah satu cara yang paling penting untuk pemberdayaan perempuan dibidang pengetahuan, keterampilan dan kepercayaan diri yang diperlukan untuk berpartisipasi penuh dalam sebuah proses pembangunan.[201] Pendidikan oleh negara Islam Iran dianggap sebagai strategi penting untuk integrasi perempuan ke dalam proses nasional. Di rumah, ibu adalah pemancar nilai-nilai Islam dan budaya politik kepada anak-anak. Sedangkan dalam masyarakat, perempuan sebagai penghubung antara keluarga dan bangsa yang harus berpartisipasi dalam kedua proses tersebut.[202]

Ayatollah Khomeini menyatakan dengan tegas perlunya mendidik perempuan. Ia memberikan dukungan konsisten untuk pendidikan

[201] Roksana Janghorban, Ali Taghipour, dkk. "Women's Empowerment in Iran: A review Based on the Related Legislation", dalam *Global Journal of Health Science*, Vol.6, No.4, 2014, 227.
[202] Paidar,313.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perempuan dengan menyatakan perempuan harus berusaha untuk mencari pengetahuan dan kesalehan. Pengetahuan bukanlah monopoli kelompok tertentu tetapi milik semua, dan itu adalah tugas dari semua laki-laki dan perempuan untuk memperoleh pengetahuan.[203]

Sistem pendidikan di Iran adalah tanggung jawab dari tiga kementerian, yakni Departemen Pendidikan, Departemen Ilmu, Riset dan Teknologi untuk universitas non-medis dan Departemen Kesehatan dan Pendidikan Kedokteran untuk disiplin medis.

Menurut konstitusi 1979, republik Islam Iran memfokuskan pada pendidikan dan pelatihan gratis untuk semua orang di semua tingkat serta fasilitasi dan perluasan pendidikan tinggi.[204] Sistem pendidikan secara keseluruhan sangat terpusat dan pemerintah memainkan peran penting dalam menjalankan sistem ini melalui perumusan kebijakan pendidikan.[205] Meskipun sikap pemerintah terhadap Pendidikan positif bagi perempuan, namun, pemerintah memiliki kebijakan dan strategi yang berbeda dalam Pendidikan mereka.

Jurusan yang dianggap tidak cocok untuk perempuan tidak boleh diambil, demikian masuknya siswa perempuan untuk bidang-bidang tertentu di perguruan tinggi dibatasi melalui penetapan kuota. Kuota ini menyatakan bahwa dalam berbagai disiplin ilmu jumlah siswa perempuan antara 10 sampai 20% dan 30% untuk disiplin ilmu medis.

---

[203] Vakil, 54.
[204] Roksana Janghorban, *Women's Empowerment in Iran*, 227.
[205] Khadijeh Aryan, The Boom in Women's Education, 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Begitu juga, siswa perempuan juga tidak diizinkan untuk masuk diberbagai tempat seperti tempat kursus.[206]

Perubahan kurikulum di perkenalkan termasuk instruksi lebih religious. Bahasa Arab diwajibkan di sekolah menengah, bahasa Inggris tidak boleh diajarkan di tingkat sekolah dasar dan kewajiban pengajaran sejarah Islam dan revolusi Islam. Singkatnya, dosis besar ideologi Islam disuntikkan ke kurikulum sekolah dan universitas.[207]

Adanya segregasi (pemisahan) dalam sistem pendidikan yang dimulai pada Maret 1979. Hal ini diikuti oleh pelarangan kelas campuran di lembaga pendidikan swasta dan kemudian, upaya untuk segregasi kelas di universitas dan politeknik. Akibatnya tejadi kekurangan guru dan menyebabkan murid perempuan di sekolah campuran dikeluarkan. Dengan demikian banyak gadis-gadis muda putus pendidikan, utamanya di daerah pedesaan.

Lembaga Pendidikan dilarang menerima siswi dan guru perempuan yang tidak memakai hijab. Seragam Islam wajib bagi gadis-gadis sekolah yang berumur lebih dari 9 tahun. Guru perempuan dan administrator sekolah diancam dipecat oleh Departemen Pendidikan dengan pemecatan jika mereka tidak memakai hijab.[208]

Pada akhir tahun 1980-an, kebijakan bagi perempuan untuk pengambilan jurusan di pendidikan tinggi lebih longgar. Dengan demikian perempuan mengalami kemajuan besar di perguruan tinggi.

[206]Ibid., 41.
[207] Paidar,315
[208]Ibid., 317.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sejak dekade pertama abad kedua puluh satu jumlah mahasiswa perempuan yang memasuki universitas dan lulus dari universitas di tingkat sarjana telah melampaui dari mahasiswa laki-laki.

Sejak 1980-an kebijakan pemerintah telah mendorong segmen besar masyarakat untuk masuk ke pendidikan tinggi. Ini termasuk alokasi kuota khusus bagi orang-orang yang memainkan peran penting di perang Iran-Irak (1980-1988), seperti orang-orang cacat akibat perang, mantan tahanan perang dan keluarga para syuhada. Ada juga kuota untuk atlet Olimpiade dan orang-orang yang telah berprestasi dalam kontes ilmiah. Mereka diberi kesempatan untuk masuk universitas tanpa melakukan tes sebagai hadiah untuk prestasi mereka.[209]

Perempuan sering menggunakan universitas sebagai sarana untuk menjauhi kendala dan keterbatasan yang ditetapkan pada mereka oleh keluarga mereka yang memegang tradisi yang konservatif. Pendidikan tinggi menjadi pembenaran yang sah bagi perempuan untuk melangkah di luar keluarga, yang memungkinkan mereka untuk menjauh dari peran reproduksi wajib dalam keluarga, atau untuk menghindari pernikahan dini.

Tahun I985, Kompleks Ilmu Agama untuk perempuan dibuka di Qom. Kompleks ini dikenal sebagai *The Society of Zahra* (Jam makan ol-Zahra), yang menerima lebih dari 500 siswa perempuan. Itu adalah

[209]Aryan, 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

inisiatif dari Ayatollah Khomeini sendiri dan didirikan oleh asisten pribadinya. Salah satu pendirinya adalah Ayatollah Jannati yang menjelaskan bahwa siswa perempuan diharapkan menjadi akrab dengan alfabet politik yang tidak dapat dipisahkan dari pemerintahan Islam dan Islam itu sendiri.[210]

Rencana Undang-Undang (RUU) pendidikan luar negeri yang disahkan pada tahun 1985, menyebutkan bahwa siswa perempuan yang sudah menikah dilarang mengambil pendidikan di luar negeri kecuali mereka ditemani oleh suami mereka. Pembatasan ini tidak berlaku untuk pria menikah.

Pada tahun 1987 dewan baru dibentuk yakni Dewan Perempuan Sosial dan Budaya yang didirikan di bawah Dewan Tinggi Revolusi Kebudayaan. Dewan ini membela hak-hak perempuan dan menghapus beberapa pembatasan terhadap pendidikan perempuan yang ditentukan sebelumnya oleh Dewan Tinggi Revolusi Kebudayaan.[211]

Selama periode presiden Hashemi Rafsanjani (1989-1997) perempuan diberi kesempatan baru untuk memasuki pendidikan dan berpartisipasi dalam masyarakat.[212] Didirikan Kantor Penasihat Presiden untuk Urusan perempuan yang bertanggung jawab untuk isu-isu perempuan dan mempromosikan mereka untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Pada tahun 1993 banyak pembatasan lain pada

[210] Parvin, 320.
[211] Sedghi, 236.
[212] Bahramitash, 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendidikan perempuan dihapus dan sebagai hasilnya jumlah mahasiswa perempuan meningkat di banyak program studi.[213]

Pada Mei 1989 dinyatakan bahwa pembatasan masuknya perempuan ke geologi dan pertanian dicabut. Segera setelah itu diumumkan bahwa pembatasan kuota masuknya perempuan dihapuskan sama sekali di bidang medis, para medis dan beberapa prodi di bidang teknik. Ini adalah hasil dari lobi Dewan Sosial dan Budaya Perempuan yang mencerminkan sifat Republik Islam pada perempuan.

Selama masa presiden Mohammad Khatami (1997-2004), prioritas khusus kebijakan untuk kesempatan perempuan diperluas. Perempuan yang masuk pendidikan tinggi memiliki skala yang besar, yakni 38,2%. Persentase perempuan dalam pendidikan tinggi melebihi dari era pra-revolusioner. Sedangkan tahun 2000 partisispasi perempuan dalam pendidikan tinggi meningkat menjadi 47,2%. Pembatasan secara bertahap telah dihapus, yang berdampak pertumbuhan partisipasi perempuan dalam pendidikan tinggi pada tingkat yang luar biasa. Pada tahun 2000, 60% dari siswa yang masuk perguruan tinggi adalah perempuan.[214]

Jumlah masuknya perempuan yang lebih tinggi dalam pendidikan telah membuat khawatir para pembuat kebijakan dari ulama konservatif yang menyebabkan berbagai perdebatan kontroversial

[213]Aryan,41.
[214]Aryan, 42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam pemerintahan dan di media-media. Beberapa kelompok konservatif mengadakan seminar dan konferensi untuk mengkritik kehadiran perempuan yang lebih tinggi di tingkat pendidikan. Akibatnya, Departemen Kesehatan dan Pendidikan Kedokteran menciptakan sistem kuota membatasi masuknya siswa perempuan untuk beberapa program, dan mengalokasikan tempat universitas untuk perempuan muda hanya di kota-kota asal mereka. Keterbatasan ini telah mengangkat banyak kritik, sehingga pilihan perempuan telah berkurang secara signifikan.

Perhatian utama dari beberapa kelompok konservatif adalah bahwa siswa perempuan akan menggantikan siswa laki-laki dalam penempatan pekerjaan tradisional didominasi laki-laki. Mereka takut bahwa ini akan mengubah norma-norma dan nilai-nilai yang ditetapkan dan dapat menyebabkan laki-laki tinggal di rumah dan perempuan yang bekerja di luar rumah.

Sehingga sejak tahun 2005 pemerintah yang didominasi oleh kelompok konservatif telah mengadopsi strategi yang menekankan peran reproduksi perempuan untuk menikah, membentuk keluarga dan menjadi ibu rumah tangga yang baik.[215] Kemudian tahun 2007-2008 negara memberlakukan sistem kuota, menawarkan 60 persen dari

[215]Ibid., 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tempat universitas untuk siswa laki-laki dan 40 persen untuk siswa perempuan.[216]

2. Kegiatan sosial perempuan Iran

Di bawah pemerintahan Islam, perempuan juga memainkan peran penting dalam kegiatan sosial. Ada salah satu jamaah perempuan yang dibangun setelah revolusi, untuk membentengi mereka dari budaya Barat yang menurut mereka telah merusak budaya perempuan Iran. Adanya pemimpin agama perempuan dari kelompok Islam, dimana para pemimpin agama perempuan telah berjuang untuk menemukan peran diri mereka sendiri di tempat yang lebih tinggi dari masyarakat Islam.

Daerah pertama bagi aktivitas dan pengaruh dari para pemimpin perempuan adalah pelatihan keagamaan yang dipemimpin oleh mereka. Pemimpin agama perempuan dianggap penting di Republik Islam, dan kesempatan yang cukup disediakan bagi perempuan untuk dilatih sebagai pemimpin agama. Namun, ada batasan bagi pemimpin agama perempuan, yakni tidak mengizinkan mereka untuk mengeluarkan dekrit keagamaan.[217]

kelompok perempuan keagamaan (Islamis) kebanyakan hidup di daerah Teheran Selatan. Seperti kelompok keagamaan yang biasa mengadakan pertemuan keagamaan antar perempuan. Pertemuan tersebut biasa disebut *Jalaseh*, dan anggota yang ikut dalam pertemuan

[216] Zahra Nejadbahram, "Women and Employment", *dalam Women, Power and Politics in* 21st Century Iran, ed. Tara Povey, (New York: Routledge Tylor and Francis Group, 2012), 79.
[217] Parvin, 308.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut dianjurkan untuk memakai tampilan dengan jilbab yang tepat menurut mereka, dengan menggunakan cadar hitam dan stoking hitam buram.[218]

Pertemuan-pertemuan keagamaan biasanya diadakan secara terbuka di rumah-rumah, dan sering diputar dari rumah ke rumah secara keliling. Atau ada yang diadakan secara tetap yang biasanya di laksanakan di dalam masjid atau lembaga keagamaan yang biasa disebut Husainiyya. Didalam pertemuan itu, biasanya ada kegiatan mendistribusikan dana amal untuk orang yang kurang beruntung di lingkungan mereka.[219]

Ada pula praktek penyembuhan religius populer seperti yang dilakukan pada kelompok perempuan *Zeynabiyeh* yang bisa diartikan sebagai bentuk organisasi politik integral dari proyek pemerintah dan salah satu teknik pengetahuan, kekuasaan dan subjectifikasi melalui otoritas sosial yang berusaha untuk mengelola dan mengontrol kehidupan individu.[220]

Area lain dari kegiatan sosial perempuan adalah kesejahteraan sosial. Pendidikan dan kesehatan amal (Moaseseh Davazdahe Farvardin) yang dijalankan oleh beberapa kolektif perempuan yang rata rata berasal dari keluarga ulama dan terhubung dalam lingkaran

---

[218] Azam Taurat, The Politicization of Women's Religious Circles in Post-revolutionary Iran, *dalam Women, Religion and Culture in Iran,* ed. Sarah Ansari and Vanessa Martin, (New York: Routledge Tylor and Francis Group, 2002),144.
[219] Ibid., 149.
[220] Azam Torab, *Performing Islam: Gender and Ritual in Iran,* (ed. Valentine Moghadam) (Leiden: Koninklijke Brill, 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepemimpinan Islam, termasuk Farideh Mostafavi putri Ayatollah Khomeini. Mereka berlari untuk kelas melek huruf dan kelas menjahit untuk perempuan dan dibangun klinik kesehatan untuk perempuan. Perempuan yang menjalankan organisasi sebelumnya telah dididik di sekolah-sekolah perempuan Islam sebelum revolusi atau mereka yang telah menerima pendidikan Islam di rumah.[221]

Di bawah pemerintahan Khatami, Pusat Partisipasi Perempuan menekankan pentingnya partisipasi perempuan di ranah publik. Salah satu fitur yang menonjol darimasa reformasi adalah pembentukan berbagai organisasi non-pemerintah (LSM) oleh relawan perempuan di berbagai bidang. LSM ini dipromosikan perempuan dalam mencari peluang yang diciptakan bagi mereka untuk mencari pekerjaan baru dan memasuki wilayah baru dari kegiatan sosial. Interaksi sosial dan perdebatan di kalangan kelompok yang berbeda dalam masyarakat, termasuk masyarakat dan berbagai perempuan asosiasi, memiliki dampak yang besar pada pandangan dari banyak negarawan dan otoritas.[222] Pada tahun 1997 hanya ada 67 LSM Perempuan, namun pada tahun 2005 angka ini meningkat menjadi 337.

3. Kegiatan ekonomi perempuan Iran

Kebijakan Republik Islam Iran tentang Ketenagakerjaan Perempuan, telah menekankan penyediaan fasilitas yang diperlukan untuk memanfaatkan kemampuan perempuan berpendidikan dan

[221] Parvin, 309.
[222] Khadijeh Aryan, 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perempuan spesialis. Dalam hal tersebut, mereka menekankan bahwa teknis pendidikan, kejuruan, dan kesempatan kerja yang harus sesuai untuk perempuan dalam pencari nafkah keluarga.[223] Namun, perempuan harus menghadapi tantangan kerja yang muncul dari berbagai tekanan yang berbeda dan sering bertentangan dengan ideologi, politik dan ekonomi di negara Islam.

Negara pasca-revolusioner, harus menyajikan kebijakan ketenagakerjaan bagi perempuan yang akan berbeda dari sebelum revolusi dan Islami. Selain itu, tenaga kerja perempuan adalah masalah yang sensitif bagi pemerintah Islam karena berpotensi menjadi ancaman serius bagi peran laki-laki sebagai pencari nafkah di dalam keluarga.[224] Sumber lain dari kecemasan dalam kaitannya dengan pekerjaan perempuan adalah tentang hilangnya keutamaan ibu bagi perempuan. Ayatollah Khomeini sangat sensitif terhadap ancaman ini.[225]

Perempuan terus-menerus diingatkan oleh para pemimpin Islam tentang tugas utama mereka menjadi perempuan adalah untuk menjaga rumah, membesarkan anak dan menjadi ibu yang baik sehinga perempuan tidak harus mencari pekerjaan yang dapat menganggu peran mereka dalam keluarga. Laki-laki tidak harus mengharapkan perempuan untuk menambahkan pendapatan untuk tugas mereka.

---

[223] Leyla Sarfaraz, *Women's Entrepreneurship in Iran: Role Models of Growth-Oriented Iranian Women Entreprenerurs*, (Shiraz Iran: Springer International Publishing, 2017),7.
[224] Roksana Janghorban, Ali Taghipour, dkk. *Women's Empowerment in Iran: A review Based on the Related Legislation*, h.227
[225] Zahra,81.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perempuan dapat terlibat dalam kegiatan sampingan seperti merajut, menjahit bahkan penelitian dan penulisan.[226]

Kebijakan awal Islamisasi tentang pemisahan gender mengakibatkan partisipasi tenaga kerja perempuan menurun drastis. Serta mengakibatkan banyak perempuan kehilangan pekerjaan mereka. Karena pemerintah Islam menganjurkan untuk tinggal di rumah dan mengembangkan kesadaran Islam serta praktek kesopanan.[227]

Meskipun banyak perempuan yang sudah sampai pada pendidikan tingkat tinggi, namun sistem pendidikan tidak menyiapkan perempuan muda untuk berpartisipasi dalam posisi pengambilan keputusan atau kepemimpinan politik dan kekuasaan.[228] Sehingga perempuan yang memiliki pendidikan tinggi belum tentu akan mencapai pekerjaan yang tinggi pula. Karena ketika perempuan melamar pekerjaan yang tinggi terutama dalam pekerjaan formal, mereka jarang mendapat tempat sebagai posisi tinggi seperti menjadi kepala departemen, dekan fakultas, atau rektor universitas. Perempuan juga masih mengalami diskriminasi dalam hal upah dan promosi pekerjaan.[229]

Tahun-tahun awal pasca-revolusioner sejarah menyaksikan sejumlah serangan dari pemerintah Islam terhadap tenaga kerja perempuan, yakni pembersihan di tempat-tempat kerja. Target pertama dan terpenting adalah sektor publik, di mana kaum intelektual dari era

---

[226] Parvin, 324.
[227] Hamideh Sedghi, *Women and Politics in Iran: Veiling, Unveiling and Reveiling,* 226
[228] Aryan, 49.
[229] Caroline M. Brooks, *Moment's of Strength : Iranian Women's Rights and the 1979 Revolution*,50

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pahlevi telah menyebar. Panggilan Ayatollah Khomeini pada tahun 1980 untuk Revolusi Administrasi, yakni operasi pembersihan termasuk pengenaan hijab pada karyawan perempuan, pemisahan pekerja laki-laki dan perempuan, membungkam atau pemecatan karyawan non-Islam, menggantikan karyawan sekuler di posisi kunci dengan simpatisan Islam, dan menginstal masyarakat Islam di semua organisasi negara sebagai instrumen kontrol dan Islamisasi.[230]

Sejumlah besar perempuan dipecat karena memprotes pengenaan wajib hijab. Tentara dan polisi perempuan dipecat, sehingga kebanyakan perempuan sekuler yang bekerja terpaksa meninggalkan pekerjaan mereka.[231] Departemen Keuangan telah melarang perekrutan perempuan sejak 1979. Pembenaran disediakan oleh seorang pejabat adalah bahwa hal itu tidak diinginkan untuk perempuan yang akan dikirim pada misi kerja, dan bahwa itu adalah melawan Shariat bagi perempuan untuk duduk dengan laki-laki dalam pertemuan.

Pusat-pusat industri dan pabrik-pabrik, temuan survei menunjukkan kebijakan perekrutan yang benar-benar sewenang-wenang. Sementara ada satu pabrik yang telah berhenti merekrut perempuan sejak tahun 1985, yang lain merekrut perempuan untuk jenis pekerjaan yang sama. Kebijakan yang akan dilakukan adalah

[230] Parvin, 330.
[231] Bahramitash, 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa perempuan bisa direkrut, namun prioritas harus diberikan kepada laki-laki.[232]

Tetapi setelah pemeritahan Islam merasa perlunya untuk penekanan perumusan kebijakan yang lebih sistematis tentang tenaga kerja perempuan. Unsur-unsur utama dari kebijakan ini termasuk penekanan pada pentingnya ideologi perempuan pelatihan untuk profesi tertentu seperti pendidikan, kesejahteraan, kesehatan dan adaptasi kerja perempuan untuk kebutuhan keluarga Islam. Undang-undang pertama dalam hal ini adalah konsep usulan pelatihan kebidanan yang telah disampaikan kepada Majles pada tahun 1981. Proposal tersebut termasuk membangun rumah sakit bersalin lebih dan pusat-pusat pelatihan kebidanan dan pelatihan 20.000 bidan.[233]

Pada tahun 1982 sebuah rancangan undang-undang tenaga kerja disampaikan Majles oleh menteri urusan tenaga kerja dan sosial. Salah satu isinya adalah perempuan yang sudah menikah dapat mendapatkan pekerjaan apabila tidak mengganggu tanggung jawab keluarga mereka, dan sudah mendapat izin dari suami. Tapi di sisi lain, suami tidak dapat menarik izin yang tidak masuk akal, jika perempuan itu dalam pekerjaan sebelum menikah telah membuat perjanjian yang jelas dengan calon suami bahwa dia bermaksud untuk terus bekerja setelah menikah, maka suami tidak memiliki alasan yang sah untuk mencegah dia dari bekerja.

[232] Parvin, 333.
[233] Parvin, 326.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

UU Ketenagakerjaan diubah pada tahun 1987 untuk memasukkan klausul yang berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan perempuan. Undang-undang baru melarang tercatat beban berat dan mendapatkan pekerjaan yang berbahaya bagi pekerja perempuan. Perempuan dilarang shift malam kecuali dalam kaitannya dengan pendidikan, kesehatan dan pekerjaan medis. Bersalin cuti ditentukan sebagai sembilan puluh hari, setengah dari yang harus diambil setelah kelahiran anak.[234]

Pada saat Rafsanjani menjabat sebagai presiden (1989-1997), ia berbicara kepada Majelis agar mendorong perempuan untuk berpartisipasi dalam profesi seperti mengajar dan menjadi dokter yang akan mengakibatkan mereka membantu perempuan lain. Hal tersebut juga disampaikan oleh Azam Taleghani, seorang perempuan yang berada di wakil Majelis. Ia menuntut pelatihan dokter lebih lanjut kepada perempuan untuk mengobati pasien perempuan.[235]

Pada tahun 1990-an perempuan ditantang oleh realitas ekonomi, sehingga lebih banyak perempuan memasuki tenaga kerja pasar dan ekonomi informal. Tapi banyak perempuan terus tetap bertanggung jawab untuk bekerja di rumah. Pada tahun 1992 pembentukan Dewan Sosial dan Budaya Perempuan mempromosikan masuknya perempuan

[234] Ibid., 330.
[235] Bahramitash, 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam ruang publik. Sehingga lebih banyak perempuan mulai memasuki pasar tenaga kerja.[236]

Pada puncak gerakan reformasi di bawah Presiden Khatami, Beberapa perempuan telah menduduki posisi tinggi seperti wakil presiden, wakil menteri, gubernur daerah dan wakil gubernur regional. Pada periode ini lebih banyak perempuan memiliki akses ke pendidikan dan pekerjaan serta peluang diciptakan bagi perempuan untuk berpartisipasi dan memberikan kontribusi pada kehidupan sosial-ekonomi dan politik negara.

Pada tahun 2002, meskipun kondisi politik dan pasar menjadi lebih ramah untuk tenaga kerja partisipasi angkatan perempuan, namun banyak perempuan memilih dan mengikuti jejak budaya mereka yakni untuk tetap tinggal di rumah daripada berpartisipasi dalam pasar.[237] Hal ini terlihat pada sebuah survei sampel dari 250 perempuan yang telah menikah dan berpendidikan, yang dilakukan di Teheran pada 2002. Dalam survei ini, 20% dari perempuan dipekerjakan dan sisanya adalah ibu rumah tangga. Saat ditanya "jika anda dan suami anda memiliki gaji yang sama, tetapi salah satu dari kalian diharuskan untuk berhenti dari pekerjaan karena dikhawatirkan mengurangi kehadiran anda di rumah. Apa yang anda pilih?". Rata-rata 78% dari respon memilih untuk tetap tinggal di rumah dan keluar dari pekerjaan, sedangkan 17% mengahrapkan suami yang berhenti bekerja.

[236] Ibid., 26.
[237] Hamideh Sedghi,231.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal ini dikarenakan hukum adat dalam masyarakat Iran yang telah menghambat kemajuan perempuan dalam mencapai posisi tinggi dalam pekerjaan. Mereka percaya bahwa pekerjaan hanya boleh dilakukan oleh laki-laki dan perempuan tidak diperbolehkan mencapai posisi yang lebih tinggi dari laki-laki. Oleh karena itu, kesempatan kerja, terutama di posisi tinggi dibuat khusus untuk laki-laki. Perempuan juga terpinggirkan di posisi ini karena budaya yang dominan tidak menerima laki-laki bekerja di bawah otoritas perempuan dan sebagai hasilnya banyak laki-laki merasa sulit untuk bekerja di bawah manajer dan kepala departemen perempuan.[238]

Meskipun ada sebagian perempuan yang bekerja di pemerintahan, Namun, kehadiran perempuan dalam posisi yang tinggi pada pekerjaan tetap terbatas pada minoritas kecil. Partisipasi perempuan di tingkat yang lebih tinggi dari kerja tidak meningkat lebih dari 2,7 %. Sejak tahun 2005, di bawah Presiden Ahmadinejad angka ini telah menurun menjadi 2%. Permerintah lebih menekankan kepada peran perempuan dalam keluarga. undang-undang baru telah mendorong perempuan untuk bekerja paruh waktu dan mengambil pensiun dini setelah dua puluh tahun pelayanan.[239]

Selanjutnya, mayoritas perempuan bekerja di sektor ekonomi informal yang meliputi berbagai kegiatan ekonomi, mulai dari

[238] Zahra Nejadbahram, 80.
[239] Ibid., 84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wirausaha, bisnis keluarga, usaha mikro dan bekerja rumahan dari berbagai macam, dan ini tidak memerlukan izin dari suami.

Pada hari-hari awal Republik Islam banyak perempuan kehilangan pekerjaan mereka. Meskipun terbatas pada dinding rumah tangga, beberapa perempuan memproduksi kegiatan yang bisa menghasilkan pendapatan, sehingga mereka bergabung dengan jajaran pekerja mandiri di sektor informal. Lainnya pensiun dari kehidupan publik dan mengabdikan waktu mereka sebagai istri dan ibu.[240]

Rata-rata perempuan yang telah kehilangan pekerjaan telah memulai bisnis sendiri di dalam rumah. Perempuan bisa menghasilkan pendapatan dengan bekerja sebagai pembantu rumah tangga di pusat-pusat perkotaan, sebagai penenun karpet dan buruh di bidang pertanian dan peternakan di daerah pedesaan, serta menjahit dan menenun.[241]

Ada yang membuka praktik aerobik, yoga, meditasi,dan kelas pijat, serta membuka salon rambut di rumah mereka. Banyak perempuan mengalokasikan ruang hidup mereka untuk menjual pakaian atau barang-barang rumah tangga, ada juga yang melakukan perjalanan ke negara-negara tetangga untuk membeli barang untuk dijual. Mereka yang bisa berbahasa Inggris dan Perancis bisa memberikan les privat di rumah.[242]

---

[240] Roksana Bahramitash, Atena Sadegh and Negin Sattari, *Low-Income Islamist Women and Social Economy in Iran*, (New York: Palgrave Macmillan, 2018), 19.
[241] Parvin, 331.
[242] Sedghi, 238.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada tahun 2007, Masyarakat Ekonomi Perempuan Iran didirikan dengan nama Dewan Perdangangan Perempuan Pedagang di Otaghe Iran. Tujuannya adalah untuk meningkatkan profil perempuan dalam perdagangan internasional dan bekerja sama dengan para pedagang perempuan di masyarakat mayoritas Muslim lainnya. Mereka dalam proses mendirikan pusat untuk konsultasi, perdagangan dan pendidikan, dan menciptakan kelompok kerja dalam industri, perdagangan, transportasi, informasi, pertambangan, pertanian dan pariwisata. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kontribusi ekonomi perempuan. Mereka mendirikan website dan mempublikasikan jurnal untuk mendistribusikan informasi dan pengetahuan untuk wanita. Dewan ini memiliki 1.000 anggota aktif. Ini adalah dewan perempuan terbesar yang anggotanya terlibat dalam bidang ekonomi yang berbeda.[243]

Ahmadinejad membuat perubahan radikal dalam urusan lokal dan internasional, yang merugikan negara baik secara politik dan ekonomi. Pemerintah Eropa dan Amerika memberlakukan sanksi paling keras terhadap perekonomian Iran. Amerika Serikat menjadi musuh lanjutan ikatan diplomatik, dan menjadi lebih terbatas dengan mengorbankan kesejahteraan rakyat.[244] Kesulitan ekonomi sangat merugikan tenaga kerja perempuan dan selama kepresidenan Ahmadinejad, pangsa perempuan dari angkatan kerja turun dari 19,96% di 2005 menjadi

[243] Zahra Nejadbahram,87.
[244] Bahramitash,30

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

17,56% pada tahun 2008. Partisipasi Perempuan angkatan kerja menurun dari 20,14% pada tahun 2006 menjadi 15,5% pada tahun 2011. Antara 2009-2013 kepresidenan yang kedua Ahmadinejad dan ketika dampak sanksi ekonomi terhadap perekonomian negara mencapai puncaknya jumlah perempuan yang bekerja menurun 14,2%.[245]

Dari berbagai pembahasan ini, dapat dikatakan bahwa percampuran faktor agama dan budaya di Iran membentuk karakter tersendiri, sehingga tidak bisa dimiliki oleh negara manapun. Begitu pula dengan adanya gerakan perempuan di Iran yang terbentuk dan tidak bisa lepas dari kedua faktor tersebut. Adanya pengaruh ulama konservatif yang begitu dominan dalam sistem pemerintahan di Iran, juga berpengaruh pada gerakan perempuan Iran. Berbagai pembatasan kebijakan dari pemerintah Iran mengenai perempuan tidak membuat gerakan perempuan menjadi surut, namun mereka semakin gencar untuk mendapatkan kesetaraan hak di berbagai bidang. Sehingga perempuan Iran semakin tampak di wilayah publik, dan terus mengalami peningkatan di berbagai bidang.

[245] Leyla Sarfaraz, *Women's Entrepreneurship in Iran: Role Models of Growth-Oriented Iranian Women Entreprenerurs*, 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang "Dinamika Gerakan Sosial Perempuan Iran (Pra dan Pasca Revolusi 1979)" dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kondisi dan gerakan perempuan Iran sebelum revolusi mengalami berbagai perubahan. Gerakan perempuan Iran mulai terlihat setelah adanya wacana modenitas di Iran yang awali pada masa Dinasti Qajar dan diperluas pada masa Pahlevi. Gerakan perempuan pada masa Dinasti Qajar mulai terbentuk meskipun pergerakannya masih secara rahasia. Karena pada waktu itu, gerakan perempuan masih terbatas pada ranah keluarga. Pada masa Rezim Pahlevi, Iran dijadikan sebagai negara yang menjunjung tinggi budaya Barat, sehingga kaum perempuan pada masa Pahlevi mengalami penjungkir balikan budaya yang awalnya perempuan hanya bisa berada dalam ranah domestik mulai berani unjuk rasa dan menuntut keadilan serta kesetaraan dalam berbagai bidang. Perempuan dari golongan menengah keatas juga mulai mengikuti budaya Barat, utamanya dalam hal berpakaian. Pemerintahan Pahlevi terbilang sangat otoriter dan diktator, sehingga gerakan-gerakan perempuan Iran sebelum revolusi juga masih terbatas. Perkembangan perempuan mengalami perubahan seperti dalam hal pendidikan, namun di sisi lain, kediktatoran pemerintah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak mampu menjadikan perempuan berkembang menjadi lebih baik lagi. Setelah banyaknya organisasi perempuan yang sudah terbangun lalu dibubarkan, menjadi bukti bahwa pemerintah belum sepenuhnya membela hak-hak perempuan dalam hal kesetaraan, sehingga gerakan perempuan terus berlanjut setelah revolusi.

2. Kebijakan pemerintah Iran terhadap perempuan pasca revolusi sangat beragam. Ayatullah Khomeini yang merupakan tokoh sentral dalam revolusi Iran telah menjadikan Iran sebagai negara Islam yang menegakkan hukum Islam diatasnya. Sebagai seorang yang berpengaruh, keputusannya terhadap perempuan telah membuat kontrofersi di kalangan perempuan, pasalnya Iran sebelum revolusi adalah negara yang sudah terkontaminasi oleh budaya-budaya barat. Ada kelompok perempuan yang bersedia menerima peraturan baru yang dibuat Khomaeni, ada pula yang sangat menentang kebijakan Khomaeni utamanya mengenai perempuan. Golongan penentang Khomaeni biasa disebut perempuan sekuler, menurut mereka kebijakan seperti pemisahan antara laki-laki di tempat publik, wajib hijab bagi perempuan, serta peran mereka di ruang publik sangat membatasi gerakan mereka. Meskipun perempuan diperbolehkan terjun dalam peran publik, namun realitasnya banyak perempuan yang kehilangan peran mereka di ruang publik, seperti pemecatan karyawan perempuan, larangan menjadi hakim, serta batasan perempuan lainnya. Khomaeni lebih menekankan bahwa perempuan lebih baik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berada dalam ranah domestik keluarga. Semua keputusan pemerintah Iran harus melalui persetujuan Khomaeni sebagai pemimpin tertinggi Iran. Setelah Khomaeni wafat, pemimpin tertinggi di pegang oleh Ali Khamenei, dan pemerintah Iran di bawah pimpinan Khamenei telah mengalami masa yang berbeda-beda pula. Di bawah pemerintahan Rafsanjani, batasan terhadap perempuan sedikit longgar, namun belum sepenuhnya. Baru setelahnya masa Khatami, batasan terhadap perempuan sudah mengalami banyak perubahan, meskipun kebijakan yang dibuatnya telah bertentangan dengan para ulama konservatif. Namun, pada masa Ahmadinejad aturan yang dibuat olehnya kembali membuat batasan-batasan terhadap perempuan seperti pada masa Khomaeni.

3. Bentuk dan gerakan perempuan Iran sesudah revolusi mengalami dinamika yang begitu tinggi. Perbedaan kepemimpinan di Iran telah membawa suasana yang berbeda-beda. Meskipun gerakan perempuan Iran banyak di tentang oleh berbagai ulama konservatif, perempuan tetap berjuang dan meminta keadilan serta kesetaraan dalam berbagai hal. Mereka membela hak-hak perempuan sebagai warga negara yang mereka inginkan. Gerakan yang dilakukan oleh perempuan Iran setelah revolusi lebih berani, sehingga terjadi berbagai penentangan terhadap pemerintah Iran. Tidak hanya itu, perempuan Iran juga semakin aktif dan terjun dalam berbagai bidang, baik dalam bidang sosial, politik, dan ekonomi. Bentuk lain dari gerakan perempuan Iran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah dengan masuknya mereka dalam pemerintahan serta peran mereka dibidang sosial dan publik. Pada awalnya gerakan mereka memang mengalami penurunan, disebabkan pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah, namun ketika Iran di pimipin oleh Rafsanjani dan puncaknya pada masa Khatami, perempuan mengalami perkembangan yang signifikan di dalam berbagai hal tersebut. Ketika Iran di pimpin oleh Ahmadinejad (2005-2013), terjadi pembalikan kebijakan seperti pada masa Khomeini utamanya terhadap perempuan, sehingga banyak terjadi kekecewaan di kalangan perempuan. Meskipun begitu, mereka terus gencar untuk mendapatkan kesetaraan di berbagai bidang yang perempuan inginkan.

B. Saran

Dalam penulisan skripsi yang berjudul "Dinamka Gerakan sosial Perempuan Iran (Pra dan Pasca Revolusi 1979)" penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Pada penelitian ini, penulis hanya meneliti sebagian dari gerakan-gerakan perempuan baik sebelum maupun sesudah revolusi yang masih mengalami kendala dan keterbatasan dalam penulisan. Oleh karena itu penulis menyarankan kepada mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya terutama Fakultas Adab dan Humaniora ketika ingin melanjutkan penelitian yang sama mengenai perempuan Iran, bisa memperluas bahasan yang belum bisa peneliti lakukan. Karena

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemungkinan gerakan perempuan Iran juga terpengaruh dari budaya Persia yang terbilang sebagai kerajaan terbesar pada waktu itu, utamanya pada masa Cyrus Agung. Namun, peneliti belum mampu mengungkapkan hal tersebut. Sehingga penelitian ini bisa dilanjutkan oleh peneliti selanjutnya.

2. Melihat perjuangan perempuan di Iran, utamanya sebelum revolusi dan sesudah revolusi yang hanya sampai masa Ahmadinejad, perjuangan mereka sangat luar biasa untuk dipelajari lebih lanjut. Utamanya perjuangan mereka dalam mempromosikan hak-hak perempuan Iran di era modern ini yang begitu rumit dan sedikit berbeda dengan negara-negara lain. Oleh karena itu, peneliti menyarankan kepada para pembaca agar bisa mengambil manfaat dan pelajaran yang bisa didapatkan setelah membaca tulisan ini.
3. Melalui penelitian ini, kita bisa melihat bahwa perjuangan seorang perempuan untuk mencapai tingkat yang sama dengan laki-laki akan selalu mengalami hal yang rumit. Utamanya di negara Iran yang menjadikan hukum Islam dan belum bisa menyesuaikan dengan perubahan zaman yang semakin modern ini, sehingga kita bisa melihat, bahwa perempuan selalu dianggap sebagai makhluk lemah yang masih berada jauh dibawah laki-laki (masih dalam konteks pembahasan hingga tahun 2013) meskipun perubahan yang terjadi memang ada. Oleh karena itu, penulis berharap kepada masyarakat luas, agar bisa diambil manfaat dan pelajaran yang berharga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Daftar Pustaka

Buku

100 Great Women Suara Perempuan yang Menginspirasi Dunia. Yogyakarta: Jogja Bangkit Publisher. 2010.

Abdurrahman, Dudung. *Metode Penelitian Sejarah.* Jakarta: Logos Wacana Ilmu.1999.

Abrahamiand, Ervand. *A History of Modern Iran.* Cambridge: Cambridge University Press. 2008.

Alghar, Hamid. *Rays of The Sun: 83 Stories from The Life of The Imam Khomeini and Tranquil Heart 43 Recollection of Imam Khomeini Relating toPrayers.*Bandung: Pustaka IIMAN. 2006.

Ali , Ansia Khaz. *Iranian Women After The Islamic Revolution.* Beirut, London: Conflict Forum. 2010.

Arjmand, Reza. *Public Urban Space, Gender and Segregation : Women Only Urban Parks in Iran.* New York: Routledge. 2017.

Assagaf, Muhammad Hasyim. *Lintasan Sejarah Iran dari Achaemenia ke Republik Revolusi Islam.* Jakarta: The Culture Section of Embassy of The Islamic Republic of Iran, 2009.

Bahramitash, Roksana. Atena Sadegh and Negin Sattari. *Low-Income Islamist Women and Social Economy in Iran.* New York: Palgrave Macmillan. 2018.

Honarbin, Mehri. *Becoming Visible in Iran: Women in Contemporary Iranian Society.* London: Tauris Academyc Studies. 2008.

Hosseini, Ziba Mir & Richard Tapper. *Islam and Democracy in Iran.* London: I.B. Tauris & Co Ltd. 2006.

Ihromi, T.O. *KajianWanitadalam Pembangunan.* Jakarta: YayasanObor Indonesia. 1995.

Jatmika, Sidik & Vonny Nuansari. *Dinamika Partisipasi Politik Perempuan Iran.* Yogyakarta: LPPI. 2002.

Kartodirjo, Sartono. *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

UI Press. 1985.

Kashani, Firozeh. *Conceiving Citizens: Women and The Politics of Motherhood in Iran.* NewYork: Oxford University Press. 2011.

Khomeini, Ahmad. *Mir'atu Syamsi, terj. Muhdor Assegaf*. Bogor: Cahaya. 2004.

Khomeini, Imam. *Sistem Pemerintahan Islam.*Jakarta: Pustaka Zahra. 2002.

King, Angela E.V. *Gender Mainstreaming an Overview.* New York: United Nations. 2002.

Lapidus, Ira M. *Sejarah Sosial Ummat Islam bagin 3*. Jakarta: PT Raja Grafindo. 2000.

Moghissi, Haideh. *Populism and Feminism in Iran*. London: Macmillan Press LTD. 1994.

Nashat, Guity. *Women and Revolution in Iran.* Boulder: Westview Press. 1983.

Paidar, Parvin. *Women and The Political Process in Twentieth-Century Iran.* Cambridge: Syndicate of the University of Cambridge. 1995.

Puar,Yusuf Abdullah. *Perjuangan Ayatullah Khomeini.* Jakarta: Pustaka Antara. 1979.

Puspitawati, Herien. *Konsep, Teori dan Analisis Gender*. Bogor: PT IPB Press. 2013.

Sarfaraz, Leyla. *Women's Entrepreneurship in Iran: Role Models of Growth Oriented Iranian Women Entreprenerurs.* Shiraz Iran: Springer International Publishing. 2017.

Shahidian, Hammed. *Women in Iran: Gender Politics in The Islamic Republic.* Westport, London: Greenwood Press. 2002.

Syamsudin, Helius. *Metodologi Sejarah.* Yogyakarta: Ombak. 2007.

Sztompka, Piotr. *Sosiologi Perubahan Sosial.* Jakarta: Prenada. 2014.

Tamara, Nasir. *Revolusi Iran.*Jakarta: Sinar Harapan. 1980.

Vakil, Sanam. *Women and Politics in The Islamic Republic of Iran.* New York: The Continuum International Publishing Group. 2011.

Ziba Mir Hosseini, *Sharia and National Law in Iran,* New York: I.B. Tauris & Co Ltd. 2006.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artikel dalam Jurnal dan Buku

Aryan, Khadijeh. "The Boom in Women's Education". *dalam Women, Power and Politics in* 21st Century Iran, ed. Tara Povey. New York: Routledge Tylor and Francis Group. 2012.

Berlow, Rebecca and Shahram Akbarzadeh. "Prospects for Feminism in The Islamic Republic of Iran", dalam *jurnal Human Rights Quarterly,* vol.30, no.1, 2008.

Fisher, W.B. "Physical Geography", dalam *The Cambridge History of Iran.* Cambridge: The Press Syndicate of The University of Cambridge. 1968.

Halper, Louise. "Law and Women's Agency in Post Revolutionary Iran".Dalam *Harvard Journal of Law and Gender.*Vol.28, 95.

Hasyim, Zulfahani. "Perempuan dan Feminisme dalam Prespektif Islam" dalam *Jurnal Penelitian.* MUWAZAH, Vol.4, No.1. 2012.

Hooglund,Eric. "Iran; A Country Study," dalam *Federal Research Division,* ed. Glenn E. Curtis and Eric Hooglund. Washington DC: Library of Congress. 2008.

Janghorban, Roksana & Ali Taghipour. "Women's Empowerment in Iran: A Review Based onthe Related Legislation". dalam *Global Journal of Health Science,* Vol.6, No.4. 2014.

Kadir, Abd. Syiah dan Politik: Studi Republik Islam Iran. *dalam Jurnal Politik Preofetik.* Volume 5, No.1, 2015.

Kian, Azadeh. "From Islamization to the Individualization of Women in Post Revolutionary Iran", *dalam Women, Religion and Culture in Iran,* ed. Sarah Ansari and Vanessa Martin. New York: Routledge Tylor and Francis Group. 2002.

Mahdi, Ali Akbar. "Perceptions of Gender Roles Among Female Iranian Immigrants in theUnited States". *dalam Women, Religion and Culture in Iran.* ed. Sarah Ansari and Vanessa Martin. New York: Routledge Tylor and Francis Group. 2002.

Mahdi, Ali Akbar. "The Iranian Women's Movement : A Century Long Struggle" dalam *Jurnal The Muslim World.*Vol. 94. 2004.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Moghadam, Valintine M. *Women in The Islamic Republic of Iran : Legal Status, Social Politions, and Collective Action.* Woodrow Wilson International Center for Scholars on November 16-17, 2004.

Moinifar, Hesmat Sadat. "Participation of Women in Iran's Polity". Dalam *Journal GEMC,*Special Issue 2, No.1. 2013.

Mortimer, Louis R. "Country profile: Iran," dalam *Library of Congress: Federal Research Division.* Washington DC: Kessinger Publishing. 2008.

Nejadbahram, Zahra."Women and Employment". *dalam Women, Power and Politics in* 21st Century Iran. ed.Torab, Azam. *Performing Islam: Gender and Ritual in Iran*. Leiden: Koninklijke Brill.

Povey, Tara. "The Iranian Women's Movement in its Regional and International", dalam*Women, Power, and Politics in 21st Century Iran,* ed. Tara Povey. New York: Routledge Tylor and Francis Group. 2012.

Pramono, Budi. Perubahan Politik Oleh Faktor Agama. *dalam Jurnal Kajian Politik dan Masalah Pembangungan.* vol.13, No.1, 1983.

Rostami-Povey, Elaheh. "The Women's Movement in Historical Context. *Dalam Women,Power and Politics in* 21st Century Iran. ed. Tara Povey. New York: Routledge Tylor and Francis Group. 2012.

Sabahi, Fabrian. "Gender and The Army of Knowledge in Pahlavi Iran," dalam *Women, Religion and Culture in Iran*. ed. Sarah Ansari & Vanessa Martin. New York: Routledge. 2002.

Sadat, Heshmat. *Participation of Women in Iran's Polity.*dalam *jurnal* GEMC, no.4, vol.2, 2013.

Sudrajat, Ajat. "Imam al-Khumaini dan Negara Republik Islam Iran". *Dalam Jurnal Cakrawala Pendidikan.* Nomor1, Tahun XV, 1996.

Suryorini, Ariana. "Menelaah Feminisme dalam Islam". Dalam *Jurnal Penelitian* SAWWA,Volume 7, Nomor 2. 2012.

Taurat, Azam."The Politicization of Women's Religious Circles in Post revolutionary Iran". *dalam Women, Religion and Culture in Iran.* ed. Sarah Ansari and Vanessa Martin. New York: Routledge Tylor and Francis Group. 2002.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tohidi, Nayereh. “IRAN”. dalam *Women’s Rights in the Middle East and North Africa : Progress Amid Resistance,* ed. Sanja Kelly and Julia Breslin. New York: Freedom House. 2010.

Wise, Krysta. *Islamic Revolution of 1979: The Downfall of American-Iranian Relations,* Legacy: Vol. 11:Iss. 1, Article 2, 4.

Ensiklopedia

Antonio, Muhammad Syafi’i. *Ensiklopedia Perdaban Islam Persia*. Jakarta: Tazkia Publishing. 2012.

Josep, Suad and Afsana Na Mabadi. *Ensyclopedia of Women and Islamic Cultures: Family, Law and Politics.* Leiden: Koninklijke Brill NV. 2005.

Skripsi, Tesis atau Disertasi

Aini,Ni’mah Nur. “Kebijakan Mohammad Khatami Tentang Wanita di Iran”. skripsi, UIN Sunan Kalijaga, fakultas Adab dan Humaniora. 2016.

Brooks,Caroline M. “Moment of Strenght: Iranian Women’s Rights and The 1979 Revolution”. Tesis, Colby College, Lux Mentis Scientia. 2008.

Camara,Andrea De La. “Women’s Rights in Iran: During The Years of The Shah, Ayatullah Khomeini, and Khamenei”. (Tesis, Orlando Florida: MajorProgram in International and Global Studies in the College of Sciences, 2012).

Nawawi,Imam.“PeranPerempuandalamRevolusi Iran”. (skripsi,UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. 2015.

Tafreshi, Poupak. “The Struggle for Freedom, Justice, and Equality : The History of The Journey of Iranian Women in The Last Century”. Tesis,WashingtonUniversity, st.Louis. 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Internet

https://en.wikipedia.org/wiki/Iran (23 Desember 2019)

https://megapolitan.kompas.com//read/2009/08/07/07110331/ahmadinejad.pilih.mentri.perempuan, (15 Februari 2019)

https://internasional.kompas.com/read/2018/11/02/16593491/biografi-tokoh-dunia-mahmoud-ahmadinejad-presiden-iran-yang-sederhana?page=all, 15 februari 2019

https://tirto.id/ahmadinejad-yang-terjungkal-di-laga-pencalonan-presiden-iran-cnie, 15 Februari 2019

http://tirto.id/zumba-dan-deretan-larangan-di-iran-cuIV, 15 Februari 2019

https://m.kumparan.com/@kumparanstyle/transformasi-gaya-busana-perempuan-iran-sebelum-and-sesduah-revolusi, 15 Februari 2019.

https://m.dw.com/id/perempuan-iran-tuntut-perubahan-di-negaranya/a-47454923, 15 Februari 2019.

https://www.bbc.com/majalah-47167017, 15 Februari 2019

https://internasional.kompas.com/read/2010/11/20/0112368/iran.bebaskan.2.perempuan.pengacara, 15 Februari 2019

http://www.juancole.com/2009/tohidi-women-and-presidential-elections.html (diakses 13, Oktober 2018)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id